



**PEMBUKAAN NEGARA JEPANG OLEH BANGSA BARAT
PADA MASA KESHOGUNAN TOKUGAWA
TAHUN 1791-1867**

SKRIPSI

Oleh

**Wardatul Munawwaroh
NIM 110210302034**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**PEMBUKAAN NEGARA JEPANG OLEH BANGSA BARAT
PADA MASA KESHOGUNAN TOKUGAWA
TAHUN 1791-1867**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Pendidikan Sejarah (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh

**Wardatul Munawwaroh
NIM 110210302034**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Sitti Rokaiyah dan Ayahanda Moh. Ruddin tercinta yang selalu mencurahkan kasih sayangnya;
2. Teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini sampai tuntas;
3. Guru-guruku sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi;
4. Almamater Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

MOTO

Keabadian suksesi Kekaisaran, hubungan yang agung antara tuan dan pembantunya,
ayah dan anak, langit dan bumi tidak pernah berubah;
inilah “Jalan utama” langit dan bumi.
(Tokugawa Nariaki)^{*)}



^{*)} Robert N. Bellah. 1992. Religi Tokugawa Akar-akar Budaya Jepang. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Wardatul Munawwaroh

NIM : 110210302034

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Pembukaan Negara Jepang Oleh Bangsa Barat Pada Masa Keshogunan Tokugawa Tahun 1791-1867” adalah benar-benar asli karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan diinstitusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 Juni 2015

Yang menyatakan

Wardatul Munawwaroh

NIM 110210302034

SKRIPSI

**PEMBUKAAN NEGARA JEPANG OLEH BANGSA BARAT
PADA MASA KESHOGUNAN TOKUGAWA
TAHUN 1791-1867**

Oleh

**Wardatul Munawwaroh
NIM 110210302034**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Sri Handayani, M.M

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Sumardi, M.Hum

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Pembukaan Negara Jepang Oleh Bangsa Barat Pada Masa Keshogunan Tokugawa Tahun 1791-1867” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Kamis, 11 Juni 2015

tempat : Gedung 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Sri Handayani, M.M
NIP. 19521201 198503 2 002

Dr. Sumardi, M.Hum
NIP. 19600518 198902 1 001

Anggota I,

Anggota II,

Dr. Moh. Na'im, M.Pd
NIP. 19660328 200012 1 001

Drs. Sumarjono, M.Si
NIP. 19580823 198702 1 001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Prof. Dr. Sunardi, M.Pd
NIP. 19540501 198303 1 005

RINGKASAN

Pembukaan Negara Jepang Oleh Bangsa Barat Pada Masa Keshogunan Tokugawa Tahun 1791-1867; Wardatul Munawwaroh, 110210302034; 2015; 150+xv halaman; Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Pembukaan negara Jepang yang dilakukan oleh bangsa Barat dilatarbelakangi oleh kebijakan politik isolasi atau *sakoku* yang dilaksanakan oleh Jepang pada masa Keshogunan Tokugawa. Kebijakan isolasi yang sudah bertahun-tahun dilaksanakan Jepang ingin dihentikan oleh bangsa Barat sebab, pada abad ke 18 bangsa Barat tengah berlomba-lomba untuk memperluas perdagangannya akibat terjadinya revolusi industri. Letak geografis Jepang yang berada didekat Laut Pasifik menjadi alasan lain bangsa Barat ingin membuka negara Jepang.

Permasalahan dalam penelitian ini (1) bagaimana latarbelakang masuknya bangsa Barat ke Jepang pada masa Keshogunan Tokugawa?; (2) bagaimana pembukaan negara Jepang oleh bangsa Barat pada masa Keshogunan Tokugawa tahun 1791-1858?; (3) bagaimana dampak pembukaan negara Jepang oleh bangsa Barat terhadap Keshogunan Tokugawa tahun 1853-1867?. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini (1) untuk menganalisis latarbelakang masuknya bangsa Barat ke Jepang pada masa Keshogunan Tokugawa; (2) untuk menganalisis pembukaan negara Jepang oleh bangsa Barat pada masa Keshogunan Tokugawa tahun 1853-1858; (3) untuk menganalisis dampak pembukaan negara Jepang oleh bangsa Barat terhadap Keshogunan Tokugawa tahun 1853-1867. Manfaat dari penelitian ini (1) bagi ilmu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu sejarah; (2) bagi mahasiswa program studi pendidikan sejarah, merupakan upaya peningkatan kualitas sebagai calon guru sejarah yang professional; (3) bagi pembaca, dapat menambah wawasan tentang sejarah dunia khususnya sejarah Asia Timur yakni pembukaan negara Jepang oleh bangsa Barat pada masa Keshogunan Tokugawa tahun 1791-1867; (4) bagi guru sejarah, dapat memperkaya materi kesejarahan

khususnya Sejarah Asia Timur, yaitu pembukaan negara Jepang oleh bangsa Barat pada masa Keshogunan Tokugawa tahun 1791-1867; (5) bagi almamater, merupakan perwujudan dari salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu yang berkaitan dengan dharma penelitian dan pengembangan ilmu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Ada 4 tahap yang harus dilalui dalam metode sejarah yakni, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologi politik milik Duverger dan teori konflik George Simmel. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah, (1) masuknya bangsa Barat ke Jepang dilatar belakangi oleh terjadinya revolusi industri yang mengakibatkan terjadinya perlombaan untuk mencari wilayah baru yang dapat dijadikan tempat pemasaran dan penghasil bahan baku. (2) Pembukaan negara Jepang dimulai pada tahun 1791 oleh Rusia dan berhasil terjadi pada tahun 1854 dengan adanya perjanjian Kanagawa serta perjanjian Perdagangan dan Persahabatan pada tahun 1858. Perjanjian Kanagawa serta perjanjian Perdagangan dan Persahabatan yang berhasil dilakukan Amerika Serikat kemudian diikuti oleh negara Inggris, Rusia, Belanda dan Perancis. (3) Pembukaan Jepang yang dilakukan oleh bangsa Barat semakin memperkeruh permasalahan yang terjadi Jepang seperti, munculnya gerakan *Sonno Joi*, serangan yang dilakukan terhadap warga asing, terjadinya pengeboman Kagoshima yang dilakukan pasukan Inggris terhadap daimyo Satsuma pada tahun 1863, terjadinya pengeboman selat Shimonoseki yang dilakukan oleh pasukan Inggris, Amerika Serikat, Belanda dan Perancis terhadap daimyo Choshu pada tahun 1864, perekonomian yang buruk hingga terjadinya pengembalian kekuasaan dari Tokugawa Yoshinobu ke Kaisar Mutsuhito pada tanggal 8 November 1867. Kesimpulan dari penelitian ini ialah, pembukaan negara Jepang yang dilakukan oleh bangsa Barat berdampak terhadap berakhirnya Keshogunan Tokugawa yang ditandai dengan peristiwa pengembalian kekuasaan dari Shogun ke Kaisar. Saran dalam penelitian ini diperuntukkan bagi pemerintah, bagi generasi penerus bangsa dan bagi mahasiswa program studi pendidikan sejarah.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembukaan Negara Jepang Oleh Bangsa Barat Pada Masa Keshogunan Tokugawa Tahun 1791-1867”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (SI) pada Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc, Ph.D. selaku Rektor Universitas Jember;
2. Prof. Dr. Sunardi, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
3. Dr. Sukidin, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial;
4. Dr. Nurul Umamah, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah;
5. Dr. Sri Handayani, M.M., selaku Dosen Pembimbing I, Dr. Sumardi, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, Dr. Moh. Na'im, M.Pd., selaku Dosen Penguji I, dan Drs. Sumarjono, M.Si., selaku Dosen Penguji II yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
6. Prof. Dr. Bambang Soepeno, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa;
7. Dr. Sumarno, M.Pd, selaku Ketua Komisi Pembimbing;
8. Ibunda Sitti Rokaiyah dan Ayahanda Moh. Ruddin tercinta yang tidak pernah lelah untuk selalu memberi motivasi, dukungan dan doanya;
9. Adikku tersayang Moh. Mahrus Ali dan gadis kecilku Afiyatul Karimah yang selalu memberiku semangat;
10. Alm. Pakdhe Lukito Sutrisno dan Budhe Nafi'ah yang selalu memberi dukungan dan doanya;

11. Sahabat-sahabatku di Program Studi Pendidikan Sejarah Siti Ma'unah, S.Pd., Teguh Prasetyo, S.Pd., Dwiki Olivia Silvi, Priyanti, S.Pd., Rahayu Fitriyaningsih, S.Pd., Happy Khoirunnisa', Naimatul Ainayah, Deni Adi Wijaya, Arief Muhammad Ramdhani, S.Pd., Rina Asih Niasari dan teman-teman lainnya yang telah memberikan dorongan semangat dan doanya demi terselesaikannya skripsi ini;
12. Kakak angkatan di Program Studi Pendidikan Sejarah Mas Gema Budiarto, S.Pd., dan Mas Edi Supriyadi, S.Pd., yang sangat membantu demi terselesainya skripsi ini;
13. Teman-teman seperjuangan Julian Maulananda Suyono, Riddah Dyna Alifah, Lisia Rahmawati, Dina Nur Holida, S.H., Ainul Masrurroh, Hollilatus Sesariah Rodiah, dan Sudirham Bagus Anggriawan yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini;
14. Husen Al Kaff beserta keluarga yang sudah memberikan dukungannya;
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis tidak lain semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 11 Juni 2015

Penulis

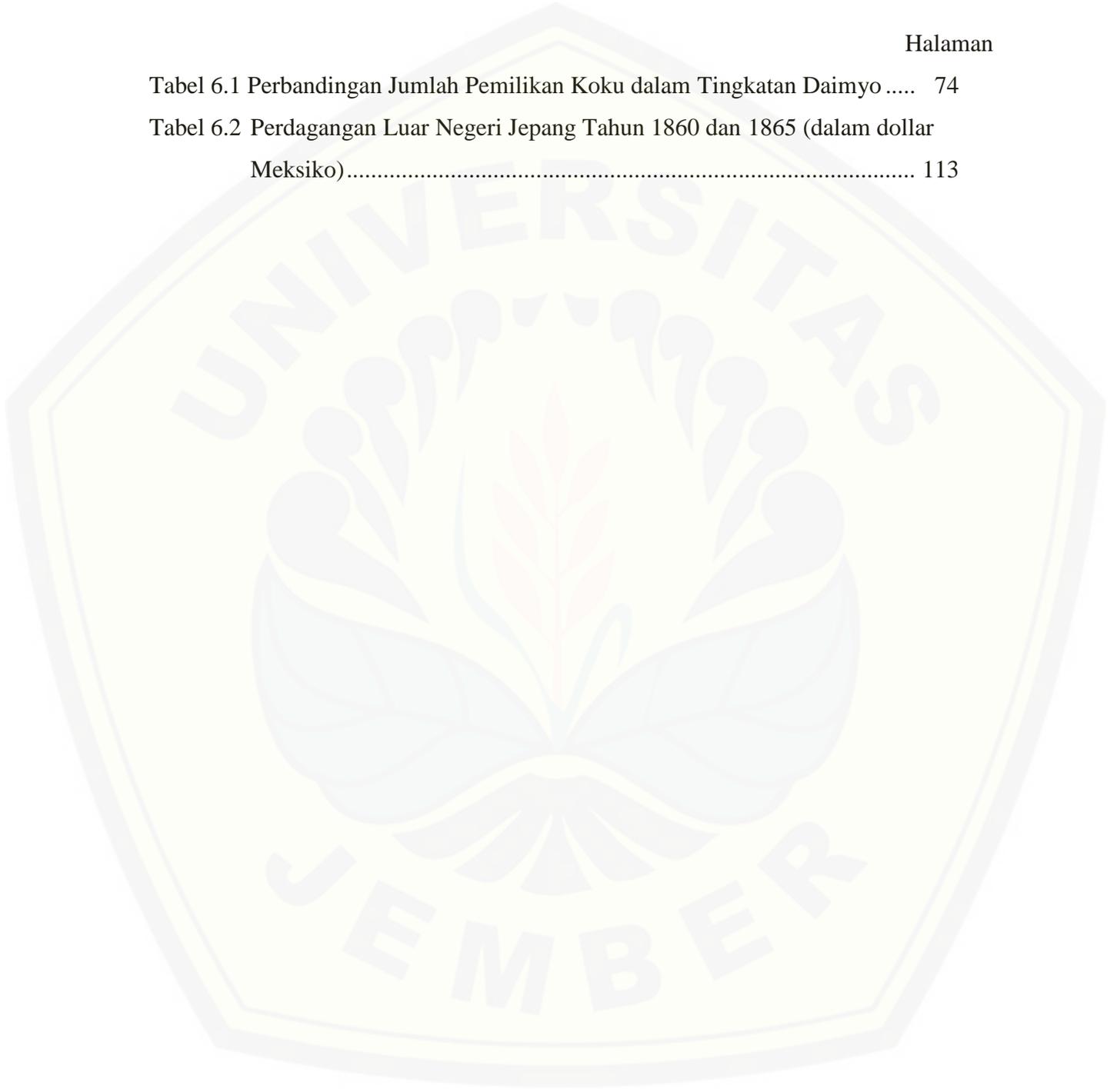
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUT.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penegasan Pengertian Judul.....	10
1.3 Ruang Lingkup Permasalahan	12
1.4 Rumusan Masalah	13
1.5 Tujuan Penelitian.....	13
1.6 Manfaat Penelitian.....	13
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	15
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	23
BAB 4. LATAR BELAKANG MASUKNYA BANGSA BARAT KE JEPANG PADA MASA KESHOGUNAN TOKUGAWA	31
BAB 5. PEMBUKAAN NEGARA JEPANG OLEH BANGSA BARAT PADA MASA KESHOGUNAN TOKUGAWA TAHUN 1791-1858.....	35
5.1 Rusia.....	35

5.2 Inggris	41
5.3 Belanda dan Perancis	44
5.4 Amerika Serikat	46
5.5 Perjanjian Kanagawa	55
5.6 Perjanjian Persahabatan dan Perdagangan.....	61
BAB 6. DAMPAK PEMBUKAAN NEGARA JEPANG OLEH BANGSA BARAT TERHADAP KESHOGUNAN TOKUGAWA TAHUN 1853-1867	73
6.1 Munculnya Gerakan <i>Sonno Joi</i>	73
6.2 Serangan Terhadap Warga Asing	80
6.3 Pengeboman Kagoshima	87
6.4 Pengeboman Shimonoseki I	92
6.5 Pengeboman Shimonoseki II.....	96
6.6 Ekonomi yang Buruk.....	111
6.7 Pengembalian Kekuasaan dari Shogun ke Kaisar.....	113
BAB 7. PENUTUP.....	117
7.1 Kesimpulan.....	117
7.2 Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN	125

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 6.1 Perbandingan Jumlah Pemilikan Koku dalam Tingkatan Daimyo	74
Tabel 6.2 Perdagangan Luar Negeri Jepang Tahun 1860 dan 1865 (dalam dollar Meksiko).....	113



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Matrik Penelitian.....	124
B. Perjanjian Kanagawa.....	125
C. The United States-Japan Treaty Of Amity and Commerce On July 29, 1858	132
D. Keshogunan Tokugawa.....	142
E. Daftar Daimyo-Daimyo Terkenal Pada Masa Keshogunan Tokugawa Beserta Tanah Jajahannya Tahun 1865.....	143
F. Peta Wilayah Jepang Pada Masa Keshogunan Tokugawa	144
G. Peta Pengeboman Kagoshima Tahun 1863.....	145
H. Peta Penutupan Selat Shimonoseki Tahun 1863	146
I. Daftar Gambar	147
Gambar 01. Pasukan Perry Tiba di Yokohama Tahun 1854.....	147
Gambar 02. Dokumen Perjanjian Persahabatan dan Perdagangan antara Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Belanda dan Perancis dengan Jepang Pada Tahun 1858	147
Gambar 03. Pembayaran atas Pembunuhan Richardson	148
Gambar 04. Kondisi Benteng Jepang Setelah Angkatan Laut dari Inggris, Amerika Serikat, Belanda dan Perancis Mendarat	148
Gambar 05. Mata Uang Perak dan Emas yang Digunakan Jepang Pada Masa Keshogunan Tokugawa	149
Gambar 06. Mata Uang Dolar Meksiko yang Digunakan di Jepang Pada Masa Keshogunan Tokugawa	149
Gambar 07. Tokugawa Yoshinobu (Shogun Terakhir)	150
Gambar 08. Kaisar Mutsuhito	150

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jepang merupakan negara maju yang tidak bisa dipandang sebelah mata dalam dunia internasional. Kemajuan tersebut, menjadikan Jepang mampu bersaing di pasaran dunia. Perkembangan negara Jepang sangat dipengaruhi oleh kondisi geografisnya. Jepang sebagai negara kepulauan memiliki luas wilayah 337.748 km². Kepulauan Jepang terbentang dari utara (garis bujur utara 45⁰33') ke selatan (garis bujur utara 20⁰25') dengan panjang 3800 kilometer (Kedutaan Besar Jepang, 1985: 5). Pulau-pulau besar yang ada di Jepang berjumlah 4, yakni Hokkaido dengan luas 30.334 mil persegi, Honshu 88.968 mil persegi, Shikoku 7.280 mil persegi dan Kyushu 15.756 mil persegi (Lan, 1962: 1).

Letak geografi Jepang memanjang dari timur laut ke barat daya pasifik. Pantai yang panjang dan menghadap ke Samudera Pasifik serta adanya laut pedalaman (*inland sea*) memungkinkan adanya banyak pelabuhan di sepanjang pantai, karena lautnya yang cukup dalam. Kondisi tersebut mendukung dibangunnya industri Jepang di sepanjang pantai timur dan di sekeliling laut pedalaman. Hal ini tentu mempermudah angkutan bahan mentah dan sumber energi serta hasil produksi untuk diekspor, sebab pusat-pusat industri mudah dicapai dengan kapal-kapal (Suryohadioprojo, 1987: 6). Dengan kondisi geografis yang demikian tentu berpengaruh pada perekonomian Jepang khususnya dalam bidang industri. Industri yang dapat berkembang dengan baik, mampu mendorong Jepang menjadi negara yang maju.

Dibalik kemajuan yang telah diraihinya, Jepang pernah mengalami masa isolasi selama lebih dari 200 tahun. Proses isolasi Jepang terjadi pada pemerintahan Tokugawa. Masa pemerintahannya dikenal juga dengan zaman Edo yang berlangsung selama lebih dari dua abad (1603-1867). Tokugawa menjadi penguasa di Jepang, setelah Ieyasu berhasil memenangkan pertempuran Sekigahara. Ieyasu kemudian mendirikan pemerintahan militer yang dikenal dengan nama Keshogunan Tokugawa.

Pada tahun 1603 Tokugawa Ieyasu ditunjuk oleh Kaisar Go Yozei sebagai Shogun (Handayani dan Gema, 2014: 66). Tokugawa merupakan Shogun terakhir yang berkuasa di Jepang. Sebelumnya telah ada Keshogunan Kamakura (1185-1333) dan Muromachi (1333-1537).

Secara de facto Shogun yang menguasai pemerintahan Jepang. Kaisar atau *tenno* yang merupakan keturunan dari Dewi Matahari yakni Amaterasu Omikami dan menduduki posisi tertinggi sebagai pemimpin Jepang hanya dijadikan sebagai lambang atau simbol negara. Kondisi ini menandai dimulainya periode Keshogunan Tokugawa yang disebut dengan periode feodalisme militer dan berlangsung hingga abad ke 19 (Simandjuntak, 1992: 26-27; Tjeng, 1983: 365). Dengan demikian di Jepang telah terjadi dualisme pemerintahan yakni, pemerintahan militer yang berpusat di Edo dengan Shogun sebagai pemimpin dan pemerintahan sipil yang berpusat di Kyoto dengan Kaisar sebagai pemimpin. Dualisme pemerintahan inilah yang nantinya berpengaruh pada pembukaan negara Jepang yang dilakukan bangsa Barat.

Langkah awal yang dilakukan Tokugawa Ieyasu setelah diresmikan sebagai Shogun ialah mendirikan pemerintahan feodalisme militer. Pemerintahan ini berpusat di kota Edo (Tokyo sekarang) (Departemen Luar Negeri Jepang, 1967: 15; Sakamoto, 1982: 37). Pada masa Keshogunan Tokugawa, keluarga Kaisar mendapat pengawasan yang ketat. Kaisar dan bangsawan-bangsawan istana (*kuge*) mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan kedudukan mereka, akan tetapi mereka tidak boleh memiliki tanah. Kaisar yang diakui sebagai keturunan Dewi Matahari tidak boleh ikut campur dalam urusan pemerintahan dan hanya mempunyai fungsi yang sakral. Untuk menjaga sifat kedewaaannya, maka Kaisar diasingkan dari rakyat (Soeroto, 1954: 135-136).

Tokugawa melakukan beberapa kebijakan baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial untuk melindungi eksistensi kekuasaannya agar dapat berjalan dengan baik. Salah satu kebijakan politik yang begitu dikenal adalah politik *Sakoku Jidai* atau menutup diri. Politik Sakoku merupakan masa mengisolasi Jepang dari pengaruh

bangsa lain yang dapat merusak persatuan negara. Pengaruh tersebut muncul ketika bangsa Spanyol atau Portugis menyebarkan agama Kristen. Keshogunan Tokugawa tidak akan goyah tanpa adanya campur tangan dari dunia lain. Dalam waktu yang sama orang-orang Jepang yang saat itu berada di luar negeri tidak diperbolehkan untuk pulang ke negaranya (Widarahesty dan Rindu, 2011: 49; Yukichi, 1985: 221).

Politik isolasi yang dijalankan Keshogunan Tokugawa tidak sepenuhnya menutup Jepang dari bangsa asing, karena ada beberapa negara yang diperbolehkan mengadakan hubungan dagang dengan Jepang seperti Belanda, Cina, dan Korea dan tinggal di pulau Deshima dekat Nagasaki. Beberapa negara tersebut diperbolehkan berdagang di Jepang sebab, menurut pandangan Shogun negara-negara tersebut tidak membawa misi lain selain berdagang. Negara Spanyol maupun Portugis dilarang berdagang karena tujuannya selain berdagang ialah menyebarkan agama kristen yang dapat membahayakan kedudukan Tokugawa. Alasan lainnya ialah karena Belanda membantu Shogun untuk menghentikan pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Jepang yang beragama kristen, sedangkan Spanyol dan Portugis menjadi negara penyebab adanya rakyat Jepang yang memeluk agama kristen (Bahri, 1998: 56). Dengan demikian, politik isolasi yang dilakukan Tokugawa dilakukan semata-mata untuk tetap mempertahankan kekuasaannya di Jepang. Menurut Shogun politik isolasi yang dijalankannya akan meminimalisir bahaya dari luar yang mengancam kedudukannya.

Proses isolasi di Jepang berlangsung cukup lama, dimulai pada tahun 1635 dan berakhir pada tahun 1854 saat terjadi perjanjian pembukaan pelabuhan yang dilakukan dengan bangsa Barat. Masa Isolasi yang lama membuat Jepang mengalami masa damai yang cukup panjang. Masa damai tersebut memang memperlihatkan bahwa Keshogunan Tokugawa mampu mengendalikan pemerintahan, namun dengan tidak adanya perang menyebabkan Samurai yang menjadi kekuatan militer Jepang kehilangan peranannya (Dasuki, 1963a: 61). Dalam hal ini golongan militer Tokugawa mulai mengalami kemunduran. Ini menjadikan pengawasan dari pemerintah mulai berkurang. Pengawasan yang kurang mengakibatkan keadaan suatu

negara menjadi tidak stabil (Stockwin, 1984: 14). Masa Isolasi yang dilaluinya, ternyata berdampak terhadap pemerintahan Jepang. Dampak yang dimunculkan tidak hanya bersifat positif tapi juga negatif.

Di bidang ekonomi Tokugawa membuat peraturan baru tentang ekonomi uang sebagai pengganti ekonomi beras. Para daimyo dan samurai yang mengandalkan pendapatannya dari hasil pertanian, harus menjual beras yang mereka dapat kepada para pedagang untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika hasil panen sedikit atau penghasilan para daimyo dan samurai telah habis sebelum masa panen berikutnya datang maka, para daimyo dan samurai akan berhutang kepada para pedagang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Bellah, 1992: 40; Suryohadiprojo, 1987: 78-79). Keadaan tersebut menjadikan para daimyo dan samurai sangat tergantung pada para pedagang yang berfungsi juga sebagai bangkir. Selain itu, kebijakan *Sankinkotai* (sistem pergantian tempat tinggal) yang wajib dilakukan para daimyo mengakibatkan biaya yang dikeluarkan cukup besar. Hal ini semakin membuat para daimyo banyak terlilit hutang kepada para pedagang. Peran pedagang saat itu menjadi kuat, meski status sosialnya berada di bawah samurai (Ishii, 1989: 86). Adanya aturan mengenai uang yang dibuat Tokugawa menyebabkan kondisi perekonomian Jepang mengalami kekacauan. Kekacauan yang dimunculkan juga berpengaruh terhadap status sosial yang berlaku di Jepang.

Ekonomi uang juga berpengaruh terhadap kondisi para petani. Kesulitan keuangan yang dialami Jepang saat itu menyebabkan bakufu dan para daimyo menarik pajak yang sangat berat kepada para petani. Hasil panen yang banyak tidak memberikan imbalan yang sepadan, sebab kelebihan panen petani dijual dengan harga yang sangat murah. Kegagalan panen yang kadang terjadi semakin menyulitkan kehidupan para petani. Banyak para petani akhirnya jatuh miskin dan terpaksa melepaskan tanahnya, meskipun beberapa petani yang lebih baik memilih untuk menjual minuman keras demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Petani yang paling miskin mulai berkelompok untuk membela haknya. Sejak tahun 1766 banyak para petani yang melakukan pemberontakan terhadap bakufu (Dasuki, 1963a: 62-63; Bain,

1962: 25; Sakamoto, 1982: 44). Kebijakan ekonomi uang yang dilakukan Tokugawa menyebabkan para petani sendiri mengalami kondisi yang sangat menyedihkan. Kondisi inilah yang menyebabkan pada masa itu muncul rasa tidak suka dari masyarakat Jepang khususnya para petani terhadap kepemimpinan Tokugawa.

Di bidang sosial bakufu berusaha menghidupkan kembali ajaran konfusianisme yang dijadikan sebagai pegangan hidup masyarakat Jepang. Ajaran Konfusianisme merupakan etika dan prinsip berhubungan dengan manusia lain. Pemerintah Tokugawa berharap, dengan ajaran tersebut masyarakat Jepang akan tunduk dan setia terhadap Kaisar serta mematuhi akan keputusan Kaisar tentang pengangkatan dirinya sebagai Shogun. (Lan, 1962: 100; Bain, 1962: 27). Pengajaran tentang Konfusianisme menyebabkan masalah baru dalam masyarakat Jepang. Permasalahan tersebut bermula ketika muncul aliran Shintoisme yakni aliran yang berusaha mempelajari sejarah Jepang dan agama nasional. Aliran tersebut berusaha menentang ajaran Konfusianisme yang didukung oleh Tokugawa dan menampilkan anggapan lama Jepang tentang kedudukan Kaisar sebagai keturunan Dewi Matahari. Ajaran Shintoisme juga mengajarkan akan kesetiaan tinggi pada Kaisar bukan Shogun. Ini menimbulkan anggapan dalam masyarakat Jepang bahwa kekuasaan Shogun tidak sah dan telah merampas kekuasaan dari Kaisar (Dasuki, 1963a: 61; Bain, 1962: 26).

Permasalahan-permasalahan yang terjadi menyebabkan kerapuhan dalam Keshogunan Tokugawa. Ini yang menimbulkan munculnya golongan-golongan yang tidak menyukai kepemimpinan Tokugawa khususnya dari daimyo Tozama. Daimyo Tozama merupakan daimyo yang kalah dalam perang Sekigahara melawan pasukan Ieyasu dan mereka ditempatkan diluar wilayah Keshogunan Tokugawa. Seluruh golongan yang tidak menyukai kepemimpinan Tokugawa menyatukan diri dalam suatu gerakan yang menghendaki pengembalian kekuasaan ke tangan Kaisar (Dasuki, 1963b: 3).

Ketika Keshogunan Tokugawa berada dalam masalah internalnya, diluar Jepang telah terjadi Revolusi Industri di Inggris. Revolusi Industri yang terjadi sangat mempengaruhi perkembangan negara-negara di Eropa dan Amerika (Ajib, 1981: 15;

Sakamoto, 1982: 45-46). Hal ini yang menjadikan bangsa-bangsa Barat berusaha mencari daerah pemasaran dan daerah penghasil bahan baku. Bangsa Barat mulai melakukan pelayaran dunia dan dalam pelayaran tersebut mereka nantinya menemukan Jepang.

Kedatangan bangsa Barat ke Jepang sebagian besar memiliki tujuan yang sama yakni ingin mengadakan hubungan dagang untuk menunjang kepentingan ekonominya. Letak Jepang yang berada di dekat Samudra Pasifik merupakan posisi yang strategis untuk dijadikan sebagai tempat peristirahatan kapal-kapal bangsa Barat. Oleh karena itu, bangsa Barat seperti Amerika, Rusia, Belanda, Inggris, dan Perancis ingin membuka pintu Jepang dari politik isolasi yang telah dijalankan selama bertahun-tahun.

Rusia merupakan negara pertama yang berusaha membuka pintu Jepang. Pada tahun 1791 Adam Laxmann pergi ke Nemuro di Hokkaido untuk mengajukan nota resmi memohon dibukanya hubungan dagang antara Jepang dengan Rusia, namun usaha ini tidak membuahkan hasil. Tahun 1804 Rusia kembali mengirim utusannya bernama Rezanov, tetapi saat itu Rezanov juga tidak menerima respon yang baik dari pemerintah Jepang (Sakamoto, 1982: 46; Lan, 1962: 113-114). Inggris pada tahun 1813-1814 dan Perancis tahun 1846 juga ikut serta dalam upaya mengadakan hubungan dagang dengan Jepang, akan tetapi usahanya juga tidak membuahkan hasil. Raja Belanda pada tahun 1847 juga mengirim surat kepada bakufu yang memberitahukan tentang kerugian Jepang jika terus mempertahankan politik isolasinya dan memperingatkan akan kedatangan Amerika (Lan, 1962: 122). Dengan demikian, usaha untuk membuka Jepang ternyata sudah ada sejak tahun 1791 yang dilakukan oleh Rusia. Usaha yang dilakukan Rusia kemudian diikuti oleh negara-negara lainnya seperti Inggris, Perancis, Belanda dan Amerika Serikat.

Pada 3 Juli 1853 Commodore Perry tiba di teluk Edo dekat dengan kampung nelayan Uraga. Perry membawa surat dari Presiden Amerika Serikat yang menginginkan terjadinya hubungan dagang dengan Jepang (Sakamoto, 1982: 46; Lan, 1962: 126). Kondisi ini menyebabkan posisi bakufu menjadi terjepit. Bakufu

menyadari akan kemajuan-kemajuan yang terjadi di Eropa dan keunggulan yang dimiliki bangsa Barat dalam bidang militer. Informasi mengenai kemajuan bangsa Barat diperolehnya dari bangsa Belanda yang berada di Pulau Deshima. Oleh karena itu, ketika Perry datang dengan membawa kapal perangnya membuat bakufu tidak mempunyai pilihan lain selain membuka Jepang (Tjeng, 1983: 356; Simandjuntak, 1992: 27).

Pada 31 Maret 1854 perjanjian Kanagawa ditanda tangani oleh Tokugawa dengan Amerika Serikat di Yokohama. Perjanjian yang sama selanjutnya dilakukan oleh Keshogunan Tokugawa dengan Rusia, Belanda, dan Inggris. Semenjak saat itu, banyak bangsa Barat yang mulai datang ke Jepang. Perjanjian berikutnya dilakukan lagi oleh Amerika Serikat yang diwakili oleh Townsend Harris dengan Keshogunan Tokugawa pada tanggal 29 Juli 1858. Pada bulan-bulan berikutnya diadakan pula perjanjian yang serupa dengan Rusia, Belanda, Perancis, dan Inggris. Perjanjian-perjanjian tersebut telah membuat Jepang benar-benar membuka pintunya kepada bangsa Barat (Lan, 1962: 126-129; Agung, 2012: 106; Darsono, 2014: 45).

Pilihan untuk membuka hubungan Jepang dengan bangsa Barat, dijatuhkan bukan atas keinginan bakufu sendiri, melainkan karena situasi yang tidak memungkinkan. Bakufu juga menyadari akan resiko yang harus diterimanya. Golongan yang dari awal tidak menyukainya, akan semakin berkeinginan untuk menggulingkan Keshogunan Tokugawa. Perjanjian-perjanjian yang terjadi antara bangsa Barat dengan Tokugawa dilakukan tanpa izin dari Kaisar. Inilah yang menjadi kesalahan bakufu sehingga oleh kelompok yang dari awal tidak menyukai kepemimpinannya yaitu daimyo Tozama dijadikan senjata ampuh untuk menggulingkan kekuasaan Shogun dan mengembalikan kekuasaan yang sebenarnya ke tangan Kaisar. Daimyo Tozama merupakan daimyo bekas bawahan Toyotami Hideyoshi yang belum sepenuhnya dipercayai oleh Shogun sehingga mendapatkan berbagai macam pembatasan salah satunya menduduki jabatan-jabatan penting di Edo. Daimyo Tozama terdiri dari daimyo-daimyo dari Satsuma, Choshu, Hizen, dan Tosa (SATCHO-HITO) (Beasley dalam Subakti, 2011: 18).

Di sisi lain, para ronin (samurai yang melepaskan ikatan feodal dengan tuannya) yang tidak suka akan kedatangan bangsa Barat berkumpul untuk mengusir mereka. Kelompok ronin tersebut kemudian menamakan diri mereka sebagai *shishi* “yang bercita-cita tinggi”. Masyarakat Jepang yang tidak suka dengan bangsa Barat sejak dulu menganggap mereka sebagai bangsa bar-bar yang sombong dan harus diusir dari Jepang (Hayes, 1994: 16). Setelah pembukaan negara Jepang, para *shishi* memutuskan untuk bergabung dengan gerakan *Sonno Joi* “Junjung tinggi kaisar, usir orang biadab” yang didalamnya tergabung kelompok konservatif dan nasionalis. Bergabungnya *shishi* semakin membuat mereka yang tidak menyukai kedatangan bangsa Barat berusaha untuk melakukan pengusiran (Subakti, 2011: 26).

Berbagai usaha sudah dilakukan oleh para *shishi* maupun kelompok-kelompok lainnya, mulai dari insiden penyerangan warga asing, insiden pembunuhan pedagang berkebangsaan Inggris bernama Richardson sampai penembakan kapal-kapal milik Amerika, Inggris, Perancis dan Belanda. Usaha tersebut juga dilakukan untuk memperkeruh hubungan antara bakufu dengan bangsa Barat. Beberapa peristiwa penyerangan, pembunuhan dan penembakan kapal yang dilakukan akhirnya berdampak pada pembalasan yang dilakukan bangsa Barat dengan menggempur benteng pertahanan Choshu di Selat Shimonoseki dan benteng Satsuma di Kagoshima. Peristiwa di Selat Shimonoseki dan Kagoshima, akhirnya menyadarkan para daimyo dan samurai yang anti asing khususnya dari Choshu dan Satsuma akan keunggulan militer yang dimiliki bangsa Barat. Pada tahun 1864 Choshu dan Satsuma mengikat tali persahabatan dengan bangsa Barat. Hubungan baik yang dibuat nantinya akan digunakan untuk memodernisasi pasukan Choshu dan Satsuma (Lan, 1962: 133-134; Dasuki, 1963b: 11).

Perjanjian-perjanjian yang dilakukan bangsa Barat dengan Shogun mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat akan kekuasaan Tokugawa. Masyarakat menilai bahwa Shogun tidak mampu lagi melindungi Jepang dari pengaruh bangsa Barat. Oleh karena itu, Shogun tidak berhak untuk memegang kekuasaan. Ajaran Shintoime juga semakin menyadarkan masyarakat bahwa Kaisar

yang lebih berhak memegang kekuasaan Jepang sepenuhnya (Agung, 2012: 107). Pembukaan negara Jepang yang dilakukan oleh bangsa Barat melalui suatu perjanjian, baik itu perjanjian Kanagawa maupun perjanjian Persahabatan dan Perdagangan telah menimbulkan suatu dampak terhadap Keshogunan Tokugawa. Dampak yang diberikan semakin memperkeruh permasalahan internal yang terjadi di Jepang dan menyulitkan keadaan yang ada khususnya posisi Keshogunan Tokugawa.

Keshogunan Tokugawa mengambil keputusan dengan membuka Jepang untuk menghindari kekacauan yang terjadi. Kekacauan tersebut jelas akan merugikan bangsa Jepang sendiri, selain itu kerjasama yang dilakukan Shogun dengan bangsa Barat diharapkan mampu menjaga eksistensinya sebagai penguasa Jepang. Keunggulan militer dan teknologi yang dimiliki bangsa Barat diharapkan dapat menjadi pedoman bakufu dalam melatih pasukan perangnya dan memodernisasi senjata yang digunakan (Hayes, 1994: 17). Modernisasi yang dilakukan bakufu nantinya dapat digunakan untuk menekan kelompok-kelompok yang ingin menggulingkan Keshogunan Tokugawa.

Kenyataannya bangsa Barat memilih untuk bersikap netral dan tidak memihak kepada siapapun dalam menghadapi permasalahan politik yang terjadi di Jepang. Bangsa Barat menyadari bahwa permasalahan dalam perdagangan dan hubungan diplomatik yang terjadi di Jepang tidak akan berjalan dengan baik, jika tetap terjadi dualisme pemerintahan. Dualisme pemerintahan yang dimaksud adalah, pemerintahan yang dipegang oleh Kaisar dan pemerintahana yang dipegang Shogun.

Berdasarkan uraian diatas, hal yang menarik untuk dibahas dalam penelitian ini yaitu, pembukaan negara Jepang oleh bangsa Barat memberikan dampak cukup kuat terhadap permasalahan internal yang sebelumnya sudah terjadi pada masa Keshogunan Tokugawa. Dampak yang diberikan mampu mengubah pola pikir para daimyo yang awalnya anti asing menjadi bersahabat dengan bangsa Barat. Pembukaan negara Jepang yang dilakukan oleh bangsa Barat juga mampu mengakhiri dualisme pemerintahan yang telah terjadi di Jepang. Berakhirnya dualisme pemerintahan di Jepang ditandai dengan pengembalian kekuasaan yang sebenarnya

dari Tokugawa Yoshinobu ke Kaisar Mutsuhito pada tanggal 8 November 1867. Permasalahan ini juga penting untuk diteliti karena penelitian-penelitian terdahulu yang fokus kajiannya mengenai pembukaan negara Jepang oleh bangsa Barat serta dampak yang dimunculkan terhadap Keshogunan Tokugawa belum banyak dikaji secara mendalam. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu penelitian yang berjudul “Pembukaan Negara Jepang oleh Bangsa Barat Pada Masa Keshogunan Tokugawa Tahun 1791-1867”.

1.2 Penegasan Pengertian Judul

Penegasan pengertian judul dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerancuan terhadap kata-kata atau istilah yang terdapat dalam judul “Pembukaan Negara Jepang oleh Bangsa Barat Pada Masa Keshogunan Tokugawa Tahun 1791-1867”. Penulis perlu memberikan batasan-batasan yang relevan, agar memperoleh gambaran yang jelas dan penafsiran yang sama dengan pembaca. Penulis membagi definisi judul menjadi beberapa definisi kata yakni Pembukaan, Jepang, Bangsa Barat, dan Keshogunan Tokugawa.

Pembukaan diartikan sebagai proses, perbuatan atau cara membuka. Bisa juga diartikan sebagai permulaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1996: 151). Maksud dari pembukaan dalam penelitian ini adalah proses awal untuk membuka negara Jepang yang dilakukan oleh bangsa Barat. Sebelum bangsa Barat datang Jepang menjadi negara yang tertutup bagi negara-negara lain. Tujuan bangsa Barat membuka negara Jepang tidak lain untuk mengadakan hubungan diplomasi dan perdagangan yang dapat menunjang kepentingan ekonomi negaranya.

Jepang (bahasa Jepang: *Nippon* atau *Nihon*; nama resmi: *Nipponkoku* atau *Nihonkoku*; nama harfiah: “Negara Jepang”) adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Jepang dikelilingi oleh laut Jepang dan laut China di sebelah Barat, laut Okhots di sebelah utara serta Samudera Pasifik di sebelah timur dan selatan. Selain itu Jepang bertetangga dengan beberapa negara seperti China dan Korea di sebelah

barat, Taiwan dan Philipina di sebelah selatan, benua Amerika di sebelah timur dan Uni Soviet di sebelah selatan (Haryanti, 2013: 1).

Bangsa Barat merupakan sekelompok besar rakyat yang mendiami sebagian benua Eropa dan benua Amerika dan yang termasuk dalam suatu kebudayaan tertentu (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1996: 89). Bangsa Barat yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi negara Amerika Serikat, Rusia, Belanda, Inggris dan Perancis. Amerika Serikat merupakan negara pertama yang berhasil membuka Jepang dengan tujuan hubungan diplomatis dan perdagangan melalui suatu perjanjian. Perjanjian tersebut nantinya diikuti oleh bangsa Rusia, Belanda, Inggris, dan Perancis. Setelah pembukaan negara Jepang dilakukan, dari kelima negara tersebut hanya ada beberapa yang banyak terlibat dalam kekacauan yang terjadi di Jepang yakni Belanda, Inggris, dan Perancis. Amerika Serikat selaku negara pertama yang membuka negara Jepang tengah disibukkan dengan permasalahan yang terjadi di negaranya yakni terjadinya perang saudara pada tahun 1861-1865. Sementara Rusia tidak terlibat sama sekali dengan kekacauan yang terjadi di Jepang karena mempunyai ambisi lain di daerah utara. Alasan lainnya ialah karena perdagangan yang dilakukan Rusia dengan Jepang kurang menarik (Beasley dalam Marius, 2008: 285).

Keshogunan Tokugawa atau disebut juga dengan Keshogunan Edo (Edo bakufu) adalah pemerintahan diktator militer feodalisme di Jepang yang didirikan oleh Tokugawa Ieyasu. Secara turun temurun pemerintahan Keshogunan Tokugawa dipimpin oleh keturunan keluarga Tokugawa. Dalam periode historis Jepang, masa pemerintahan Keshogunan Tokugawa disebut zaman Edo, karena pusat pemerintahannya terletak di Edo yang sekarang disebut dengan Tokyo (http://id.wikipedia.org/wiki/Keshogunan_Tokugawa (09 Mei 2015)). Periode Keshogunan Tokugawa berlangsung selama lebih dari dua abad (1603-1868). Selama Keshogunan Tokugawa menguasai Jepang ada 15 Shogun yang memimpin (Lampiran D; hal 142).

Berdasarkan pengertian di atas, maksud yang terkandung dalam judul “Pembukaan Negara Jepang oleh Bangsa Barat Pada Masa Keshogunan Tokugawa

Tahun 1853-1867” adalah proses atau tindakan awal yang dilakukan bangsa Barat untuk membuka negara Jepang dengan tujuan terbentuknya hubungan diplomatis dan perdagangan. Pembukaan negara Jepang yang dilakukan bangsa Barat mengakibatkan berakhirnya Keshogunan Tokugawa yang ditandai dengan peristiwa pengembalian kekuasaan dari Shogun ke Kaisar.

1.3 Ruang Lingkup Permasalahan

Penelitian membutuhkan adanya penentuan ruang lingkup permasalahan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penyimpangan dari fokus permasalahan yang akan dibahas. Penelitian sejarah memuat adanya batasan untuk mengkaji suatu permasalahan, yaitu batasan dari segi temporal (waktu), segi spasial (tempat), dan segi tematikal (materi).

Segi temporal (waktu), penelitian ini antara tahun 1791-1867. Tahun 1791 dijadikan sebagai batas awal penelitian karena tahun 1791 merupakan tahun kedatangan utusan Rusia yakni Adam Laxman yang berusaha membuka Jepang melalui adanya hubungan dagang dan diplomatis. Tahun 1867 dijadikan sebagai batas akhir penelitian, karena pada tahun tersebut menjadi akhir dari pemerintahan Keshogunan Tokugawa. Berakhirnya pemerintahan Keshogunan Tokugawa ditandai dengan peristiwa pengembalian kekuasaan dari Tokugawa Yoshinobu secara damai ke Kaisar Mutsuhito. Segi spasial (tempat), penelitian ini difokuskan pada wilayah Jepang, karena proses pembukaan dan pengembalian kekuasaan dari tangan Shogun ke Kaisar berada di Jepang. Segi tematikal (materi), fokus materi dalam penelitian ini adalah (1) latar belakang masuknya bangsa Barat ke Jepang pada masa Keshogunan Tokugawa; (2) pembukaan negara Jepang oleh bangsa Barat pada masa Keshogunan Tokugawa tahun 1791-1858; dan (3) dampak pembukaan negara Jepang oleh bangsa Barat terhadap Keshogunan Tokugawa tahun 1853-1867. Adanya pembatasan ruang lingkup permasalahan ini, nantinya akan mempermudah pembaca dalam memahami isi dan tujuan dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memahaminya.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana latar belakang masuknya bangsa Barat ke Jepang pada masa Keshogunan Tokugawa?
2. Bagaimana pembukaan negara Jepang oleh bangsa Barat pada masa Keshogunan Tokugawa tahun 1791-1858?
3. Bagaimana dampak pembukaan negara Jepang oleh bangsa Barat terhadap Keshogunan Tokugawa tahun 1853-1867?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut.

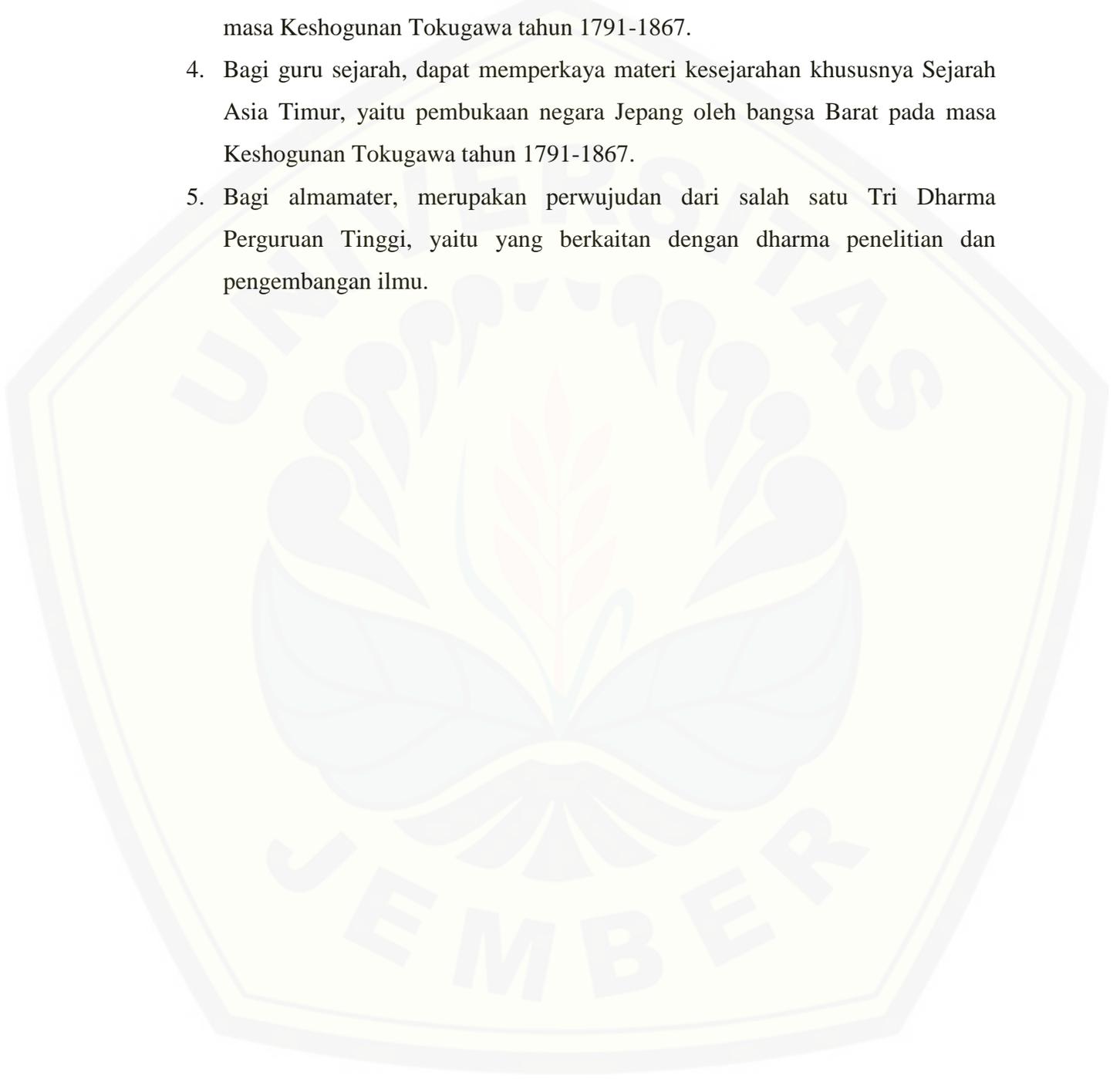
1. Untuk menganalisis latar belakang masuknya bangsa Barat ke Jepang pada masa Keshogunan Tokugawa.
2. Untuk menganalisis pembukaan negara Jepang oleh bangsa Barat pada masa Keshogunan Tokugawa tahun 1791-1858.
3. Untuk menganalisis dampak pembukaan negara Jepang oleh bangsa Barat terhadap Keshogunan Tokugawa tahun 1853-1867.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan serta tujuan penelitian sebagaimana yang telah penulis kemukakan di atas, maka pelaksanaan penelitian ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat diantaranya.

1. Bagi ilmu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu sejarah khususnya sejarah Jepang.
2. Bagi mahasiswa program studi pendidikan sejarah, merupakan upaya peningkatan kualitas sebagai calon guru sejarah yang professional. Dalam artian memiliki kemampuan ilmiah yang sesuai dengan bidang studinya.

3. Bagi pembaca, dapat menambah wawasan tentang sejarah dunia khususnya sejarah Asia Timur yakni pembukaan negara Jepang oleh bangsa Barat pada masa Keshogunan Tokugawa tahun 1791-1867.
4. Bagi guru sejarah, dapat memperkaya materi kesejarahan khususnya Sejarah Asia Timur, yaitu pembukaan negara Jepang oleh bangsa Barat pada masa Keshogunan Tokugawa tahun 1791-1867.
5. Bagi almamater, merupakan perwujudan dari salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu yang berkaitan dengan dharma penelitian dan pengembangan ilmu.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka, berisi uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian sejarah perlu mengemukakan sejarah penulisan (historiografi) dalam bidang yang akan diteliti dan seluruh hasil penelitian yang akan di-*review* (Abdurrahman 2007: 61). Penelitian terdahulu yang penulis gunakan berupa karya yang diterbitkan seperti buku, jurnal dan lain sebagainya, serta karya yang tidak diterbitkan seperti skripsi atau laporan hasil penelitian. Tinjauan pustaka juga menguraikan tentang pendekatan dan teori-teori yang digunakan peneliti dari pendapat beberapa ahli. Penulis telah mendapatkan beberapa hasil-hasil penelitian terdahulu yang akan di-*review* terkait dengan judul penulisan mengenai “Pembukaan Negara Jepang oleh Bangsa Barat Pada Masa Keshogunan Tokugawa Tahun 1791-1867”.

Penjelasan mengenai proses kedatangan bangsa Barat ke Jepang diuraikan dalam buku karangan Sakamoto (1982: 45-47). Perkembangan negara-negara Eropa akibat revolusi industri menyebabkan bangsa Barat mulai melihat ke negara-negara lain untuk dijadikan tempat pemasaran hasil industrinya atau tempat untuk mencari bahan-bahan baku yang dibutuhkan. Bangsa pertama yang berusaha membuka pintu Jepang adalah Rusia pada tahun 1791 oleh Adam Laxmann, namun usaha ini tidak berhasil. Pada tahun-tahun berikutnya Inggris dan Perancis mencoba peruntungan untuk membuka Jepang namun, usaha ini juga tidak membuahkan hasil. Pada tahun 1853 Komodor Perry ditugaskan oleh presiden Amerika Serikat untuk mengadakan hubungan dagang dengan Jepang. Usaha Amerika Serikat cukup membuat bakufu mempertimbangkan apa yang diinginkan olehnya. Hal ini dikarenakan sebelum datangnya Commodor Perry, pada tahun 1844 Raja Belanda telah mengirim surat kepada Keshogunan Tokugawa untuk tidak mempertahankan keputusannya mengenai kebijakan politik *sakoku*, sebab akibat yang dimunculkan akan merugikan bangsa Jepang sendiri. Hasil dari pertimbangan tersebut adalah disetujuinya perjanjian dengan Amerika pada tahun 1854.

Penjelasan serupa juga ditemukan dalam buku karangan Mattulada (1979: 114). Mattulada menjelaskan bahwa perdebatan tentang peningkatan daya tahan terhadap agresi bangsa Barat menjadi lebih hangat ketika tahun 1853 Commodore Matthew Perry dengan skuadron “Kapal Hitam” nya berlabuh di teluk Edo. Perry diutus oleh Presiden Amerika Serikat Serikat untuk membuka hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Jepang. Pada tahun 1854 ditandatangani perjanjian Kanagawa antara Amerika Serikat dengan Jepang. Kedua negara melakukan pertukaran konsul, dan tahun 1856 Townsend Harris sebagai konsul Amerika Serikat tiba di Jepang. Townsend Harris kemudian menyelenggarakan perjanjian persahabatan dan perdagangan dengan Jepang di tahun 1858 yang pada perkembangan selanjutnya berdampak terhadap eksistensi Keshogunan Tokugawa.

Tsunenari (2009: 131-133) menjelaskan tentang tujuan negara Amerika Serikat membuka Jepang. Tujuan negara Amerika Serikat selain untuk mengadakan hubungan dagang, juga ingin menjadikan Jepang sebagai tempat peristirahatan kapal-kapal mereka saat melakukan perburuan ikan paus. Pada saat itu, samudra Pasifik sedang diramaikan oleh kapal-kapal penangkap ikan paus milik Amerika Serikat. Sebelum Amerika Serikat banyak negara-negara lain seperti Rusia, Inggris dan Perancis yang berusaha mengadakan hubungan dengan Jepang akan tetapi, Commodore Perry yang berhasil melakukannya. Salah satu alasan kenapa Jepang memilih membuka negaranya terhadap Amerika Serikat, dikarenakan Nakahama Manjiro yang merupakan seorang nelayan Jepang pernah diselamatkan oleh kapal penangkap ikan paus milik bangsa Amerika Serikat. Kesan baik inilah yang menjadi pilihan bakufu untuk mengadakan hubungan dengan Amerika Serikat terlebih dahulu dibanding dengan negara-negara lainnya.

Lan (1962: 113-137) menjelaskan tentang pembukaan negara Jepang yang dilakukan oleh bangsa Barat khususnya Amerika Serikat pada masa Keshogunan Tokugawa. Pembukaan negara Jepang yang dilakukan oleh bangsa Barat ditandai dengan peristiwa perjanjian Kanagawa pada bulan Maret 1854 yang salah satu isinya menginginkan pembukaan pelabuhan Shimoda dan Hokodate. Keshogunan

Tokugawa setelah berhasil mengadakan perjanjian dengan Amerika kemudian membuat perjanjian yang sama dengan Inggris dalam bulan Oktober 1854, dengan Rusia dalam bulan Februari 1855 dan Belanda dalam bulan November 1855. Setelah berhasil membuka dua pelabuhan di Jepang, Townsend Harris yang merupakan utusan Amerika Serikat membujuk bakufu untuk melakukan perjanjian persahabatan dan perdagangan yang terjadi pada tahun 1858. Salah satu bunyi dari perjanjian itu adalah penetapan hak ekstrateritorial bagi bangsa Amerika yang ada di Jepang. Adanya perjanjian tersebut semakin mempermudah masuknya bangsa Barat ke Jepang. Dengan demikian Jepang telah membuka pintunya terhadap bangsa lain khususnya bangsa Barat.

Suradjaja (1984: 19-20) menjelaskan mengenai kekacauan yang terjadi di Jepang setelah pembukaan negara dilakukan oleh bangsa Barat. Setelah perjanjian Kanagawa serta perjanjian Persahabatan dan Perdagangan berhasil dilakukan Bangsa Barat khususnya Amerika Serikat dengan Keshogunan Tokugawa, muncul kelompok nasionalisme yang menentang kepemimpinan Tokugawa dan kelompok konservatif yang anti asing. Kedua kelompok tersebut kemudian menyatukan diri dan memiliki semboyan *Sonno Joi* "Hormat kepada Kaisar dan usir orang asing". Gerakan tersebut diikuti daimyo Tozama khususnya dari Satsuma, Choshu, Tosa dan Hizen. Selain itu, para samurai yang ingin menggulingkan Tokugawa dan anti asing, berusaha melakukan kekacauan dengan cara menyerang warga asing yang ada di Jepang salah satunya pedagang berkebangsaan Inggris yakni Richardson pada tahun 1862. Tidak cukup dengan penyerangan terhadap warga asing, Choshu pada tahun 1863 mengambil tindakan sendiri dengan menembaki kapal-kapal milik Amerika Serikat, Perancis dan Belanda yang melintasi selat Shimonoseki. Sebagai balasan dari tindakan Choshu, benteng-benteng di Shimonoseki digempur oleh gabungan kekuatan kapal-kapal Perancis, Belanda, Inggris dan Amerika Serikat.

Dasuki (1963b: 11-12) menjelaskan mengenai dampak dari pembukaan negara Jepang oleh bangsa Barat terhadap Keshogunan Tokugawa. Kekacauan yang terjadi di Jepang menyebabkan kedudukan Shogun dimata bangsa Barat mulai menurun.

Menurut Duta Inggris yakni Harry Parkes, kesulitan dalam hubungan diplomatik dan perdagangan antara Jepang dengan bangsa-bangsa Barat tidak akan terselesaikan, jika tetap terjadi dualisme pemerintahan. Dualisme pemerintahan yang dimaksud adalah pemerintahan militer dibawah kepemimpinan Shogun di Edo dan pemerintahan sipil dibawah kepemimpinan Kaisar yang berada di Kyoto. Menyadari hal tersebut Harry Parkes kemudian secara diam-diam berjanji kepada daimyo Choshu dan Satsuma untuk bersikap netral jika nantinya mereka ingin menggulingkan Keshogunan Tokugawa dan mengembalikan kekuasaan yang sebenarnya ke tangan Kaisar. Harry Parkes mengambil tindakan ini karena dirinya ingin perdagangan yang terjadi antara Jepang dan Inggris tetap berjalan dengan baik dan tidak terpengaruh oleh konflik internal yang terjadi. Melihat situasi dan kondisi yang begitu sulit, pada tahun 1867 Tokugawa mengakhiri masa pemerintahannya. Akhir Keshogunan Tokugawa ditandai dengan peristiwa pengembalian kekuasaan dari Tokugawa Yoshinobu sebagai Shogun terakhir kepada Kaisar Mutsuhito. Pengembalian kekuasaan dari Shogun ke Kaisar disebut juga dengan “Restorasi Meiji”.

Hayes (1994: 16-17) juga menjelaskan dampak pembukaan negara Jepang oleh bangsa Barat terhadap Keshogunan Tokugawa. Dampak pertama yang dirasakan Jepang setelah kehadiran bangsa Barat adalah masalah perekonomian. Gangguan dari perdagangan yang dilakukan bangsa Barat menyebabkan kondisi keuangan Jepang memburuk. Kehadiran bangsa Barat juga menjadi sumber ketegangan dalam masyarakat Jepang dikarenakan perbedaan budaya dan adat istiadat. Kesombongan dan perilaku aneh bangsa Barat membuat masyarakat Jepang berusaha untuk menjaga identitas nasional mereka. Permasalahan ini menjadikan kondisi Keshogunan Tokugawa dianggap lemah dimata masyarakat Jepang.

Kehadiran bangsa Barat di Jepang tidak semuanya menimbulkan kesan yang negatif. Ada juga orang Jepang yang progresif sangat terkesan dengan keunggulan militer Barat, seperti yang dilakukan bakufu untuk memodernisasi militer pasukannya pada tahun 1866. Akan tetapi, masih saja ada yang menggunakan tombak atau pedang. Tentara Shogun juga sulit diatur dan menderita masalah moral. Sedangkan,

tentara pendukung Kaisar merupakan para pemuda yang berbakat yang tertarik untuk mempelajari militer dari bangsa Barat. Oleh sebab itu, tentara Shogun menjadi lemah hingga akhirnya mengalami kekalahan.

Penelitian yang sejenis dilakukan oleh Saeful Bahri (1998) yang berjudul “Pembangunan Jepang Sesudah Restorasi Meiji dalam Bidang Politik, Ekonomi, Militer dan Pendidikan”. Penelitian ini menjelaskan tentang ketidakpuasan masyarakat Jepang terhadap Keshogunan Tokugawa yang diktator dan pembukaan negara yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dua alasan itulah yang menjadi latar belakang terjadinya Restorasi Meiji. Penelitian ini juga menjelaskan tentang pembaharuan yang dilakukan oleh Kaisar Meiji dalam bidang politik, ekonomi, militer dan pendidikan.

Penelitian yang sejenis juga dilakukan oleh Niin Sularsih (2006) yang berjudul “Perubahan Jepang dalam Restorasi Meiji Tahun 1868-1890”. Tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Saeful Bahri, penelitian ini menjelaskan sebab terjadinya restorasi meiji karena adanya faktor interen dan eksteren. Faktor interen yang dimaksud adalah kondisi dalam pemerintahan Tokugawa yang sudah rapuh sedangkan faktor eksterennya adalah desakan Amerika Serikat untuk membuka Jepang. Kedua faktor tersebut kemudian menimbulkan peristiwa pemulihan kekuasaan dari Shogun ke Kaisar. Penelitian ini juga menjelaskan tentang modernisasi yang dilakukan oleh Kaisar Mutsuhito di Jepang.

Kesimpulan dari tinjauan beberapa literatur di atas berupa gambaran secara umum tentang proses masuknya bangsa Barat ke Jepang. Kajian mengenai pembukaan negara Jepang oleh bangsa Barat dan dampak yang ditimbulkan terhadap Keshogunan Tokugawa hingga terjadi pengembalian kekuasaan dari Tokugawa Yoshinobu ke Kaisar Mutsuhito belum banyak dikaji secara mendalam. Sebagian besar penelitian yang telah ada hanya membahas tentang proses pembukaan Jepang oleh Amerika Serikat dan akhir dari pemerintahan Keshogunan Tokugawa akibat permasalahan yang terjadi di dalam. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji pembukaan negara Jepang oleh bangsa Barat dan dampak yang ditimbulkan terhadap

Keshogunan Tokugawa hingga terjadi pengembalian kekuasaan dari tangan Tokugawa Yoshinobu ke Kaisar Mutsuhito tahun 1791-1867. Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian yang mengembangkan penelitian-penelitian terdahulu. Dikatakan demikian karena, penelitian sebelumnya belum banyak yang mengkaji secara mendalam mengenai pembukaan negara Jepang oleh bangsa Barat dan dampaknya terhadap Keshogunan Tokugawa.

Gambaran suatu peristiwa sangat ditentukan oleh pendekatan yang digunakan yakni dari segi mana memandangnya, dimensi apa yang diperhatikan sampai dengan unsur-unsur apa yang perlu diungkapkan (Abdurrahman, 2007: 23). Tinjauan dari beberapa literatur diatas memberikan suatu gambaran tentang pemerintahan Jepang pada masa Keshogunan Tokugawa yang mendapat desakan dari bangsa Barat untuk mengakhiri politik isolasinya. Pembahasan mengenai pemerintahan erat kaitannya dengan bidang politik, sehingga pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi politik milik Duverger.

Sosiologi politik berasal dari dua kata yang berbeda yakni sosiologi dan politik. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, sedangkan politik merupakan ilmu yang menjelaskan tentang kekuasaan. Menurut konsep yang lebih moderen sosiologi politik merupakan ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, dan komando dalam semua lapisan masyarakat. Konsep ini berasal dari apa yang Leon Daguitt namakan perbedaan dari yang memerintah dengan yang diperintah. Obyek dari sosiologi politik adalah menganalisis kekuasaan di dalam masyarakat yang bersifat universal (Duverger, 2014: 18-23). Dengan demikian, maksud dari pendekatan sosiologi politik ialah ilmu tentang kekuasaan dalam masyarakat universal yang menjelaskan tentang hubungan yang terjadi antara penguasa dengan pihak yang dikuasai.

Penggunaan pendekatan sosiologi politik dalam penelitian ini dirasa tepat sebab dapat mengupas permasalahan antara pemerintahan Jepang khususnya Keshogunan Tokugawa dengan masyarakat Jepang khususnya para daimyo selaku pengikutnya. Selain itu, penggunaan pendekatan sosiologi politik dapat digunakan untuk mengupas

permasalahan yang terjadi antara Keshogunan Tokugawa dan kelompok-kelompok yang anti asing dalam menghadapi pembukaan negara Jepang yang dilakukan oleh bangsa Barat.

Diperlukan adanya seperangkat konsep dan teori, untuk dapat mengoperasionalkan pendekatan. Menurut Duverger dasar dari sosiologi politik adalah konflik antar individu atau kelompok untuk memperoleh kekuasaan, oleh karena itu teori yang digunakan peneliti agar permasalahan yang dikaji lebih jelas dalam penelitian ini adalah teori konflik (Duverger, 2014: 29). Konflik adalah fenomena sosial dan sesuatu yang nyata bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya, artinya masyarakat menyadari dan merasakan bahwa konflik itu muncul dalam dunia sehari-hari. Perspektif konflik lebih menekankan sifat pluralistik dari masyarakat dan ketidakseimbangan distribusi kekuasaan yang terjadi di antara berbagai kelompoknya (Puspitawati, 2009: 1).

Penulis menggunakan teori konflik George Simmel dalam penelitian ini. Teori konflik George Simmel menjelaskan bahwa interaksi sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat akan mengalami konflik. Menurut Simmel, konflik merupakan suatu hal yang tidak dapat dihilangkan di dalam komponen kehidupan sosial. Asumsi George Simmel berangkat dari interaksi yang terjadi baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok atau bahkan kelompok dengan kelompok akan menimbulkan suatu pertentangan. Pertentangan yang terjadi akhirnya menimbulkan suatu konflik (Puspitawati, 2009: 9-10).

Bagi Simmel ketika individu menjalani proses sosialisasi mereka pada dasarnya pasti mengalami konflik. Ketika terjadinya sosialisasi terdapat dua hal yang mungkin terjadi yaitu, sosialisasi yang menciptakan asosiasi (individu berkumpul sebagai kesatuan kelompok) dan disosiasi (individu saling bermusuhan dalam satu kelompok). Unsur-unsur yang sesungguhnya dari disosiasi adalah sebab-sebab munculnya konflik (<https://wirasudewa.wordpress.com/2013/01/24/teori-konflik-dalam-sosiologi/> (26 Mei 2015)). Teori konflik George Simmel dirasa cocok oleh

peneliti dalam mengkaji lebih dalam mengenai dampak pembukaan negara Jepang oleh bangsa Barat terhadap Keshogunan Tokugawa.

Konflik yang terjadi dimulai dengan adanya interaksi antara bangsa Barat dengan masyarakat Jepang setelah adanya perjanjian Persahabatan dan Perdagangan pada tahun 1858. Dari interaksi yang terjadi antara bangsa Barat dengan masyarakat Jepang muncul dua karakteristik yang berbeda. Bangsa Barat pada saat itu dikenal dengan bangsa yang sombong dan kurang menghargai adat istiadat maupun etika yang berlaku di Jepang. Jepang sendiri menjunjung tinggi adat istiadat maupun etika yang dianutnya. Karakteristik yang berbeda antara Jepang dan bangsa Barat memunculkan adanya suatu pertentangan. Pertentangan inilah yang nantinya menimbulkan suatu konflik. Konflik yang terjadi seperti ketika para *shishi* melakukan serangan terhadap warga asing yang tinggal di Yokohama khususnya saat Richardson dibunuh oleh daimyo dari Satsuma, ketika terjadi pengeboman ibukota Kagoshima yang dilakukan oleh pasukan Inggris terhadap daimyo Satsuma, dan ketika terjadi pengeboman di selat Shimonoseki yang dilakukan oleh pasukan gabungan dari Inggris, Belanda, Perancis, dan Amerika Serikat terhadap daimyo dari Choshu.

Konflik lainnya juga muncul ketika terjadi perbedaan tujuan antara masyarakat Jepang yang ingin menjadikan Kaisar sebagai penguasa tunggal dengan Shogun yang berusaha mempertahankan kekuasaannya. Perbedaan tujuan inilah yang memunculkan konflik antara kelompok pendukung Kaisar dengan kelompok pendukung Tokugawa. Konflik yang terjadi seperti, saat gerakan nasionalisme dan gerakan anti asing (Satsuma, Choshu, Tosa, dan Hizen) berusaha menggulingkan Keshogunan Tokugawa dan mengembalikan kekuasaan yang sebenarnya ke Kaisar.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara seksama dan teliti dalam menemukan fakta-fakta baru, yang digunakan untuk menghasilkan produk baru, memecahkan suatu masalah, dan mendukung atau menolak suatu teori (Hilbish dalam Abdurrahman, 2007: 53). Setiap penelitian pasti menggunakan suatu metode, dan metode yang digunakan harus sesuai dengan bidang ilmunya. Metode merupakan suatu cara, jalan, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis (Abdurrahman, 2007: 53). Berdasarkan judul “Pembukaan Negara Jepang oleh Bangsa Barat Pada Masa Keshogunan Tokugawa Tahun 1791-1867” penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah atau disebut juga metode sejarah.

Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1986: 32). Metode penelitian sejarah dapat juga diartikan sebagai seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis (Hilbish dalam Abdurrahman, 2007: 53). Berdasarkan pengertian tersebut metode sejarah memiliki 4 tahapan yang harus dilakukan yakni, heuristik, kritik atau verifikasi, *aufassung* atau interpretasi, dan *darstellung* atau historiografi (Abdurrahman, 2007: 54).

Langkah awal dalam prosedur kerja sejarawan adalah pengumpulan data sebagai sumber penelitian. Tahap ini disebut juga dengan heuristik. Heuristik adalah tindakan sejarawan untuk mencari dan mengumpulkan sumber sejarah yang terkait dengan masalah yang diteliti (Notosusanto, 1984: 11). Pencarian sumber sejarah dapat dilakukan dengan mengunjungi situs sejarah, mewawancarai tokoh yang menjadi saksi peristiwa sejarah atau dengan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Penelitian ini bersifat studi literatur dan sumber yang digunakan merupakan sumber tertulis. Oleh karena itu, langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah

menemukan sumber-sumber yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti menemukan dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah seperti buku, jurnal, skripsi dan lain sebagainya di perpustakaan-perpustakaan: (1) Perpustakaan Pusat Universitas Jember; (2) Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Jember; (3) Perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Jember; (4) Perpustakaan Daerah Kabupaten Jember; (5) Toko-toko Buku. Pada tahap pengumpulan sumber ini peneliti menemukan sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) *A Diplomat In Japan*, buku karangan Ernest Satow; (2) *Jepang Di Antara Feodalisme dan Modernisme*, buku karangan Fukuzawa Yukichi.

Sumber sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) *The Edo Inheritance*, buku karangan Tokugawa Tsunenari diterjemahkan oleh Tokugawa Iehiro (2) *The Cambridge History of Japan Volume 5 The Nineteenth Century*, buku karangan Marius B. Jansen; (3) *Djepang Sepanjang Masa*, buku karangan Nio Joe Lan; (4) *The Far East*, buku karangan Chester A. Bain; (5) *Sejarah Institusi Politik Jepang*, buku karangan Ryosuke Ishii; (6) *Religi Tokugawa*, buku karangan Robert N. Bellah; (7) *Shinsengumi “Pasukan Samurai Terakhir Shogun”*, buku karangan Romulus Hillsborough; (8) *A History of Japanese Political Thought 1600-1901*, buku karangan Watanabe Hiroshi diterjemahkan oleh David Noble; (9) *Pengalaman Jepang*, buku karangan W.G. Beasley; (10) *An Introduction to Japan*, buku karangan Herschel Webb; (11) *Introduction to Japanese Politics*, buku karangan Lous D. Hayes; (12) *Langkah-Langkah Awal Modernisasi Jepang*, buku karangan Yeti Nurhayati; (13) *Jepang Dulu dan Sekarang*, buku karangan Taro Sakamoto; (14) *Pedang dan Sempoa “Suatu Analisa Kultural Perasaan Kepribadian Orang Jepang”*, buku karangan Mattulada; (15) *Sedjarah Djepang Djilid I dan II*, buku karangan Dasuki; (16) *Studi Wilayah Pada Umumnya Asia Timur Pada Khususnya*, buku karangan Lie Tek Tjeng; (17) *Belajar Dari Jepang “Manusia dan Masyarakat Jepang Dalam Perjuangan Hidup”*, buku karangan Sayidiman Suryohadiprodo; (18) *Sejarah Asia Timur 1*, buku karangan Leo Agung. S; (19)

Pluralisme Politik dan Kemajuan Ekonomi Jepang, buku karangan J.A.A Stockwin diterjemahkan oleh Bakdi Sumanto; (20) *Pergerakan Demokrasi Jepang*, buku karangan I Ketut Suradjaja; (21) *All About Japan*, buku karangan Pitri Haryanti; (22) *Djepang Dewasa Ini*, buku yang diterbitkan oleh Biro Urusan Penerangan dan Kebudayaan Departemen Luar Negeri Djepang; (23) *Jepang Sebuah Pedoman Saku*, buku yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Jepang; (24) *Samurai “Filosofi Hidup dan Semangat Ksatria”*, buku karangan Darsono; (25) *Indonesia Ditengah-tengah Dunia dari Abad ke Abad*, buku karangan Soeroto; (26) *Dinamika Kepemimpinan Jepang Tahun 1568-1945*, buku karangan Sri Handayani dan Gema Budiarto; (27) *Mengenal Jepang*, buku karangan Ajib Rosidi; (28) *Pengaruh Politik Isolasi (Sakoku) Jepang terhadap Nasionalisme Bangsa Jepang : Studi tentang Politik Jepang dari Zaman Edo (Feodal) sampai Perang Dunia II*, jurnal karangan Yusy Widarahesty dan Rindu Ayu; (29) *Nasionalisme Jepang pada Era Tokugawa dan Meiji*, jurnal karangan YR. Subakti; (30) *Keberhasilan Negara Jepang Membangun Ekonomi*, laporan penelitian karangan Gerhard Simandjuntak; (31) *Dari Renaisans Sampai Imperialisme Modern “Sejarah Peradaban Barat Abad Modern”* buku karangan M.H. Sundoro; (32) *Dewa Perang Jepang*, buku karangan Dozi Swandana.

Setelah pengumpulan sumber sejarah berhasil dilakukan, langkah berikutnya yang perlu dikerjakan adalah kritik sumber. Tujuan dilakukannya kritik sumber adalah untuk menyeleksi data menjadi fakta (Notosusanto, 1984: 11). Selain itu dengan melakukan kritik sumber dapat membantu peneliti dalam menemukan sumber yang benar-benar diperlukan dan asli. Dalam tahap ini kritik ada dua macam yakni kritik eksteren dan kritik interen. Kritik eksteren adalah pemeriksaan sumber sejarah terhadap bahan materi sedangkan kritik interen pemeriksaan sumber sejarah terhadap substansi (isi) sumber (Sjamsuddin, 1996: 103). Peneliti dalam melakukan kritik eksteren dilakukan dengan melihat apakah sumber tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan, apakah sumber itu asli atau palsu, apakah masih utuh atau sudah diubah. Hasil dari kegiatan kritik eksteren ini adalah untuk mendapatkan sumber yang otentik (dapat dibuktikan keasliannya).

Tahap berikutnya setelah melakukan kritik eksteren, peneliti melakukan kritik interen. Kritik internal menekankan pada aspek “dalam” yaitu isi dari sumber: kesaksian (testimony) (Sjamsuddin, 1996: 111). Dalam melakukan kritik interen, peneliti menyeleksi dan membandingkan sumber-sumber yang didapat sehingga peneliti dapat menemukan sumber yang benar-benar akurat dan relevan. Setelah menemukan sumber yang benar-benar akurat, peneliti menemukan fakta-fakta sejarah yang dibutuhkan dan sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Fakta-fakta yang telah peneliti temukan dalam kegiatan verifikasi ini, akan digunakan dalam pembahasan tentang latar belakang masuknya bangsa Barat ke Jepang pada masa Keshogunan Tokugawa, pembukaan negara Jepang oleh bangsa Barat pada masa Keshogunan Tokugawa tahun 1791-1858, dan dampak pembukaan negara Jepang oleh bangsa Barat terhadap Keshogunan Tokugawa tahun 1853-1867.

Berdasarkan hasil kritik interen dan eksteren yang sudah dilakukan, terdapat sumber primer dan sumber sekunder yang menurut peneliti lebih valid untuk digunakan dalam penelitian ini. Sumber primer yang dianggap valid dan relevan dalam penelitian ini diantaranya: (1) *A Diplomat In Japan*, buku karangan Ernest Satow; (2) *Jepang Di Antara Feodalisme dan Modernisme*, buku karangan Fukuzawa Yukichi.

Sumber sekunder yang dianggap valid dan relevan dalam penelitian ini diantaranya: (1) *The Edo Inheritance*, buku karangan Tokugawa Tsunenari diterjemahkan oleh Tokugawa Iehiro (2) *The Cambridge History of Japan Volume 5 The Nineteenth Century*, buku karangan Marius B. Jansen; (3) *Djepang Sepandjang Masa*, buku karangan Nio Joe Lan; (4) *The Far East*, buku karangan Chester A. Bain; (5) *Shinsengumi “Pasukan Samurai Terakhir Shogun”*, buku karangan Romulus Hillsborough; (6) *A History of Japanese Political Thought 1600-1901*, buku karangan Watanabe Hiroshi diterjemahkan oleh David Noble; (7) *Pengalaman Jepang*, buku karangan W.G. Beasley; (8) *An Introduction to Japan*, buku karangan Herschel Webb; (9) *Introduction to Japanese Politics*, buku karangan Lous D. Hayes; (10) *Langkah-Langkah Awal Modernisasi Jepang*, buku karangan Yeti Nurhayati; (11)

Jepang Dulu dan Sekarang, buku karangan Taro Sakamoto; (12) *Pedang dan Sempoa “Suatu Analisa Kultural Perasaan Kepribadian Orang Jepang”*, buku karangan Mattulada; (13) *Sedjarah Djepang Djilid I dan II*, buku karangan Dasuki; (14) *Pergerakan Demokrasi Jepang*, buku karangan I Ketut Suradjaja; (15) *Belajar Dari Jepang “Manusia dan Masyarakat Jepang Dalam Perjuangan Hidup”*, buku karangan Sayidiman Suryohadiprojo; (16) *Sejarah Asia Timur I*, buku karangan Leo Agung. S; (17) *Dinamika Kepemimpinan Jepang Tahun 1568-1945*, buku karangan Sri Handayani dan Gema Budiarto; (18) *Nasionalisme Jepang pada Era Tokugawa dan Meiji*, jurnal karangan YR. Subakti; (19) *Dari Renaisans Sampai Imperialisme Modern “Sejarah Peradaban Barat Abad Modern”* buku karangan M.H. Sundoro (20) (32) *Dewa Perang Jepang*, buku karangan Dozi Swandana.

Setelah kritik sumber berhasil dilakukan, langkah selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi sejarah sering disebut juga dengan analisis sejarah. Ada dua metode yang digunakan dalam interpretasi yakni analisis dan sintesis. Dua hal tersebut dipandang sebagai metode utama dalam interpretasi (Kuntowijoyo dalam Abdurrahman, 2007: 73). Interpretasi disebut juga sebagai proses menafsirkan fakta dan menghubungkan antara satu fakta dengan fakta yang lain. Dalam tahap ini, setelah peneliti berhasil melakukan kritik dan menemukan fakta-fakta yang ada, peneliti berusaha melakukan penafsiran terhadap fakta-fakta yang ada dengan membandingkan antara fakta yang satu dengan fakta lainnya. Untuk menghindari suatu penafsiran yang berbeda-beda, maka penafsiran atas fakta-fakta yang ada harus dilandasi oleh sikap obyektif. Jika dalam hal tertentu bersikap subyektif, maka harus subyektif yang rasional. Fakta-fakta yang sudah ditafsirkan, kemudian dirangkai dan dihubungkan secara kronologis sehingga menjadi satu kesatuan yang sistematis dan logis.

Fakta-fakta tentang latar belakang masuknya bangsa Barat ke Jepang pada masa Keshogunan Tokugawa ditunjang oleh sumber-sumber seperti: (1) *Dari Renaisans Sampai Imperialisme Modern “Sejarah Peradaban Barat Abad Modern”* buku

karangan M.H. Sundoro; (2) *Belajar Dari Jepang “Manusia dan Masyarakat Jepang Dalam Perjuangan Hidup”*, buku karangan Sayidiman Suryohadiprodo.

Fakta tentang pembukaan negara Jepang oleh bangsa Barat pada masa Keshogunan Tokugawa tahun 1791-1858 ditunjang oleh sumber-sumber seperti: (1) *A Diplomat In Japan*, buku karangan Ernest Satow; (2) *The Cambridge History of Japan Volume 5 The Nineteenth Century*, buku karangan Marius B. Jansen; (3) *Sedjarah Djepang Djilid II*, karangan Dasuki; (4) *Djepang Sepanjang Masa*, karangan Nio Joe Lan; (5) *Dinamika Kepemimpinan Jepang Tahun 1568-1945*, buku karangan Sri Handayani dan Gema Budiarto; (6) *Pergerakan Demokrasi Jepang*, buku karangan I Ketut Suradjaja; (7) *The Far East*, buku karangan Chester A. Bain; (8) *Pengalaman Jepang*, buku karangan W.G. Beasley; (9) *A History of Japanese Political Thought 1600-1901*, buku karangan Watanabe Hiroshi diterjemahkan oleh David Noble; (10) *Jepang Dulu dan Sekarang*, buku karangan Taro Sakamoto; (11) *The Edo Inheritance*, buku karangan Tokugawa Tsunenari diterjemahkan oleh Tokugawa Iehiro; (12) *Dewa Perang Jepang*, buku karangan Dozi Swandana; (13) *Belajar Dari Jepang “Manusia dan Masyarakat Jepang Dalam Perjuangan Hidup”*, buku karangan Sayidiman Suryohadiprodo.

Fakta mengenai dampak pembukaan negara Jepang oleh bangsa Barat terhadap Keshogunan Tokugawa tahun 1853-1867 ditunjang oleh sumber-sumber seperti: (1) *A Diplomat In Japan*, buku karangan Ernest Satow; (2) *The Cambridge History of Japan Volume 5 The Nineteenth Century*, buku karangan Marius B. Jansen; (3) *Djepang Sepanjang Masa*, karangan Nio Joe Lan; (4) *Sedjarah Djepang Djilid II*, karangan Dasuki; (5) *Jepang Di Antara Feodalisme dan Modernisme*, buku karangan Fukuzawa Yukichi; (6) *Shinsengumi “Pasukan Samurai Terakhir Shogun”*, buku karangan Romulus Hillsborough; (7) *An Introduction to Japan*, buku karangan Herschel Webb; (8) *Introduction to Japanese Politics*, buku karangan Lous D. Hayes; (9) *Pengalaman Jepang*, buku karangan W.G. Beasley; (10) *Pergerakan Demokrasi Jepang*, buku karangan I Ketut Suradjaja; (11) *Langkah-Langkah Awal Modernisasi Jepang*, buku karangan Yeti Nurhayati; (12) *Belajar Dari Jepang “Manusia dan*

Masyarakat Jepang Dalam Perjuangan Hidup”, buku karangan Sayidiman Suryohadiprodo; (13) *Pedang dan Sempoa “Suatu Analisa Kultural Perasaan Kepribadian Orang Jepang”*, buku karangan Mattulada (14) *The Edo Inheritance*, buku karangan Tokugawa Tsunenari diterjemahkan oleh Tokugawa Iehiro; (15) *Nasionalisme Jepang pada Era Tokugawa dan Meiji*, jurnal karangan YR. Subakti.

Langkah terakhir dalam prosedur penelitian sejarah adalah historiografi. Historiografi adalah cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan (Abdurrahman, 2007: 76). Disinilah kreativitas dan kemahiran seorang peneliti dalam menuliskan kisah sejarah dibutuhkan. Sejarah memang bersifat ilmiah, akan tetapi sejarah merupakan suatu seni (Notosusanto, 1984; 42-43). Oleh karena itu, pada tahap ini peneliti menyajikan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk kisah sejarah yang mudah dimengerti dan dapat dibuktikan kebenarannya. Penyajian penelitian secara garis besar terdiri dari tiga bagian: (1) pengantar; (2) hasil penelitian; (3) kesimpulan (Abdurrahman, 2007: 78). Penyajian dari hasil penelitian ini adalah penyusunan kisah sejarah dalam bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi berdasarkan sistematika yang ada.

Bab 1 merupakan pendahuluan dari penelitian ini. Pada bab 1 terdapat, (1.1) latar belakang: menjelaskan tentang permasalahan yang melatarbelakangi dilakukannya suatu penelitian; (1.2) penegasan pengertian judul: menjelaskan tentang makna yang terkandung dalam judul “Pembukaan Negara Jepang oleh Bangsa Barat Pada Masa Keshogunan Tokugawa Tahun 1791-1867”; (1.3) ruang lingkup permasalahan: menjelaskan batasan dalam mengkaji suatu permasalahan baik dari segi spasial, temporal dan tematikal; (1.4) rumusan masalah: berisi permasalahan penelitian yang dilihat dari latar belakang; (1.5) tujuan: berisi tujuan penelitian yang hendak dicapai berdasarkan rumusan masalah yang ada; (1.6) manfaat: berisi manfaat dari penelitian yang dilakukan.

Bab 2 tinjauan pustaka menjelaskan tentang hasil review dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu yang digunakan bisa berupa karya yang diterbitkan dan karya yang tidak diterbitkan. Berdasarkan permasalahan

yang akan dikaji peneliti menggunakan pendekatan sosiologi politik. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik George Simmel. Bab berikutnya adalah metode penelitian. Pada bab 3 dijelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Langkah-langkah dalam metode sejarah meliputi, heuristik, kritik (verifikasi), interpretasi dan historiografi atau penulisan sejarah.

Deskripsi hasil penelitian diuraikan dalam bab 4, bab 5, dan bab 6. Pada Bab 4, berisi pembahasan tentang latar belakang masuknya bangsa Barat ke Jepang pada masa Keshogunan Tokugawa. Bab 5, berisi pembahasan tentang pembukaan negara Jepang oleh bangsa Barat pada masa Keshogunan Tokugawa tahun 1791-1858. Bab 6, berisi tentang dampak pembukaan negara Jepang oleh bangsa Barat terhadap Keshogunan Tokugawa di Jepang tahun 1853-1867. Selanjutnya, dibagian akhir berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang diuraikan dalam bab 7.

BAB 4. LATAR BELAKANG MASUKNYA BANGSA BARAT KE JEPANG PADA MASA KESHOGUNAN TOKUGAWA

Memasuki abad ke 18, bangsa Eropa dan Amerika tengah berlomba-lomba untuk mencari wilayah baru guna kepentingan perluasan hubungan dagang mereka dengan bangsa lain. Perlombaan ini terjadi akibat revolusi Industri di Inggris. Negara-negara di Eropa yang sudah berhasil menguasai beberapa negara di kawasan Asia Selatan maupun Asia Tenggara ingin meluaskan perdagangannya ke wilayah Timur. Negara Amerika Serikat yang berhasil mendapatkan kemerdekaannya juga sedang memperluas hubungannya dengan negara-negara lainnya. Pencarian wilayah baru yang sedang dilakukan mengakibatkan Jepang mulai dilihat oleh bangsa Barat.

Selama tahun 1700 keadaan negara Jepang sedang bergejolak dengan masalah yang ada, sedangkan di Eropa telah terjadi banyak peristiwa yang mengguncang salah satunya revolusi industri yang terjadi di Inggris. Revolusi industri merupakan suatu proses perubahan penggunaan metode produksi dan pola-pola baru dalam kehidupan ekonomi. Perubahan yang dimaksud adalah cara kerja radikal menggunakan tenaga manusia diubah menjadi cara kerja dengan menggunakan tenaga mesin yang bekerja secara mekanis. Revolusi industri telah menghasilkan terbentuknya tenaga buruh pabrik, pengenalan arti penting pemakaian batu bara dan mesin uap oleh para pekerja.

Sejalan dengan perkembangan yang telah terjadi, muncul para ilmuwan-ilmuwan yang menciptakan mesin-mesin baru untuk menunjang berkembangnya suatu industri. Seperti yang dilakukan oleh Richard Arkwright yang menciptakan mesin tenun dan James Hargreaves sebagai penemu mesin pemintal (Sundoro, 2007: 177). Penemuan-penemuan tersebut mendorong didirikannya pabrik-pabrik tekstil dan semakin meningkatkan barang-barang yang dihasilkan oleh suatu pabrik tekstil. Hal ini tidak mengherankan sebab, dalam sehari suatu pabrik dengan manusia sebagai tenaga kerjanya hanya mampu menghasilkan puluhan sampai ratusan barang kemudian berubah dapat menghasilkan ratusan sampai ribuan barang dengan menggunakan mesin sebagai tenaga kerjanya. Manusia mengalami lelah saat

menggunakan tenaganya secara berlebihan sehingga butuh istirahat, namun mesin dapat bekerja tanpa perlu istirahat. Penggunaan mesin sebagai tenaga kerja jelas mampu memaksimalkan barang yang dihasilkan dalam suatu pabrik.

Selain Richard dan James ada juga Thomas Newcom yang pertama kali menemukan mesin uap. Penemuan yang dilakukan Thomas Newcom kemudian disempurnakan oleh James Watt. Pada saat itu tidak mengherankan jika mesin uap merupakan unsur penting dalam revolusi industri. Seiring berjalannya waktu dibuatlah alat transportasi bertenaga mesin uap seperti kereta api dan kapal untuk memudahkan transportasi manusia maupun pengangkutan hasil produksi yang dipasarkan baik ke daerah-daerah, negara tetangga, sampai ke negara-negara di benua lainnya.

Akibat adanya revolusi industri, pada abad ke 18 Inggris mulai mencari daerah-daerah baru di Amerika Utara, India, Australia dan beberapa wilayah lain di Asia. Pencarian daerah-daerah baru bagi negara Eropa khususnya Inggris, Belanda, Perancis dan Rusia pasca revolusi industri merupakan suatu keharusan yang nantinya dapat memberi keuntungan bagi kepentingan industrinya. Daerah-daerah koloni ini nantinya dijadikan sebagai tempat pengambilan bahan mentah, penanaman modal, dan mencari atau menjadikan pasar bagi barang-barang industri negara-negara Eropa (Sundoro, 2007: 198).

Terjadinya revolusi industri menjadi alasan mengapa negara-negara Eropa seperti Inggris, Belanda, Perancis dan Rusia masuk ke negara Jepang dan ingin mengadakan suatu hubungan dengannya. Setelah negara-negara Eropa seperti Inggris, Belanda dan Perancis berhasil menguasai kawasan Asia Selatan, Asia Tenggara dan Australia, negara-negara tersebut ingin meluaskan wilayah perdagangannya ke Asia Timur. Kondisi geografis dari Asia Timur khususnya Jepang yang berdekatan dengan Samudra Pasifik menjadi nilai tambah tersendiri dibanding dengan negara-negara lain. Ini disebabkan adanya laut dalam disekitar pantai Jepang memudahkan pengangkutan hasil produksi dari kapal ke daratan, yang nantinya digunakan untuk kepentingan perkembangan industri dan perdagangan (Suryohadioprojo, 1987: 6).

Semakin luas wilayah perdagangan yang dikuasai oleh suatu negara maka semakin besar keuntungan yang diperoleh. Besarnya keuntungan yang diperoleh jelas berdampak terhadap kemajuan negara tersebut.

Alasan khusus Rusia masuk ke Jepang dan ingin mengadakan suatu hubungan, karena adanya kebijakan politik air hangat yang sedang dilakukannya. Politik air hangat merupakan upaya Rusia untuk mendapatkan dan menguasai pelabuhan yang tidak membeku di musim dingin. Politik air hangat ini dilatarbelakangi oleh kondisi geografi Rusia yang terkunci di daratan. Aksesnya ke dunia luar melalui laut tertutup pada musim dingin. Vladivostok merupakan satu-satunya pelabuhan yang tidak membeku di musim dingin dan berhasil dikuasai negara Rusia, (<http://paradoxluthfiamer.blogspot.com/2011/11/politik-air-hangat.html> (08 Januari 2015)). Tujuan Rusia melakukan kebijakan politik air hangat tidak lain untuk memudahkan usahanya dalam memperluas wilayah perdagangan Rusia yang saat itu sedang bersaing dengan Inggris dan Amerika Serikat serta untuk memenuhi kepentingan-kepentingan lainnya.

Selain negara-negara di benua Eropa, negara Amerika Serikat yang pada tahun 1776 berhasil meraih kemerdekaannya dari Inggris dengan dibantu oleh pasukan dari Perancis berusaha mengadakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Amerika Serikat yang melihat negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari wilayah baru ikut terdorong untuk melakukan hal yang sama demi perkembangan negaranya. Tujuan Amerika Serikat melakukan hal ini, karena adanya kepentingan ekonomi yang tidak jauh berbeda dengan apa yang diinginkan oleh negara-negara di benua Eropa.

Jepang merupakan negara yang berada di sebelah barat Amerika Serikat dan memiliki letak geografi yang dapat menunjang kepentingan-kepentingan yang sedang dilakukannya. Oleh karena itu, Amerika Serikat ingin mengadakan hubungan diplomatis dengan negara Jepang. Dengan demikian pada abad 18 Jepang yang sebelumnya tidak masuk dalam jalur lalu lintas perdagangan internasional berubah menjadi daerah lalu lintas bagi kapal-kapal bangsa Barat (Suryohadiprojo, 1987: 22).

Semenjak saat itu bangsa Barat mulai masuk ke negara Jepang dan ingin melakukan suatu hubungan. Kondisi yang demikian menjadi bahan pertimbangan bagi negara Jepang khususnya Keshogunan Tokugawa untuk tetap mempertahankan atau meninggalkan politik isolasinya.

Secara keseluruhan latarbelakang bangsa Barat masuk ke Jepang pada masa Keshogunan Tokugawa karena terjadinya peristiwa revolusi industri. Akibat revolusi industri yang terjadi di Inggris, negara-negara di benua Eropa dan negara Amerika Serikat berlomba-lomba mencari wilayah baru untuk nantinya dijadikan tempat pemasaran hasil produksi, tempat mencari bahan baku yang diinginkan dan sebagai penanaman modal. Dengan demikian, secara umum tujuan dari bangsa Barat mengadakan hubungan dengan Jepang karena adanya kepentingan ekonomi seperti perdagangan. Kepentingan ekonomi yang dapat dipenuhi akan berdampak pada kemajuan suatu negara.

**BAB 5. PEMBUKAAN NEGARA JEPANG OLEH BANGSA BARAT
PADA MASA KESHOGUNAN TOKUGAWA TAHUN 1791-1858**

Disaat bangsa Barat berlomba-lomba mencari wilayah baru dan menjalin suatu hubungan diplomatis untuk menunjang kepentingannya ekonominya, Jepang masih mempertahankan politik isolasinya. Kebijakan politik isolasi inilah yang mengakibatkan bangsa Barat berusaha membuka negara Jepang. Terbukanya negara Jepang diharapkan dapat memperluas wilayah perdagangan bangsa Barat. Negara pertama yang membuka negara Jepang ialah Rusia. Usaha Rusia untuk membuka negara Jepang kemudian diikuti oleh negara-negara lain seperti Inggris, Perancis, Belanda dan Amerika Serikat.

Jepang mulai membuka diri terhadap bangsa Barat ditandai dengan adanya perjanjian Kanagawa serta perjanjian Persahabatan dan Perdagangan. Negara pertama yang berhasil membuat Jepang mulai membuka diri adalah Amerika Serikat. Keberhasilan Amerika Serikat kemudian diikuti oleh negara-negara lain seperti Inggris, Perancis, Belanda dan Amerika Serikat. Negara Inggris dan Amerika Serikat merupakan kekuatan laut yang mendominasi pada masa itu dan menjadi musuh utama dari Rusia.

5.1 Rusia

Negara pertama yang berusaha membuka negara Jepang dan menghentikan politik isolasi yang dijalankannya adalah Rusia. Pada akhir abad ke 18 dan permulaan abad 19 Rusia telah menduduki Siberia dan membentuk koloni di sepanjang sungai Amur dan Alaska (Suradjaja, 1984: 16). Pelabuhan Vladivostok merupakan pelabuhan yang tidak membeku di musim dingin dan Rusia berhasil menguasainya. Posisi Vladivostok yang berdekatan dengan Jepang menjadi alasan Rusia untuk dapat mengadakan hubungan dengan negara tersebut sehingga dapat menunjang kepentingan-kepentingan yang mereka inginkan. Perdagangan di Jepang memiliki pengaruh yang penting bagi koloni Rusia di pesisir Pasifik. Dikatakan demikian

sebab, Jepang menjadi tempat untuk memperoleh bahan makanan dan perlengkapan lainnya (Beasley dalam Marius, 2008: 265-267).

Beberapa wilayah yang telah dikuasai oleh Rusia, mendorong Kerajaan Rusia pada tahun 1791 mengirimkan seorang utusan ke Jepang. Utusan tersebut bernama Adam Laxman tiba di Hokkaido tahun 1792 dengan membawa dua nelayan Jepang yang terdampar untuk dipulangkan kembali ke negaranya dan surat dari Kaisar Rusia. Surat tersebut meminta kepada negara Jepang untuk membuka hubungan dagang dan diplomatis. Permintaan ini mendapat penolakan dari para pejabat Shogun. Namun, para pejabat Shogun memberi penjelasan kepada Rusia mengenai alasan mereka tidak ingin bekerja sama (Fukusai, dalam Hiroshi, 2012: 333; Sakamoto, 1982: 46).

Alasan Jepang tidak ingin mengadakan hubungan dagang dan diplomatis dengan Rusia ialah pertama karena hukum yang berlaku di tanah Jepang. Hukum tersebut menerangkan bahwa setiap kapal yang berasal dari negara yang tidak memiliki hubungan diplomatis dengan Jepang mendekat, maka mereka akan ditangkap atau diusir dengan cara ditembak. Orang asing yang terdampar di perairan Jepang akan diperlakukan sesuai dengan status hubungan negara asal mereka. Orang asing yang berasal dari negara yang memiliki hubungan diplomatis dengan Jepang akan dikirim ke Nagasaki untuk selanjutnya dipulangkan ke negara asal mereka dengan menaiki kapal Belanda atau ditawan oleh Jepang, sedangkan mereka yang berasal dari negara yang tidak memiliki hubungan diplomatis dengan Jepang akan ditawan dengan nasib yang tidak pasti dan sisa-sisa kapal mereka akan dihancurkan (Hiroshi, 2012: 334). Laxman disini mendapat pengecualian dan dipersilahkan kembali ke negara asalnya tanpa mendapatkan perlakuan apapun. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengakuan terhadap itikat baiknya yang mengembalikan nelayan Jepang yang terdampar dan sebagai bentuk pemakluman karena Laxman belum mengetahui dengan jelas seperti apa hukum yang berlaku di Jepang.

Alasan kedua Jepang menolak mengadakan hubungan dagang dan diplomati dengan Rusia ialah karena surat-menyurat antar negara adalah sebuah hal yang mustahil menurut sudut pandang *rei* (disebut juga *rites*: tata cara atau dalam hal ini

merupakan suatu etika diplomatik) di Jepang. Lebih jelasnya diuraikan dalam kutipan langsung dibawah ini.

Meskipun kami menerima surat dari negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan kami, kami tidak akan tahu siapa pengirimnya dan apa gelarnya, kami tidak mengetahui bahasa mereka, dan menyepelekan pangkat seseorang yang dapat mengakibatkan sebuah masalah. Jadi akan sulit untuk menetapkan etika yang benar (*rei*) karena kami tidak dapat menilai apakah sesuatu yang kami anggap sopan di negara kami akan berlaku juga di negara lain, jadi kami tidak mungkin melakukan kegiatan surat-menyurat dalam hubungan diplomatik (Hiroshi, 2012: 334-335).

Singkatnya, untuk menghindari pelanggaran etika yang ada, cukup menjadi alasan bagi para pejabat Shogun untuk menolak komunikasi yang diinginkan oleh Rusia. Demi mempertahankan *rei* nya para pejabat Shogun juga rela jika Rusia tidak ingin mengembalikan warga negara Jepang yang terdampar.

Dijelaskan pula dalam otobiografi Matsudaira Sadanobu (1759-1829) yang pernah mengepalai dewan senior Keshogunan pada masa itu untuk memberi perintah kepada para pejabat yang menangani masalah Laxman agar membuat pihak Rusia mengerti tentang masalah etika dan hukum yang ada di negara Jepang (Sadanobu, dalam Hiroshi, 2012: 335). Sadanobu menyadari bahwa apa yang dilakukan Rusia merupakan ketidaktahuan mereka tentang etika dan hukum yang berlaku di Jepang. Dengan memberi penjelasan terhadap etika dan hukum yang berlaku di Jepang kepada utusan Rusia, diharapkan mereka mengerti untuk tidak lagi melakukan usaha mengadakan hubungan dengan Jepang. Faktanya kegagalan usaha Laxman tidak menghentikan Rusia untuk terus berusaha membuka Jepang.

Pada akhirnya Laxman menyerah dan memutuskan untuk pulang ke negaranya. Dalam hal ini Laxman tidak berhasil membujuk pihak Jepang untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan negaranya (Hiroshi, 2012: 335). Peristiwa tibanya Laxman di Jepang menjadi tanda bahwa pertahanan pesisir pantai mulai melemah. Para pejabat Shogun kemudian meningkatkan kewaspadaan akan datangnya bangsa-

bangsa lain yang ingin mengadakan hubungan dagang atau diplomatis dengan negara Jepang.

Pada tahun 1799, kegiatan di seluruh daerah Rusia berada di bawah kendali perusahaan Rusia-Amerika yang baru dibentuk, seperti *East India* yang merupakan perusahaan milik Inggris dan Belanda. Pada tahun 1802 muncul masalah dalam perusahaan tersebut, yaitu sulitnya jalan darat di seluruh Asia untuk melakukan pemasokan barang dan mengembangkan perdagangan maritim dengan China, India dan Asia Tenggara. Solusi untuk memecahkan masalah tersebut ialah dengan melakukan suatu rencana untuk membuka komunikasi laut di pantai Pasifik dan rencana pengajuan sebuah proposal perdagangan dengan Jepang. Hal ini dilakukan sebab Jepang mampu memberikan barang-barang untuk diperdagangkan di negara China dan Eropa seperti teh, sutra, porselen, dan pernis (Beasley dalam Marius, 2008: 265).

Sebuah ekspedisi eksplorasi berangkat dari Kronstadt pada tahun 1803, yang dipimpin oleh Kapten Adam Krusenstern dan Nikolai Rezanov yang merupakan pemegang saham utama di Perusahaan Rusia-Amerika dan juga sebagai utusan yang dikirim Rusia ke Jepang. Kapal perang Rusia yang bernama “Nadiezhda” mencapai Nagasaki pada bulan Oktober 1804. Permintaan untuk hubungan dagang dan diplomatis oleh Tzar Alexander I ditulis dalam sepucuk surat. Surat itu kemudian dibawa ke Edo, sementara Rezanov tetap di Nagasaki untuk menunjukkan kesopanannya. Akhirnya, pada bulan April 1805, seorang pejabat Jepang datang dengan surat perintah resmi untuk memberitahukan kepada Rezanov bahwa proposal maupun hadiahnya tidak bisa diterima (Lan, 1962: 114; Beasley dalam Marius, 2008: 265).

Surat perintah resmi tersebut menjelaskan tentang beberapa alasan penolakan Jepang. Pertama, surat tersebut menyebutkan bahwa pejabat Jepang paham mengenai hubungan yang baik antar tetangga, akan tetapi sifat alami alam dan penduduk Jepang, sangatlah berbeda dengan Rusia sehingga akan sulit untuk menjalin hubungan yang baik antara kedua negara. Kedua, seperti yang tertulis dalam *Liji* (tata

cara klasik), aturan kesopanan yang ada mementingkan adanya timbal balik (Legge, dalam Hiroshi, 2012: 336). Apabila Jepang menerima hadiah atau persembahan dari negara lain, maka Jepang harus memberikan sesuatu yang setimpal. Jika tidak maka akan dianggap sebagai pengacuhan terhadap etika yang ada. Sudah jelas bahwa Jepang tidak bisa menjalin hubungan timbal balik dengan semua negara yang ada di dunia termasuk dengan Rusia. Daripada Jepang harus melanggar etikanya sendiri lebih baik tidak menjalin hubungan atau menerima hadiah sejak awal (Seishisai, dalam Hiroshi, 2012: 336).

Ketiga ialah dengan melihat ekonomi Jepang yang sudah dapat mencukupi dirinya sendiri, perdagangan asing hanya akan menyebabkan hilangnya produk dalam negeri yang bagus sebagai ganti untuk barang dari luar negeri yang tidak berharga. Keempat, perdagangan semacam itu hanya akan merusak moral bangsa dan berpotensi merusak rakyat juga. Kelima, hubungan yang terjalin dengan baik diantara kedua negara merupakan suatu pelanggaran terhadap “larangan negara kami”. Dikatakan sebuah larangan, sebab Jepang saat itu sedang menjalankan politik Sakoku yang sudah ada sejak tahun 1600an (Hiroshi, 2012: 335-336).

Respon pejabat shogun terhadap Rezanov lebih jelas daripada respon terhadap Laxman. Jalan Konfusian yang diwujudkan dari hubungan baik antar tetangga, etika, dan masyarakat disuarakan sebagai dasar untuk posisi Jepang dalam menolak hubungan dagang dan diplomatis dengan Rusia. Penguasa Jepang yang mempercayai Jalan Konfusian berusaha membujuk pihak asing, dengan memahami norma dan nilai yang universal. Satu-satunya kata yang cocok dengan norma dan nilai yang universal menurut mereka adalah Jalan Konfusian. Akhirnya Rezanov juga berhasil ditolak dan masalah sekali lagi berhasil diselesaikan oleh pemerintah Jepang (Hiroshi, 2012: 336).

Mendapat penolakan dari Jepang, Rezanov marah. Rezanov kemudian meninggalkan pelabuhan dan membuat persiapan bersama dua bawahannya yaitu Chvostov dan Davidov untuk melakukan penyerangan di Ezo (Hokkaido), Sakhalin, dan Kuril yang menjadi pusat perdagangan Jepang pada tahun 1806. Setelah

melakukan penyerangan Rezanov dengan dua bawahannya menduduki tepat-tempat di wilayah tersebut dengan mengatasnamakan Tsar (Lensen, dalam Beasley, 2008: 265-266; Samson, dalam Lan, 1962: 114). Ini dilakukan Rezanov sebagai satu-satunya cara untuk memaksa Jepang agar bersedia membuka negaranya. Sikap yang Rezanov lakukan telah meninggalkan kesan buruk dalam pandangan masyarakat Jepang.

Pada tahun 1807 Kapten Golovnin diperintahkan untuk memeriksa kepulauan Kuriles Selatan dengan kapal perang “Diana”. Ketika mendarat di Kunashir, Golovnin beserta kawanannya ditangkan oleh tentara Jepang. Mereka semua kemudian ditahan sampai tahun 1813 dan kemudian diperkenankan untuk kembali ke negaranya (Lan, 1962: 114-115). Beberapa tindakan yang telah dilakukan oleh bangsa Rusia semakin meningkatkan pengawasan pemerintah di daerah pesisir pantai. Pemerintah kemudian menetapkan peraturan tentang pengusiran kapal-kapal asing di semua pelabuhan kecuali Nagasaki.

Usaha yang dilakukan Rusia kembali dilanjutkan pada tahun 1842. Tsar Nicholas I membentuk sebuah komite untuk meninjau posisi Rusia di wilayah Amur dan Sakhalin. Dari peninjauan tersebut muncul usulan untuk memperluas perdagangan Rusia dengan China dan Jepang yang akan dipimpin oleh Laksaman Evfimii Putiatin (Beasley dalam Marius, 2008: 266). Kenyataannya rencana ini akhirnya ditinggalkan karena kepentingan komersial Rusia di daerah tersebut tidak memberikan alasan yang kuat bagi perusahaannya. Usaha ini kemudian dilanjutkan kembali oleh Rusia pada tahun 1853.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Rusia merupakan negara pertama yang melakukan usaha untuk membuka negara Jepang dan menghentikan politik isolasi yang dijalkannya. Tujuannya sendiri ialah untuk memperluas wilayah perdagangan Rusia, memenuhi kepentingan-kepentingan Rusia dan menyelesaikan masalah perbatasan wilayah Sakhalin dan Kepulauan Kuril. Usaha yang dilakukan Rusia dimulai tahun 1791 hingga tahun 1853, namun semua usaha-usaha yang dilakukan Rusia untuk membuka Jepang menemui kegagalan. Usaha Rusia nantinya

menemui keberhasilan setelah Commodore Perry berhasil membujuk Keshogunan Tokugawa untuk membuka negara Jepang.

5.2 Inggris

Akibat adanya revolusi industri, Inggris berkembang menjadi negara industri yang haus akan wilayah baru untuk dijadikan sebagai tempat pemasaran hasil industri, penanaman modal, dan pencarian bahan baku yang diinginkan. Pada abad ke 17 Inggris berhasil membentuk kongsi dagang di India yang dinamai *East India Company* (EIC). Wilayah kekuasaan Inggris semakin bertambah pada abad berikutnya, tidak hanya India namun beberapa wilayah di Asia Tenggara seperti Jawa, Singapura dan Malaysia juga berhasil dikuasainya. Keberhasilan Inggris mendapatkan wilayah baru, memunculkan keinginan lain untuk meluaskan wilayah perdagangannya ke Asia Timur yakni di China dan Jepang.

Pada abad ke 18 Belanda berada dibawah kekuasaan Perancis setelah kalah dalam suatu peperangan. Kekalahan yang diderita Belanda menjadikannya sebagai musuh Inggris. Di samudera kapal-kapal perang Inggris mencari kapal-kapal Belanda. Sampai kemudian di tahun 1808 kapal Belanda dikejar oleh kapal perang “Phaeton” milik Inggris. Pengejaran ini mengakibatkan kapal perang Inggris memasuki Nagasaki. Pasukan Inggris kemudian minta untuk diberikan makanan dan perbekalan, jika tidak maka kapal-kapal yang ada di pelabuhan akan ditembaki. Gubernur di wilayah tersebut memberi perintah untuk menyerang dan membakar kapal-kapal milik Inggris namun, perintah ini tidak dilaksanakan. Pasukan Inggris kemudian diberi makanan dan perbekalan, hingga akhirnya kapal-kapal perang tersebut meninggalkan Nagasaki (Beasley dalam Marius, 2008: 262; Lan, 1962: 115).

Mendengar berita tentang pasukan Inggris yang diberi makanan dan perbekalan, menyebabkan bakufu menjatuhkan hukuman pada pejabat-pejabat Nagasaki yang sudah bersikap lemah terhadap kapal asing. Pertahanan pesisir kemudian diperkuat dan Belanda berusaha menghasut bakufu jika Rusia dan Inggris yang datang ke Jepang memiliki maksud yang tidak baik. Beberapa tahun kemudian, peraturan yang

diterapkan bakufu pada kenyataannya tidak dijalankan dengan sepenuhnya. Ada beberapa kapal asing yang singgah di pelabuhan-pelabuhan Jepang namun tidak mendapat serangan dari tentara-tentara Jepang (Lan, 1962: 115).

Semenjak diangkat menjadi Letnan Gubernur di Jawa pada tahun 1811, Sir Thomas Stamford Raffles melihat peluang untuk mengganti perdagangan Belanda di Nagasaki dengan perdagangan Inggris. Ini dilakukan bukan tanpa sebab, karena pada masa itu Belanda mengalami kemerosotan. Kemerosotan itu dimulai ketika Belanda kalah perang dengan Perancis pada abad ke 18. Raffles menjelaskan kepada Gubernur Jenderal di India pada bulan April tahun 1812, bahwa “jika kita berhasil dalam sekali mendapatkan pijakan, tidak akan ada kesulitan yang serius dalam memperluas ekspor hasil komoditas dari Inggris-India yang tidak cukup untuk dijual di Eropa” (Barnes dan Noble dalam Beasley, 2008: 261). Menurut Raffles jika Inggris benar-benar bisa membuka Jepang dan mampu menggantikan posisi perdagangan Belanda maka tidak akan ada lagi kesulitan untuk memperluas perdagangannya.

Pada tahun 1813-1814 Raffles mengirimkan dua kapal perangnya ke Nagasaki namun rencana ini tidak berhasil karena digagalkan oleh Belanda. Belanda membujuk wakil Raffles untuk tidak menampilkan diri kepada pemerintah Jepang. Menurut Belanda, jika Inggris melanjutkan rencananya maka akan timbul resiko perlawanan dari Jepang akibat tindakan sewenang-wenang kapal perang “Phaeton” milik Inggris terhadap kapal milik Belanda. Usaha Belanda ternyata berhasil, namun Raffles tidak gentar dia berusaha mencari cara lain untuk mengirim kapal-kapal perangnya di lain waktu. Sebelum rencana itu terwujud Gubernur Jenderal di London melarang Raffles untuk membuat rencana atau tawaran lain untuk mengadakan hubungan dagang dan diplomatis dengan Jepang. Hasil keputusan ini diresmikan di London pada bulan Mei 1815 dimana Jepang tidak bisa dijadikan sebagai obyek perhatian untuk dapat memproduksi dan memberikan keuntungan pada Inggris (Beasley dalam Marius, 2008: 262).

Kenyataan yang terjadi, keputusan tersebut tidak lantas membuat bangsa Inggris menyerah dalam melakukan usaha untuk kembali mengirimkan pasukannya

ke Jepang. Setelah berhasil mengalahkan China dalam perang Candu I pada tahun 1842, Inggris mencoba untuk melebarkan kekuasaannya ke Jepang. Pada saat itu Inggris merupakan negara dengan kekuatan yang tidak diragukan lagi sehingga keinginan menguasai negara-negara lain untuk menunjang kepentingan ekonominya begitu kuat. Begitu juga keinginan Inggris untuk mengadakan hubungan dagang dan diplomatis dengan Jepang tidak dapat dihentikan lagi.

Pada tahun 1842 bakufu mengeluarkan kebijakan *Shin-sui kyoyo rei* yaitu peraturan yang memberi ijin kepada kapal-kapal asing untuk mengambil makanan dan bahan-bahan bakar ketika terdampar di pelabuhan Jepang (Suradjaja, 1984: 37; Lan, 1962: 116). Kebijakan tersebut menandakan bahwa bakufu mulai melunakkan peraturannya akibat mendengar berita kekalahan China melawan pasukan Inggris. China yang selama ini oleh Jepang dianggap sebagai negara yang memiliki kebudayaan dan pengetahuan lebih tinggi mampu dikalahkan oleh Inggris. Berita ini kemudian membuat bakufu mulai menyadari akan kekuatan yang dimiliki bangsa Barat. Bakufu tidak ingin nasib yang dialami China juga akan dialami oleh Jepang.

Pada bulan Mei 1845 Sir Jhon Davis yang merupakan pengawas perdagangan Inggris dan Gubernur Hongkong menyusun rencana rahasia untuk melakukan ekspedisi ke Jepang. Ekspedisi ini menggunakan kekuatan angkatan laut yang tersedia untuk menimbulkan misi yang mengesankan. Davis yakin ekspedisi ini akan berhasil sebab, Jepang telah mendengar kekalahan China. Kenyataan yang terjadi, rencana Davis tidak bisa diwujudkan karena saat itu pemerintah Inggris disibukkan oleh kegiatan perdagangannya di China. Selain itu, kabar tentang Amerika Serikat yang akan melakukan misi untuk mengadakan hubungan dagang dengan Jepang oleh pemerintah Inggris dijadikan sebagai suatu percobaan. Jika misi tersebut berhasil, Inggris akan mengikuti langkah Amerika Serikat (Beasley dalam Marius, 2008: 263-264; Dasuki, 1963b: 5).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Inggris sudah melakukan kontak dengan Jepang pada tahun 1808. Semenjak saat itu Inggris melakukan berbagai usaha untuk membuka Jepang namun menemui kegagalan. Sampai akhirnya, tersiarnya

kabar kekalahan China dengan Inggris mampu menggoyahkan bakufu untuk melunakkan peraturan yang berlaku di pelabuhan Jepang. Tidak dapat dipungkiri hal ini menjadi alasan yang dipertimbangkan oleh Keshogunan Tokugawa untuk mempertahankan atau menghentikan politik isolasi yang sudah mereka jalankan bertahun-tahun lamanya.

5.3 Belanda dan Perancis

Negara Belanda sebenarnya telah mengadakan hubungan dagang dengan Jepang sebelum adanya kebijakan politik isolasi. Setelah kebijakan politik isolasi ditetapkan, Jepang tidak sepenuhnya menutup diri dari negara lain. Ada beberapa negara yang diperbolehkan melakukan perdagangan dengan Jepang. Negara-negara tersebut ialah China, Belanda, dan Korea.

China dan Korea merupakan sesama bangsa Asia dan tetangga dari Jepang. Pada masa itu Korea tidak mempunyai peran penting di mata Jepang dan China juga tidak dipandang sebagai negara yang berpengaruh, sebab saat itu terjadi banyak kekacauan di akhir pemerintahan Dinasti Ming. Bakufu memperbolehkan Belanda melakukan perdagangan dengan Jepang karena negara tersebut tidak memiliki tujuan lain selain berdagang yang dapat membahayakan kekuasaan Keshogunan Tokugawa. Belanda memang berhasil melakukan perdagangan dengan Jepang namun, dalam hal hubungan diplomatis belum dikatakan berhasil. Dikatakan demikian karena, selama melakukan hubungan dagang dengan Jepang, bangsa Belanda ditempatkan di pulau Deshima di teluk Nagasaki dengan syarat-syarat yang keras. Bangsa Belanda tidak diperbolehkan meninggalkan pulau Deshima dan setiap satu tahun sekali perwakilan Belanda harus datang ke Edo untuk menyampaikan salam hormatnya kepada Shogun. Perjalanan menuju Edo tersebut dilakukan dengan penjagaan yang sangat ketat (Lan, 1962: 96-98; Suryohadiprojo, 1987: 22).

Peran Belanda cukup berpengaruh dalam menghentikan kebijakan politik isolasi Jepang, meskipun negara tersebut tidak begitu menunjukkan antusiasnya dalam mengadakan hubungan yang lebih jauh selain perdagangan. Dikatakan

demikian karena meskipun Jepang menutup diri dari dunia luar, negara matahari tersebut selalu mendapatkan informasi mengenai perkembangan yang terjadi di dunia luar dari bangsa Belanda. Seperti peristiwa terjadinya revolusi industri dan revolusi perancis. Informasi yang didapat dari Belanda menjadi pelajaran yang sangat penting bagi bakufu untuk menghadapi tantangan perkembangan zaman yang akan dihadapinya nanti.

Hal lain yang dilakukan Belanda tidak lama setelah akhir dari Perang Opium yang pertama, sebuah komunikasi melalui sebuah surat dilakukan oleh Raja Willem II dari Belanda kepada Shogun Tokugawa pada tahun 1844. Sang Raja menyarankan shogun untuk membuka hubungan diplomatis dan perdagangan yang resmi dengan negara-negara Barat. Berikut uraian mengenai isi dari surat Raja Willem.

Hubungan antara negara yang berbeda di penjuru dunia mulai meningkat dengan pesat. Sebuah kekuatan yang tidak dapat ditolak telah menyatukan mereka (negara-negara tersebut). Penemuan kapal uap juga membuat jarak-jarak yang harus ditempuh menjadi lebih pendek. Sebuah negara yang lebih memilih untuk tetap berada dalam pengasingan disaat hubungan antar negara semakin meningkat tentu tidak akan dapat mengelak dari permusuhan dengan banyak negara lain (Greene, dalam Hiroshi, 2012: 340).

Surat tersebut memperingatkan akan bahaya yang dialami Jepang jika terus mempertahankan politik isolasinya disaat semua negara berusaha menyatukan diri. Bakufu disini hanya memberi jawaban kepada Belanda bahwa pengasingan tidak bisa ditinggalkan “hukum leluhur telah diperbaiki, cucu harus mematuhi” (Beasley dalam Marius, 2008: 263). Bakufu memang mampu membalas suarat tersebut namun, saat itu mulai terjadi perdebatan politik untuk tetap mempertahankan atau meninggalkan politik isolasi.

Perancis juga ingin mencoba peruntungan untuk dapat melakukan hubungan dagang dan diplomatis dengan Jepang seperti negara-negara lain. Pada tahun 1846 sebuah kapal dari Perancis telah tiba di kepulauan Ryukyu. Mereka berusaha menasehati warga setempat untuk meminta perlindungan kepada Perancis sebagai

tindakan penjagaan diri jika nanti bangsa Inggris menyerang Jepang. Usaha ini ternyata juga tidak mebuahkan hasil (Lan, 1962: 122).

Berbagai upaya yang dilakukan bangsa Barat untuk mengadakan hubungan dagang dan diplomatis dengan Jepang semakin membuat bakufu menjadi khawatir akan bahaya yang mulai mengintai Jepang. Bakufu ingin agar kebijakan yang sudah dilakukan oleh leluhurnya tetap dipertahankan, tetapi bakufu juga tidak ingin Jepang mengalami nasib seperti China yang harus takluk kepada bangsa Barat dan menderita kerugian banyak. Faktanya berbagai kemajuan yang telah terjadi didunia luar lambat laun akan dialami juga oleh Jepang yang selama hampir dua setengah abad menutup diri.

4.4 Amerika Serikat

Di seberang samudera pasifik, Amerika Serikat telah berkembang menjadi sebuah negara yang besar, maju dan kuat. Perdagangan Amerika Serikat dengan negara-negara lain semakin bertambah, sehingga kapal-kapal dagang yang mereka miliki mulai melakukan pelayaran ke berbagai negara di dunia. Sebelum tahun 1800 bangsa Amerika telah berniaga ke Pasifik utara. Pelayaran Amerika Serikat juga semakin berkembang, karena sejak tahun 1812 negara ini sudah memimpin industri penangkapan ikan paus. Orang Amerika banyak yang memburu ikan paus karena lapisan lemaknya dapat digunakan untuk membuat lampu minyak (Tsunenari, 2009: 131).

Kapal-kapal penangkap ikan paus milik Amerika Serikat yang beroperasi di laut Okhotsk (letaknya di sebelah utara Jepang) sering ditimpa badai sehingga terdampar sampai ke Ezo yakni Hokkaido atau kepulauan Kuriles. Anak buah kapal-kapal milik Amerika Serikat yang terdampar ditangkap oleh tentara Jepang dan sering mendapat perlakuan yang kasar. Bukan hanya itu saja, awak kapal Amerika Serikat yang menemukan para pelaut Jepang ditengah laut kemudian mengantarkan mereka kembali ke negaranya sering mendapatkan perlakuan yang sama (Lan, 1962: 122-123).

Peristiwa banyaknya awak kapal milik Amerika Serikat yang sering mendapat perlakuan kasar ketika terdampar di pelabuhan Jepang menjadi pembicaraan yang penting kala itu. Pada suatu kongres yang dilakukan Amerika Serikat, telah diajukan usul mengirim beberapa utusan ke Jepang dan Korea (Samson dalam Lan, 1962: 123). Semenjak saat itu banyak misi yang dilakukan Amerika untuk mengadakan hubungan dagang dan diplomatis dengan Jepang. Tujuannya tidak lain untuk mendapatkan keselamatan bagi awak kapal Amerika Serikat yang sering terdampar di pelabuhan Jepang.

Pada tahun 1832 Presiden Andrew Jackson mengirim kapten Edmund Robert sebagai tatanegarawan di China. Di tahun 1835 Robert mendapat tugas untuk menyampaikan sepucuk surat ke kaisar Jepang dengan tujuan mengadakan hubungan dagang. Robert dipilih presiden untuk melakukan hal tersebut sebab dia dipercaya dapat melakukan negosiasi dengan Jepang tanpa ada resiko buruk yang akan terjadi. Sebelum tugas itu dapat diselesaikan, Robert meninggal dunia pada tahun 1836 dan dimakamkan di Canton, sehingga misi tersebut tidak jadi dilakukan (Beasley dalam Marius, 2008: 268; Lan, 1962: 123).

Usaha selanjutnya dilakukan oleh sekelompok pedagang dan missionaris yang mengorganisir pelayaran swasta dengan menggunakan kapal “Morrison” pada tahun 1837. Kapal tersebut bertolak dari Makao menuju Jepang. Sekelompok pedagang dan missionaris Amerika Serikat berusaha mengadakan hubungan dagang dengan mengembalikan para pelaut Jepang yang ditemukan di laut. Saat itu, banyak para pelaut Jepang yang menyeberangi Samudera Pasifik ke kepulauan Aleuten dan ke pesisir Amerika Utara. Pengembalian pelaut Jepang ini diharapkan memudahkan sekelompok pedagang dan missionaris Amerika Serikat untuk dapat memasuki pelabuhan Jepang. Kenyataan yang terjadi, ketika memasuki teluk Edo kapal “Morrison” mendapat penembakan dari penjaga pantai sehingga kapal tersebut langsung meninggalkan teluk untuk menyelamatkan diri. Kapal “Morrison” akhirnya kembali ke Canton untuk menurunkan para pelaut Jepang yang tidak bisa dikembalikan ke negerinya. Peristiwa tersebut dikenal dengan sebutan “Insiden

Morrison” (Beasley dalam Marius, 2008: 268; Lan, 1962: 115-116; Suradjaja, 1984: 17).

Setelah tahun 1840 negara-negara Barat semakin giat mengadakan ekspansinya ke China, tidak terkecuali Amerika. Perdagangan Amerika dengan China menduduki posisi kedua setelah Inggris. Oregon dan California juga berhasil dikuasai oleh Amerika Serikat setelah mengalahkan Meksiko. Dikuasainya California menyebabkan Amerika Serikat memiliki wilayah pantai yang luas di Samudera Pasifik (Dasuki, 1963b: 4-5; Beasley, 2003: 240). Hal ini juga berdampak pada hubungan dagang Amerika Serikat dengan Canton yang semakin pesat dan memberikan peluang ekonomi yang besar.

Pelayaran antara California dengan Canton memakan waktu yang cukup lama, sehingga sering menyusahkan para awak kapal Amerika Serikat karena kehabisan persediaan air minum dan bahan bakar (batu bara). Permasalahan yang dialami awak kapal Amerika Serikat dapat diatasi dengan menjadikan pelabuhan-pelabuhan di Jepang sebagai tempat peristirahatan untuk mengisi perbekalan dan bahan bakar. Dengan demikian Jepang dapat dijadikan sebagai batu loncatan oleh Amerika Serikat untuk melanjutkan pelayarannya ke China (Suradjaja, 1984: 16).

Keinginan Amerika Serikat untuk dapat menjadikan Jepang sebagai batu loncatan dalam meneruskan pelayarannya ke China harus dilakukan dengan mengirimkan utusan yang dapat membujuk Jepang. Selain itu, perang candu yang berhasil memperluas pembukaan pelabuhan di China semakin meyakinkan bangsa Amerika Serikat jika Jepang tidak akan menolak keinginannya. Pada bulan Mei 1845 perwakilan di China mengirim instruksi ke Amerika Serikat untuk melakukan suatu kunjungan ke Jepang dengan mengirimkan perwira senior angkatan laut Commodore James Biddle. Mendapat perintah tersebut, Commodore James Biddle berangkat dengan dua kapal perangnya menuju Edo dan tiba disana pada bulan Juli 1846. Perintah dari Amerika Serikat yang dibawa Commodore Biddle untuk dapat mengadakan hubungan dagang dengan Jepang mendapat penolakan dari bakufu. Jepang berusaha keras untuk mempertahankan kebijakan isolasinya, meskipun

sebelum kedatangan Commodore Biddle bakufu telah melunakkan peraturan tentang penembakan terhadap kapal-kapal asing yang memasuki pelabuhan Jepang (Beasley dalam Marius, 2008: 268; Lan, 1962: 123).

Selanjutnya, di tahun 1849 Komandan James Glynn datang ke Nagasaki dengan kapal perang “Preble”. Tujuan kedatangan Glynn adalah untuk menjamin pembebasan dan pemulangan 15 awak kapal Amerika yang terdampar dan ditahan beberapa bula di Jepang. Setelah berhasil membebaskan awak kapal Amerika Serikat Glynn kembali ke New York pada awal 1851. Glynn kemudian bergabung dalam kampanye yang membujuk Amerika Serikat untuk mengirim ekspedisi ke Jepang (Beasley dalam Marius, 2008: 268-269). Kampanye tersebut dilakukan bukan tanpa alasan, sebab pada tahun 1850 ada sekitar tujuh ratus kapal penangkap paus yang beroperasi di Samudra Pasifik, dan sekitar tiga ratus di antaranya beroperasi di perairan dekat Jepang (Tsunenari, 2009: 131-132). Oleh karena itu, Amerika Serikat membutuhkan pelabuhan-pelabuhan yang ada di Jepang untuk mengisi perbekalan dan bahan bakar, serta digunakan sebagai tempat berlindung saat terjadi badai. Jepang sepertinya menjadi pilihan yang wajar sebab posisinya berada di dekat Samudera Pasifik

Melihat situasi dan kondisi yang ada Menteri Luar Negeri Daniel Webster menyetujui proposal tentang misi yang akan dilakukan Amerika Serikat ke Jepang pada bulan Juni 1851. Misi tersebut akan dilakukan oleh Commodore Jhon H. Aulick dengan tujuan untuk (1) mendapatkan perlindungan bagi awak kapal Amerika Serikat yang mengalami kecelakaan di laut; (2) membuka beberapa pelabuhan di Jepang untuk dijadikan tempat peristirahatan kapal dalam mengisi perbekalan dan bahan bakar (batu bara); (3) pembukaan beberapa pelabuhan di Jepang untuk perdagangan. Misi tersebut disertai dengan surat dari Presiden Millard Fillmore kepada Kaisar Jepang (Beasley dalam Marius, 2008: 269; Lan, 1962: 124). Persiapan untuk misi ini dilakukan dengan sangat teliti dan dilakukan dengan persiapan yang matang. Amerika Serikat memberitahukan negara-negara Eropa tentang misi tersebut dengan tujuan agar negara-negara lain dapat membantu Amerika Serikat untuk membuka negara

Jepang. Sebelum Commodore Aulick menjalankan tugasnya, ia telah dibebaskan dari jabatannya dan digantikan oleh Commodore Matthew Calbraith Perry.

Pada tanggal 24 November 1852 Commodore Matthew C. Perry bertolak dari Norfolk menuju Jepang. Perry membawa 4 kapal bertenaga uap yang terdiri dari 2 kapal layar dan 2 kapal perang yakni “Mississippi”, “Susquehanna”, “Saratoga”, dan “Plymouth”. Pada bulan Juli tahun 1853 Perry bersama 4 kapalnya masuk ke teluk Edo (sekarang teluk Tokyo) dekat kampung nelayan Uraga. Sebagai tanda salam kehormatan kapal-kapal Perry melepaskan tembakan meriam. Masyarakat Jepang khususnya pengikut bakufu sangat heran melihat kedatangan kapal hitam (*black ships*) dengan senapan meriamnya yang oleh orang Jepang disebut dengan *kuro fune*. Kapal-kapal tersebut juga dapat melaju dengan cepat meskipun menantang arus angin. Masyarakat Jepang yang tidak pernah melihat kapal-kapal uap tersebut mulai merasa khawatir (Suradjaja, 1984: 17; Dasuki, 1963b: 6; Beasley, 2003: 241).

Perry meyakinkan pemerintah Jepang jika misi persahabatan Amerika Serikat untuk kepentingan perdamaian di Samudera Pasifik dan tidak ada sangkut pautnya dengan agama kristen. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan kekhawatiran pemerintah Jepang akan masuknya agama Kristen (Lan, 1962: 125). Instruksi yang dilakukan Perry juga bersifat damai karena, meskipun membawa 4 kapal perang bertenaga uap, Perry tidak boleh menggunakan kekerasan kecuali jika keadaan mendesak atau untuk membela diri. Sebisa mungkin Perry harus menjalankan tugasnya dengan baik untuk menunjukkan sikap persahabatan Amerika Serikat terhadap Jepang.

Sebenarnya bakufu sudah mengetahui kunjungan Perry dalam beberapa waktu. Bulan April sebelumnya, kepala stasiun perdagangan Belanda di Nagasaki telah menyerahkan laporan rutinnnya mengenai hal-hal yang menyangkut dunia kepada bakufu. Laporan tersebut berisi informasi rinci tentang misi Perry, yang menyebar di antara daimyo yang dipercaya oleh pemerintah shogun. Mendengar kabar tersebut, bakufu sudah mengantisipasi mengenai kunjungan Perry ke Jepang. Sebuah Benteng

didirikan di Odaiba Teluk Edo pada tahun 1853-1854 (sekarang Teluk Tokyo) untuk melindungi Edo dari serangan Amerika Serikat. (Tsunenari, 2009: 132).

Setelah berlabuh di kampung nelayan Uruga, Perry bermaksud menemui pejabat Shogun untuk menyampaikan surat dari presiden Fillmore namun, usaha itu dihalangi oleh tentara Shogun. Tentara Shogun menganjurkan agar Perry menuju ke Nagasaki, akan tetapi Perry menolak. Perry bersikeras untuk menyerahkan surat dari presiden kepada pejabat Shogun dan bergerak lebih dalam ke teluk Edo dimana dia mendeklarasikan kepada para pejabat Shogun agar menerimanya dan bahwa:

dia [Perry] memiliki surat dari presiden Amerika Serikat untuk Penguasa [shogun] Jepang atau kepada sekretariat hubungan asing dan dia hanya akan mengirimkannya kepada kedua pihak tersebut bukan yang lain, apabila surat bersahabat yang dikirim oleh presiden kepada shogun ini tidak diterima dan dijawab dengan sebagaimana mestinya, maka ia akan menganggap ini sebagai sebuah penghinaan terhadap negaranya dan dia tidak akan bertanggung jawab atas konsekuensi yang akan datang (Hawks, dalam Hiroshi, 2012: 342).

Perry sangat memaksa dan mungkin dia memiliki *rei* yang kurang, atau yang dia sebut sebagai kesopanan. Tetapi tuntutananya dipertimbangkan secara serius oleh Jepang.

Bakufu kemudian mengutus wakilnya menemui Perry untuk menerima surat dari Presiden Millard Fillmore dan surat dari Perry sendiri. Pada tanggal 14 Juli kotak-kotak berhias tempat surat presiden Millard Fillmore dan surat dari Commodore Perry diserahkan kepada wakil dari bakufu. Proses penyerahan surat tersebut terjadi di Kurihama dihadapan 5000 prajurit Jepang. Wakil dari bakufu kemudian meminta waktu kepada Perry untuk mempertimbangkan usulan dari Amerika Serikat. Perry kemudian meninggalkan teluk Edo dan pada musim semi berikutnya akan datang kembali untuk meminta jawaban. Perry juga menolak pergi ke Nagasaki untuk menerima jawaban pemerintah Jepang melalui orang Belanda ataupun orang China. Setelah itu Perry bersama 4 kapal hitamnya pergi meninggalkan teluk Edo (Lan, 1962: 125; Bain, 1962: 68; Beasley, 2003: 241).

Surat itu akhirnya disampaikan kepada Shogun dan bakufu. Surat itu tidak hanya mengandung misi yang memberikan ancaman militer tetapi juga menimbulkan pertanyaan dan tantangan mengenai kesusilaan dan filosofis. Sebagai contoh, surat dari presiden Amerika Serikat, Millard Fillmore, kepada shogun (dikonsep dengan bahasa Inggris, ditulis dengan bahasa Cina klasik, dan diterjemahkan oleh orang Jepang menjadi bahasa mereka sendiri). Surat ini mengangkat topik mengenai perlakuan terhadap orang-orang yang terdampar.

Hal ini terkadang terjadi pada salah satu kapal kami ketika menerjang badai, kapal mereka karam di tepi laut perairan Baginda Kaisar. Dalam situasi seperti ini, kami meminta dan mengharapkan agar orang-orang kami yang sedang tidak beruntung dapat diperlakukan dengan baik, dan barang-barang mereka dilindungi sampai kami mengirimkan kapal lain untuk menjemput mereka. Kami sangat bersungguh-sungguh tentang hal ini (Beasley, dalam Hiroshi, 2012: 340-341).

Surat yang ditulis oleh Komodor Perry kepada shogun (dikonsep dengan bahasa Inggris, ditulis dengan bahasa Belanda, dan diterjemahkan oleh orang Jepang menjadi bahasa mereka sendiri) memiliki inti yang sama namun dengan kekuatan moral yang lebih besar.

Bagi orang-orang Amerika dan termasuk juga semua umat Kristen, merupakan suatu tugas yang mulia ketika kita menerima dengan penuh kebaikan dan juga menolong dan melindungi semua orang dari negara manapun itu yang terdampar di daerah perairan mereka. Dan hal itulah yang telah dilakukan oleh orang-orang Amerika terhadap orang Jepang yang berada dalam perlindungan mereka.

Pemerintah Amerika Serikat mengharapkan agar dari hal ini mereka mendapatkan jaminan yang positif dari Jepang bahwa jika ada kapal yang karam di daerah Jepang ataupun mengalami tekanan dari cuaca yang tidak bersahabat dan terseret menuju pelabuhan Jepang agar diperlakukan secara manusiawi (Hiroshi, 2012: 341).

Kemudian Perry mencatatkan bahwa saat ini kapal uap Amerika mampu mencapai Jepang dalam waktu delapan belas sampai dua puluh hari.

Oleh karena itu, dengan semakin dekatnya jarak diantara Amerika Serikat dan Jepang, maka Presiden kami menginginkan untuk bersahabat dan hidup dalam damai dengan Baginda Kaisar, tetapi tidak akan ada

persahabatan yang bertahan lama jika Jepang tetap bersikap kepada Amerika seolah-olah mereka adalah musuh.

Meskipun pada dasarnya hal ini merupakan suatu kebijakan yang sangat bijak, tetapi sekarang hal ini merupakan hal yang tidak bijak dan tidak dapat dilakukan karena hubungan diantara kedua negara saat ini sudah lebih mudah dan lebih cepat daripada sebelumnya.

Yang bertanda tangan dibawah ini memberikan semua argumen yang ada dengan harapan agar pemerintahan Jepang dapat melihat perlunya menghilangkan bentrokan yang tidak bersahabat diantara kedua negara dan merespon dengan baik usulan untuk berhubungan baik dari kami yang dibuat dengan penuh ketulusan (Beasley, dalam Hiroshi, 2012: 341).

Surat tersebut mempertanyakan rasa kemanusiaan (*jin*) yang dimiliki Jepang. Banyaknya awak kapal Amerika Serikat yang mendapat perlakuan kasar saat kapal-kapal mereka terdampar di pelabuhan Jepang, memunculkan suatu anggapan bahwa rasa kemanusiaan yang dimiliki Jepang rendah. Pendapat Amerika Serikat memang beralasan dan hal ini diakui oleh para pembuat kebijakan yang sangat berpengaruh dalam birokrasi Shogun. Dalam hal ini, Amerika Serikat berhasil membuat bakufu mempertimbangkan keinginannya (Hiroshi, 2012: 341-342).

Setelah mengetahui isi surat dari presiden Fillmore dan Commodore Perry, muncul komentar-komentar dari pejabat Shogun. Komentar-komentar yang muncul berkaitan dengan Jepang akan mengabdikan atau menolak keinginan Amerika Serikat. Peringatan-peringatan yang sebelumnya telah diungkapkan oleh beberapa intelektual berubah jadi nyata. Keraguan yang diam-diam disembunyikan para intelektual sekarang disuarakan dengan lantang oleh daimyo.

Saito Setsudo (1797-1865), merupakan penulis kebijakan agresif tanpa kompromi dalam pertahanan laut (*Kaiboron*) berpendapat, “karena permintaan mereka mengenai hubungan baik dan persahabatan dibuat atas dasar niat baik maka kita tidak seharusnya menolak mereka” (Setsudo, dalam Hiroshi, 2012: 343). Sangatlah wajar jika Amerika Serikat menunjukkan ketidakpuasan terhadap perlakuan Jepang sebelumnya terhadap warga Amerika Serikat yang terdampar sebagai tawanan, karena “meskipun wilayah nasional kita berbeda, semua manusia

hidup di antara bumi dan surga yang sama, dan untuk mengasihani mereka yang sedang dalam masalah menjadi asas yang paling dasar mengenai bumi dan surga” (Hiroshi, 2012: 343).

Otsuki Kiyotaka (1801-1878), seorang samurai dari Sendai, menyarankan untuk mendekati Amerika Serikat dengan doktrin untuk saling tidak mencampuri urusan masing-masing.

Negaramu yang terhormat telah menjalankan konstitusi yang ditetapkan oleh Washington selama beberapa generasi, sama halnya dengan kami yang memelihara adat kebiasaan yang dimiliki nenek moyang kami. Bukankah inti dari negara yang merdeka adalah agar mereka mampu memiliki hukum mereka sendiri dan tidak meninggalkan konstitusi mereka? (Hiroshi, 2012: 344).

Kiyokata juga mengakui bahwa sebuah tindakan keras untuk mengusir kapal yang sedang dalam masalah pada dasarnya merupakan sebuah tindakan yang melanggar Jalan kemanusiaan dan kasih sayang.

Menurut salah satu catatan yang ada, Hayashi Fukusai (1801-1859), merupakan rektor dari akademi Shoheiko dan juga salah seorang yang ikut berpartisipasi dalam negosiasi dengan Perry. Sebelum pertemuan berlangsung, Fukusai berkata dengan sombong bahwa orang-orang Amerika Serikat hanyalah bar-bar, perusuh, dan tidak ada alasan untuk memberikan perhatian kita pada mereka. Kenyataannya yang terjadi setelah pertemuan pertama dengan Perry, Fukusai dikuasai oleh perasaan pengecut dan mulai berkata bahwa ada alasan yang cukup kuat dibalik semua argumen Amerika Serikat, dan jika kita tidak mengikutinya maka akan berujung pada konsekuensi yang serius. Seorang pemegang teguh Neo-Konfusian seperti Fukusai tidak akan begitu saja mengakui alasan dari keadaan lawan hanya karena kepengecutannya, sebab reaksi dari Fukusai yang terlihat saat itu sangat sungguh-sungguh dan sepenuh hati (Morotada, dalam Hiroshi, 2012: 344).

Selama kehadiran Perry di Jepang, Tokugawa Ieyoshi (1793-1853) yang saat itu menjadi Shogun ke 12 (1837-1853) jatuh sakit. Setelah Perry bersama 4 kapal hitamnya meninggalkan teluk Edo, Tokugawa Ieyoshi meninggal dan kemudian

digantikan oleh putranya yang bernama Tokugawa Iesada (1824-1858). Iesada menjadi Shogun ke 13 (1853-1858) saat usianya 29 tahun. Shogun ke 13 memiliki kekuatan karakter dan pengetahuan tentang dunia yang tidak begitu baik, sehingga tidak ada persiapan yang baik dan matang saat harus menghadapi tekanan dari bangsa Barat (Satow, 1921: 44; Swandana, 2009: 152).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tujuan Amerika Serikat ingin mengadakan hubungan dengan Jepang ialah, (1) untuk memperoleh perlindungan bagi awak kapal Amerika Serikat yang mengalami kecelakaan di laut dan mendapat perlakuan kasar dari pemerintah Jepang; (2) untuk membuka beberapa pelabuhan di Jepang yang dapat dijadikan sebagai tempat peristirahatan kapal-kapal Amerika Serikat dalam mengisi perbekalan dan bahan bakar (batu bara); (3) untuk kepentingan perdagangan. Kedatangan Commodore Perry dengan 4 kapal perangnya mampu menimbulkan kesan yang sangat berarti, baik bagi masyarakat Jepang maupun bakufu. Selain itu, surat yang ditulis oleh Presiden Amerika Serikat dan Comodore Perry juga mampu menimbulkan perdebatan politik yang cukup hangat. Keinginan yang ingin diwujudkan oleh Amerika Serikat cukup dipertimbangkan oleh Jepang saat itu.

Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa usaha bangsa Barat untuk dapat membuka negara Jepang dan menghentikan politik isolasi yang dijalankannya menjadi sebuah ajang kompetisi. Dikatakan demikian sebab, semuanya berlomba-lomba untuk memenangkan misi masing-masing negara dengan berbagai cara yang dilakukan. Negara-negara di Eropa seperti Inggris dan Perancis yang berulang kali mencoba membuka Jepang namun gagal memutuskan untuk menunggu kesempatan yang tepat ketika tersiar kabar tentang keinginan Amerika Serikat yang mengirim pasukannya pada tahun 1853. Berbeda dengan Inggris dan Perancis, Rusia lebih memilih untuk mengirim pasukannya juga ketika mendengar kabar dikirimnya Commodore Perry ke Jepang. Alasan Rusia memilih untuk mengirim pasukannya ke Jepang karena persaingan perdagangan dengan Amerika Serikat di pesisir Pasifik.

5.5 Perjanjian Kanagawa 1854-1856

Satu bulan setelah Perry meninggalkan Jepang, armada Rusia berlabuh di Nagasaki. Commodore Perry mendengar berita jika bangsa Barat lainnya menyiapkan armada menuju perairan Jepang. Mendengar berita tersebut Perry merasa khawatir akan didahului oleh Rusia maupun Perancis jika tidak segera kembali ke Jepang sebab Tokugawa Iesada mulai menyadari jika kebijakan politik isolasi sangat sulit untuk dipertahankan. Perry yang saat itu berada di kepulauan Ryukyu mempercepat pelayarannya untuk kembali ke Edo (Lan, 1962: 126).

Kabar mengenai misi yang dilakukan oleh Commodore Perry berpotensi memberikan tantangan lain bagi posisi Rusia di kawasan Samudera Pasifik. Sebelumnya, Rusia telah mengklaim bahwa wilayah Amur ke perbatasan Korea serta Sakhalin merupakan wilayahnya. Rusia berusaha menguasai Sakhalin karena dapat mengembangkan perdagangannya di Korea dan Jepang. Setelah itu, wilayah Amur yang menjadi perbatasan antara Rusia dan China, wilayah Ussuri, dan pelabuhan Vladivostok berhasil dikuasai Rusia. Perdagangan Rusia yang semakin luas akhirnya mendorong Rusia untuk mengirim utusannya ke Jepang dan yang menerima tugas ini adalah Laksamana Putiatin. Perancis saat itu juga tengah mengirim utusannya ke Jepang (Beasley dalam Marius, 2008: 267).

Lakasamana Putiatin berangkat dari Eropa dengan membawa 4 kapal perangnya dan tiba di Nagasaki pada bulan Agustus 1853. Kedatangan Laksamana Putiatin ke Nagasaki menginginkan pembukaan pelabuhan-pelabuhan di Jepang untuk perdagangan dan penetapan perbatasan di pulau Sakhalin dan kepulauan Kuril. Keinginan yang sudah disampaikan Laksamana Putiatin ternyata tidak mendapat respon dari bakufu, sehingga Laksamana Putiatin memutuskan untuk kembali ke negaranya (Beasley dalam Marius, 2008: 267; Suradjaja, 1984: 17).

Sebelum Perry datang, di dalam bakufu timbul perdebatan yang keras. Diantara para daimyo ada dua aliran yang membagi mereka ke dalam 2 partai. Partai pertama menyuarakan *Joi* atau “usir orang-orang asing” yang dipimpin oleh Tokgawa Nariaki yang merupakan daimyo dari Mito dan masih keturunan Tokugawa Mitsukuni. Partai

tersebut juga menghendaki pengembalian kekuasaan kepada Kaisar. Nariaki berpendapat bahwa tuntutan yang menghina dari orang asing harus ditolak jika perlu dengan perang. Jawaban untuk menerima tuntutan Amerika menurutnya dapat menodai kehormatan nasional dan meginjak harga diri bakufu di dalam negeri. Partai kedua dipimpin oleh Li Naosuke yang berasal dari Hikone lebih melihat pada kenyataan yang ada dan menurut partai ke 2, berkompromi dengan orang asing itu wajar mengingat kelemahan Jepang dalam bidang militer. Li Naosuke mengajarkan untuk melakukan politik *Kaikoku* atau membuka negeri (Dasuki, 1963b: 7; Beasley, 2003: 241-242).

Commodore Perry tiba di Edo kedua kalinya pada tanggal 13 Februari 1854 untuk menerima jawaban dari Jepang dengan membawa kapal yang lebih banyak yakni 8 kapal. Kali ini Perry tidak ingin berkompromi lagi dengan Jepang dan tidak segan-segan untuk menggunakan kekerasan. Perry hanya menginginkan pembukaan pelabuhan bukan perdagangan. Negosiator Jepang yang menghadapi Perry mendapat perintah dari bakufu untuk terlebih dahulu tidak membuka hubungan perdagangan tetapi untuk menghindari permusuhan (Beasley dalam Marius, 2008: 269).

Melihat situasi dan kondisi yang sudah tidak memungkinkan lagi, Abe Masahiro yang merupakan anggota senior dewan Tokugawa memutuskan untuk menerima sebagian usul-usul yang diajukan Perry. Abe Masahiro merupakan seseorang yang memiliki keterampilan politik yang cukup baik. Perjanjian akhirnya dilakukan oleh bakufu dengan Amerika pada tanggal 31 Maret 1854. Perjanjian ini dikenal dengan perjanjian Kanagawa (Lampiran B; hal 125) karena dilakukan di kampung nelayan Kanagawa (sekarang Yokohama) (Beasley, 2003: 242). Berikut ini adalah isi perjanjian Kanagawa dalam versi bahasa Indonesia yang terdiri dari 12 pasal diantaranya ialah sebagai berikut.

“Pasal I: Harus ada kedamaian yang sempurna, permanen dan universal, dan persahabatan yang tulus dan ramah, antara Amerika Serikat di satu pihak, dan Kekaisaran Jepang di pihak lain, serta di antara rakyat kedua negara, tanpa pengecualian dari perorangan atau tempat.

Pasal II: Pelabuhan Shimoda di Izu dan pelabuhan Hakodate di Matsumi, agar dibuka oleh Jepang sebagai pelabuhan persinggahan kapal-kapal Amerika Serikat, dimana mereka dapat mengambil persediaan kayu, air, perbekalan, batu bara dan barang-barang dagangan lainnya yang diinginkan Amerika Serikat.

Pasal III: Apabila kapal Amerika Serikat kandas atau terdampar, di pantai Jepang, kapal Jepang diharapkan untuk membantu mereka dan membawa awak kapal mereka ke Shimoda atau Hakodate.

Pasal IV: Orang-orang yang terdampar selain warga dari Amerika Serikat akan bebas seperti di negara-negara lain dan tidak dikenakan kurungan, tetapi harus setuju untuk menaati peraturan yang adil.

Pasal V: Orang yang terdampar dan orang selain warga Amerika Serikat, untuk sementara bisa tinggal di Shimoda dan Hakodate, tidak akan tunduk pada pembatasan. Belanda dan Cina yang berada di Nagasaki dibebaskan untuk pergi ke Simoda dan untuk pergi ke mana saja yang mereka inginkan dalam batas tujuh mil dari sebuah pulau kecil di pelabuhan Simoda, ditandai pada tabel yang terlampir dalam Perjanjian yang ditambahkan; dan akan membebaskan siapa saja yang ingin perlabuh di Hakodate, dalam batas-batas yang akan ditentukan setelah skuadron Amerika Serikat ke tempat tersebut.

Pasal VI: Jika ada semacam keinginan untuk mendapatkan barang atau usaha akan perlu sebuah peraturan. Harus ada musyawarah antara kedua pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pasal VII: Hal ini disepakati bahwa kapal-kapal dari Amerika Serikat dapat berlabuh ke dermaga yang mereka inginkan. Harus diijinkan untuk pertukaran emas, koin perak dan barang satu dengan barang yang lain di bawah peraturan seperti yang ditetapkan sementara oleh pemerintah Jepang untuk tujuan itu. Hal ini menetapkan, bahwa kapal-kapal dari Amerika Serikat akan diizinkan untuk membawa pergi apapun barang-barang yang mereka tidak mau untuk ditukarkan.

Pasal VIII: Kayu, air, batu bara dan barang yang dibutuhkan hanya dapat diperoleh melalui perwakilan perwira Jepang yang ditunjuk untuk itu, dan tidak ada cara lain.

Pasal IX: Telah disetujui bahwa di masa depan pemerintah Jepang akan memberikan hibah kepada bangsa lain sebuah hak istimewa dan keuntungan yang di sini tidak diberikan kepada Amerika Serikat dan warganya. Bahwa hak istimewa dan keuntungan juga harus diberikan ke Amerika Serikat dan warganya tanpa ada konsultasi atau penundaan.

Pasal X: Kapal dari Amerika Serikat akan diizinkan untuk menggunakan pelabuhan lain di Jepang tetapi pelabuhan Simoda dan Hakodate, digunakan untuk kapal berlabuh yang sedang dalam kesulitan atau cuaca buruk.

Pasal XI: Akan diangkat oleh pemerintah konsulat Amerika Serikat atau perwakilan untuk berada di Simoda setiap saat setelah berakhirnya delapan belas bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa salah satu dari kedua pemerintah (Amerika Serikat dan Jepang) menganggap pengaturan tersebut digunakan.

Pasal XII: Konvensi ini, yang telah disimpulkan dan ditandatangani, harus wajib, dan setia ditaati oleh Amerika Serikat dan warga Jepang. Masing-masing kekuatan itu harus disahkan dan disetujui oleh Presiden Amerika Serikat, dengan persetujuan dari Senat yang berdaulat pada bulan Agustus untuk Jepang. Pengesahan akan ditukarkan dalam waktu delapan belas bulan sejak tanggal penandatanganan, oleh karena itu jika lebih cepat maka akan lebih baik” (Hadayani dan Gema, 2014: 75-78).

Pemikiran bakufu saat itu adalah jika pembukaan terhadap bangsa Barat tidak bisa dihindari, maka akan lebih baik untuk menegosiasikannya pertama dengan Amerika Serikat daripada dengan Inggris. Hal ini karena Nakahama Manjiro, seorang nelayan Jepang yang diselamatkan dari kecelakaan kapal oleh seorang penangkap ikan paus Amerika Serikat. Nakahama tinggal di Amerika Serikat untuk beberapa waktu, di mana ia dikenal sebagai John Manjiro, dan menjadi lancar berbahasa Inggris. Nakahama telah kembali ke Jepang dan dipekerjakan dalam pemerintahan Shogun sebagai seorang ahli masalah-masalah yang menyangkut Amerika Serikat. Nakahama menjelaskan bahwa “Amerika Serikat adalah negara muda yang memenangkan kemerdekaannya dari Inggris melalui perang. Rakyat Amerika Serikat memilih presiden mereka melalui pemilihan. Masyarakatnya setara dan presiden yang terpilih berjalan keliling kota tanpa penjaga, dan orang mengikutsertakannya dalam percakapan yang ramah” (Tsunenari, 2009: 132). Uraian Nakahama tentang pemerintahan Amerika Serikat dan masyarakatnya meninggalkan kesan baik pada para pejabat-pejabat Shogun. Ini menjadi bahan pertimbangan tersendiri bagi Jepang dalam membuka hubungan dengan Amerika Serikat.

Alasan lain yang sesungguhnya kenapa bakufu lebih suka orang Amerika Serikat daripada Inggris ialah, karena pada kenyataannya Amerika Serikat tidak terlibat dalam perdagangan opium. Bakufu mengetahui bahwa dalam perjanjian yang ditanda tangani Amerika Serikat dengan China ada sebuah bagian dalam perjanjian

yang menyatakan bahwa Amerika Serikat berjanji untuk tidak mengekspor atau menyelundupkan opium (Tsunenari, 2009: 132-133). Jepang menggunakan kejadian-kejadian sebelumnya sebagai referensi ketika mereka menegosiasikan perjanjian persahabatan dengan Amerika Serikat. Kekuatan negara-negara Eropa menyetujui untuk mengikuti contoh yang diberikan oleh Amerika Serikat. Dalam hal ini Shogun berhasil mencegah opium masuk ke tanah Jepang

Setelah melakukan perjanjian dengan Amerika Serikat, perjanjian sejenis juga dilakukan oleh bakufu dengan Inggris, Rusia dan Belanda. Perjanjian antara bakufu dengan Inggris saat itu diwakili oleh Laksamana Sir James Stirling terjadi pada tanggal 14 Oktober 1854 di Nagasaki. Perjanjian ini mengakibatkan kapal-kapal Inggris diperbolehkan berlabuh di Nagasaki dan Hakodate. Inggris berusaha membuka hubungan dengan Jepang untuk dijadikan sebagai tempat operasi angkatan laut guna kepentingan perang Krimea (1853-1856) (Suradjaja, 1984: 18; Beasley dalam Marius, 2008: 270-271). Perang Krimea merupakan perang pertempuran yang terjadi antara kekaisaran Rusia melawan sekutu yang terdiri dari Perancis, Britania Raya (Inggris), Kerajaan Sardinia, dan Kesultanan Utsmaniyah. Operasi angkatan laut ini berkaitan dengan perlindungan kapal-kapal Inggris dari serangan Rusia dan memburu kapal-kapal Putiatin.

Perjanjian dengan Rusia diwakili oleh Laksamana Putiatin berhasil ditandatangani pada tanggal 17 Februari 1855 di Shimoda. Sebenarnya usaha Putiatin untuk membuka hubungan dengan Jepang sudah dilakukan pada tahun 1854, namun karena disibukkan dengan perang Krimea mengakibatkan Putiatin baru berhasil menyelesaikan misinya pada tahun 1855. Tidak jauh beda dengan apa yang didapat Inggris, Rusia berhasil mendapatkan ijin untuk berlabuh di Nagasaki, Shimoda, dan Hakodate. Kepulauan Kuril dibagi untuk negara Jepang dan Rusia serta mendapat keputusan mengenai batasan dari wilayah Sakhalin. (Suradjaja, 1984: 19; Beasley dalam Marius, 2008: 271).

Belanda berhasil mendapatkan perjanjian dengan Jepang pada bulan Januari 1856. Perjanjian tersebut dilakukan oleh perwakilan Belanda yang ada di Nagasaki

yakni Donker Curtius (Beasley dalam Marius, 2008: 275; Beasley, 2003: 242-243). Perjanjian ini menghasilkan relaksasi pembatasan pribadi terhadap warga negara Belanda yang ada di Jepang. Pedagang Belanda juga mendapatkan persyaratan yang lebih baik bagi perdagangan mereka di Nagasaki.

Dengan demikian perjanjian Kanagawa yang terjadi pada tanggal 31 Maret 1854 menjadi tanda awal dibukanya Jepang terhadap Amerika Serikat. Perjanjian Kanagawa yang berhasil dilakukan Amerika Serikat kemudian diikuti oleh negara Inggris, Rusia, dan Belanda. Alasan Keshogunan Tokugawa memilih mengadakan hubungan dengan Amerika Serikat terlebih dahulu karena, (1) adanya kesan baik yang disampaikan Nakahama terhadap negara Amerika Serikat kepada bakufu; dan (2) Amerika Serikat menjadi negara yang tidak terlibat dalam perdagangan opium di China.

5.6 Perjanjian Persahabatan dan Perdagangan 1858

Setelah perjanjian Kanagawa berhasil disetujui dan ditandatangani, pada tanggal 21 Agustus 1856 Townsend Harris yang sebenarnya merupakan saudagar di New York kemudian diangkat untuk menjadi Konsul Jenderal yang pertama dari Amerika Serikat tiba di Shimoda. Harris mempunyai pengalaman dengan dunia Timur karena sebelumnya dia telah berhasil membuat suatu persetujuan antara Amerika Serikat dengan Siam (Lan, 1962: 128). Harris tiba di Jepang dengan kondisi yang berbeda dengan Perry yang ditunjang dengan kapal-kapal bertenaga uap. Tugas dari Harris adalah membuat suatu persetujuan dagang yang lengkap dan lebih baik dari perjanjian kanagawa yang telah dilakukan oleh Perry secara terburu-buru.

Pada awal kedatangannya, Harris menjadi orang yang tidak dikehendaki keberadaannya oleh masyarakat Jepang yang masih belum berkenan dengan adanya perdagangan serta konsultan asing. Meskipun Harris menerima perlakuan tidak baik dari masyarakat Jepang, dia secara perlahan mampu membangun kepercayaan masyarakat Jepang melalui sifat bijaksana, sabar, dan jujurnya. Keberadaan Harris di Jepang selama 18 bulan tanpa adanya komunikasi dari Departemen Luar Negeri di

Amerika Serikat, memberikan dampak positif baginya. Harris adalah orang pertama yang dipercaya oleh Shogun sejak tahun 1613. Setelah itu, dengan sabar Harris mengajarkan prinsip-prinsip aturan hubungan internasional dengan bangsa Barat. Keteguhan usaha yang dilakukan Harris berhasil memenangkan posisinya di teritorial Jepang. Tercatat sedikit dari perwakilan bangsa Barat yang berhasil menaklukkan Jepang (Bain, 1962: 69).

Menjelang akhir tahun 1856 ketika perang Krimea usai, persetujuan bersenjata baru yang dipicu oleh perselisihan di bidang perdagangan pecah antara China di satu pihak dan Inggris serta Perancis di pihak lain. Canton berhasil direbut oleh kekuatan besar Inggris dan Perancis. Mendengar kabar tersebut, wakil dari Belanda di Nagasaki yakni Curtius menerangkan sejelas-jelasnya kepada bakufu bahwa jika pasukan Inggris dan Perancis berhasil melakukan tindakan tersebut di China maka, tidak diragukan lagi hal yang sama akan digunakan untuk memenuhi tuntutan hak-hak dagang mereka di Jepang (Beasley, 2003: 243). Jika nanti hal itu terjadi maka bakufu tidak akan mampu memberikan perlawanan yang efektif, oleh karena itu harapan satu-satunya yang dapat dilakukan bakufu untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan melakukan perjanjian perdagangan dengan negara-negara yang tidak banyak menuntut. Perjanjian yang sudah dibuat nantinya dapat dijadikan sebagai model untuk membuat perjanjian-perjanjian berikutnya dengan negara lain.

Dewan bakufu yang saat itu berada di bawah pimpinan Hotta Masayoshi mengakui bahwa argumen ini masuk akal, namun mereka tidak langsung memberi jawaban atas solusi yang diberikan Curtius. Kemudian pada tanggal 21 september 1857 Putiatin kembali datang ke Edo. Putiatin menyuarakan pendapatnya untuk mendukung Curtius agar bakufu setuju untuk melakukan perjanjian perdagangan. Pada 16 Oktober 1857 bakufu menandatangani perjanjian dagang dengan Belanda dan Rusia. Dengan demikian, peraturan lama yang berlaku bagi perdagangan di Nagasaki telah dihapus namun, tarif bea cukai yang tinggi tetap dipertahankan dan bakufu masih memiliki hak untuk ikut campur. Harris yang mengetahui peristiwa

tersebut tidak dapat menerima apa yang ada dalam perjanjian tersebut, oleh karena itu ia mengusulkan perundingan yang menghasilkan rumusan perjanjian lain (Beasley, 2003: 243-244).

Harris kemudian pergi ke Edo pada 30 November 1857, seminggu kemudian ia menyerahkan atas surat presiden untuk Hotta di hadapan Shogun. Pada 12 Desember 1857, secara resmi Harris bertemu dengan penasihat senior keshogunan, Hotta Masayoshi (1810-1864) yang menggantikan posisi Abe Masahiro pada akhir tahun 1855 (Beasley dalam Marius, 2008: 278). Harris dalam hal ini berusaha membukan jalan bagi pembahasan diplomatik dan memperdebatkan mengenai perjanjian dagang yang akan dibuat. Menurut catatan Jepang, dinyatakan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki keinginan untuk mencari jajahan baru ataupun memperluas wilayahnya dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Tetapi dengan penemuan-penemuan seperti kapal uap dan telegraf, dunia telah mulai mendekat menjadi satu, dan bangsa-bangsa Barat ingin agar semua bangsa dan negara dapat berkumpul menjadi sebuah keluarga, sebuah tujuan yang sangat cocok untuk kapal uap. Harris juga mengatakan bahwa:

apa yang kita anggap sebagai perdagangan mungkin terlihat terbatas pada barang-barang fisik, tetapi sebenarnya tidak; saling membagi penemuan-penemuan baru untuk keuntungan masing-masing negara, adalah aspek lain dari perdagangan dan perniagaan. Dalam dunia saat ini, setiap negara sedang berusaha untuk bersatu dengan negara lain untuk saling bersahabat (Hiroshi, 2012: 345).

Sebuah negara yang menutup dirinya dan menolak untuk berinteraksi dengan negara lain akan menghalangi persatuan dunia yang mereka ingin capai, sebuah halangan haruslah disingkirkan. Tidak ada pemerintahan manapun yang berhak untuk menolak untuk berpartisipasi dalam penyatuan ini. Jadi, Jepang harusnya menerima untuk saling menempatkan menteri atau wakil dari negara masing-masing pada masing-masing ibukota dan juga kebebasan untuk berdagang dengan negara lain.

Berbagai macam keuntungan dan manfaat yang akan dirasakan Jepang juga diutarakan Harris jika mereka menandatangani perjanjian perdagangan, namun ada

juga kerugian yang akan terjadi apabila perjanjian seperti ini ditolak (Hiroshi, 2012: 345). Dalam sudut pandang orang Jepang, makna sesungguhnya dari argumen-argumen Harris adalah tentang prinsip-prinsip global yang berusaha diwujudkan oleh Amerika Serikat. Harris berusaha meyakinkan Jepang untuk melanjutkan tugas Perry yang sebelumnya telah berhasil membujuknya dalam perjanjian Kanagawa.

Terjadi perbedaan pendapat dalam bakufu, beberapa ada yang menerima, namun ada juga yang mencoba menolaknya dan menganggap tantangan itu sebagai suatu hal yang munafik. Penolakan yang terjadi untuk menerima rancangan dari Harris sama seperti yang diberikan kepada Perry. Setelah memeriksa satu persatu presentasi Harris, para pejabat keshogunan yang bertanggung jawab atas pertahanan pesisir (pendahulu dari apa yang sekarang disebut Kementerian Urusan Asing) mencatat bahwa Amerika Serikat menguasai California sebagai hasil perangnya melawan Meksiko, dan sepertinya Amerika Serikat tidak segan untuk menggunakan angkatan bersenjata dalam menaklukkan negara yang mencoba mempertahankan institusi nasionalnya (*sakoku*) melawan persatuan yang diklaim Harris sebagai tujuan yang ingin diraih oleh bangsa Barat. Hal ini tidak ada bedanya dengan Perry yang tidak segan untuk menggunakan paksaan apabila Jepang menolak menandatangani sebuah perjanjian (Hiroshi, 2012: 345).

Pernyataan yang sama juga diungkapkan Sakuma Shōzan (1811-1864), seorang penasihat dari daimyo yang sangat berpengaruh yaitu Sanada Yukitsura. Sakuma Shōzan berargumen bahwa Harris harus ditanya dengan pertanyaan berikut.

Diantara negara-negara Barat, apakah keinginan untuk menyatukan dunia sebagai satu keluarga yang besar ini datang dari prinsip persamaan untuk semua diantara surga dan bumi, dan dari harapan yang kuat akan cinta dan memelihara semua manusia, tanpa membedakan bangsa, dan untuk mendukung adanya pertukaran yang saling menguntungkan; ataukah persatuan ini muncul atas dasar keserakahan dan ketamakan, dimana setiap negara mengejar kepentingan individu masing-masing dan mencoba meraup untuk sebanyak mungkin dari dunia? (Shōzan, dalam Hiroshi, 2012: 345-346).

Harris menjawab dengan pasti bahwa hal itu datang dari prinsip persamaan untuk semua di antara surga dan bumi. Jawaban Harris tidak sepenuhnya bisa diterima oleh mereka yang tidak menyukai orang asing. Jawaban yang dikemukakan Harris dianggap munafik, tetapi meskipun jika benar itu munafik, tidak berarti tujuan untuk menyatukan dunia itu salah. Sakuma sendiri dari awal tidak menginginkan Jepang untuk menutup diri dari bangsa lain. Jepang harus bisa mengambil tempat di dunia ini dan mempertahankan posisinya. Untuk melakukannya, Jepang perlu mempelajari keadaan negara-negara lain, mendapatkan pengetahuan baru dari negara-negara lain dan memperbesar kekuatan angkatan senjatanya (Hiroshi, 2012: 345-346; Lan, 1962: 118).

Kurushima Michitane (1829-1859), seorang damyo di wilayah Mori di Bungo (yang sekarang dikenal dengan prefektur Oita) berpendapat bahwa “keinginan dari surga” (*ten'i*) dan “asas-asas kesurgaan” (*tenri*) dapat ditemukan di tempat lain.

Negara mereka sangat bangga dengan kekuatan dan kemakmurannya dan menganggap bahwa jika kita menjalin hubungan persahabatan dan perdagangan dengan mereka maka akan dapat sangat menguntungkan kita berdua (Jepang dan Amerika Serikat). Tetapi negara kami telah menjaga jalan kami yang cinta damai dan sederhana sesuai dengan hukum leluhur kami. Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap penguasa daerah besar ataupun kecil memiliki tanggung jawab untuk menjamin warganya untuk hidup dengan damai, tidak terganggu oleh bencana yang tak terduga. Orang-orang tidak seharusnya menuruti nafsu mereka, tapi seharusnya mereka mengandalkan prinsip-prinsip dasar surgawi. Itulah yang dimaksud dengan mengikuti keinginan surga (Hiroshi, 2012: 346).

Menurut Kurushima, kita tidak seharusnya digerakkan oleh nafsu untuk mengejar kekuasaan dan kesejahteraan. Jika setiap negara mengamalkan jalan yang cinta damai dan sederhana, maka semuanya pasti baik-baik saja. Jalan hidup yang benar-benar beradab, keinginan surga, adalah tugas setiap negara untuk memenuhinya, dalam keterasingan, sebuah keberadaan yang penuh kedamaian dan kesederhanaan.

Disisi lain, Ii Naosuke (1815-1860), yang nantinya akan ditunjuk sebagai *tair* (penasihat agung atau wali raja) menyatakan, “Perdagangan memang dilarang oleh negara kita, tapi waktu telah berubah dan masa lalu dan masa sekarang juga berbeda;

berpartisipasi dalam pertukaran ini sejalan dengan Jalan surga dan bumi” (Hiroshi, 2012: 347). Ini merupakan sebuah usulan untuk Jalan yang lain. Li berencana untuk membuat kapal-kapal uap baru, tentara-tentara yang tangguh, dan mengirim kapal perdagangan dari Jepang. Menurut Li cara agar Jepang mampu bertahan terhadap kekuatan militer bangsa Barat adalah dengan mengembangkan angkatan bersenjata yang mereka miliki. Untuk dapat mengembangkan hal tersebut, Jepang harus mempelajari semuanya dari bangsa Barat (Beasley dalam Marius, 2008: 274).

Pada akhir musim gugur 1857, Matsudaira Yoshinaga (1828-90), daimyo dari Fukui juga membuat usulan yang hampir sama.

Di masa perkembangan saat ini, menurut saya semua orang yang dapat melihat pun seharusnya tahu bahwa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan kebijakan pemisahan diri ini. Karena telah tiba waktunya bagi kita untuk membuat rencana untuk mengirimkan kapal-kapal kita dan berdagang dengan negara lain, seharusnya tidak ada alasan bagi kita untuk menolak mereka yang datang kepada kita dengan permintaan yang masuk akal [untuk berhubungan dagang]. Perihal permasalahan [penempatan] menteri-menteri, hal yang sama seharusnya berlaku juga (Hiroshi, 2012: 347).

Yoshinaga memimpikan orang-orang Jepang.

Di masa depan menguasai administrasi perdagangan, maju dalam ilmu perdagangan internasional, terlibat dalam kegiatan tukar-menukar, dan dengan memanfaatkan keuntungan geografisnya dapat membuat Jepang sebagai negara termakmur di muka bumi (Hiroshi, 2012: 347).

Yoshinaga tidak hanya mengakui bahwa permintaan Harris memiliki sisi yang benar, dia juga menyarankan Jepang untuk mengambil langkah yang sama dan bertujuan untuk merubah diri menjadi negara yang kaya dan.

Pencarian akan langkah yang benar telah memotivasi fase terbukanya negara Jepang yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Persahabatan dan Perdagangan diantara Amerika Serikat dan Kekaisaran Jepang pada tahun 1858. Terbukanya Jepang ini oleh para pendukung pengusiran orang bar-bar dianggap sebagai tindakan penyerahan diri Jepang terhadap ancaman dari kekuatan militer yang lebih superior. Menurut sudut pandang tertentu, Tokugawa telah memutuskan

secara bebas keputusan ini dengan dasar dari prinsip universal untuk membuka diri terhadap dunia Barat yang lebih modern (Hiroshi, 2012: 347-348).

Bakufu pada prinsipnya sekarang telah berkomitmen untuk membuka hubungan komersial dengan seluruh dunia. Beberapa hari kemudian Hotta menjelaskan bahwa ia bersedia melakukan negosiasi atas dasar apa yang telah diusulkan Harris. Harris kemudian mengajukan dua konsesi utama yang diinginkannya. Dua konsesi tersebut ialah hak bagi orang Amerika untuk perdagangan bebas di sejumlah pelabuhan Jepang, dan perwakilan diplomatik di ibukota Jepang (Beasley dalam Marius, 2008: 278-279).

Pada 16 Januari 1858 Hotta memberitahukan bahwa proposal dapat diterima sebagai titik awal untuk diskusi, meskipun dalam pandangan kelompok yang tidak menyukai orang asing, pelabuhan terbuka yang diajukan Harris menjadi kurang dipertimbangkan. Dilakukanlah negosiasi rinci yang dimulai dengan perwakilan Jepang, Inoue Kiyonao dan Iwase Tadanari. Harris mulai dengan membuat naskah perjanjian terlebih dahulu yang dirancang untuk membujuk Jepang dalam menerima norma-norma perilaku diplomatik dan ekonomi politik seperti yang dipahami di Barat. Ada perdebatan panjang tentang apakah utusan asing perlu berada di Edo bukannya Kanagawa. Ada juga argumen yang muncul tentang jumlah pelabuhan yang akan dibuka dan pedagang yang harus memiliki hak untuk hidup di kota-kota Edo dan Osaka (Beasley dalam Marius, 2008: 279).

Setelah melalui kesulitan-kesulitan yang ada, pada tanggal 26 Februari 1858 proposal untuk perjanjian telah disepakati dan siap untuk ditandatangani. Titik utamanya adalah bahwa Amerika Serikat mungkin bebas membeli dari Jepang dan menjual kepada mereka setiap barang yang baik untuk dijual, tanpa adanya intervensi dari pejabat Jepang. Untuk tujuan ini, pelabuhan-pelabuhan selain Shimoda dan Hakodate harus dibuka. Pelabuhan tersebut ialah di Kanagawa (Yokohama) dan Nagasaki sejak tanggal 4 Juli 1859, Niigata mulai 1 Januari 1860, dan Hyogo (Kobe) dari tanggal 1 Januari 1863. Perdagangan Edo dan Osaka diizinkan masing-masing mulai 1 Januari 1862 dan 1 Januari 1863. Sebuah Agen diplomatik Amerika Serikat

untuk tinggal di Edo dan konsul di semua pelabuhan terbuka. Warga Amerika Serikat yang melakukan tindakan pelanggaran hukum di Jepang harus tunduk pada hukum Amerika Serikat yang diberikan melalui pengadilan konsuler baik pidana maupun perdata. Mengenai peraturan perdagangan, terlampir dalam perjanjian. Disediakan tarif 5 persen untuk ekspor Jepang dan tarif dasar untuk impor, dimana persediaan untuk kapal serta sutra mentah akan membayar 5 persen, dan sebagian besar barang-barang lainnya akan membayar 20 persen. Opium dilarang, kecuali dalam jumlah kecil untuk penggunaan medis (Beasley dalam Marius, 2008: 280; Beasley, 2003: 244).

Muncul permasalahan lain setelah rancangan perjanjian yang telah dibuat Harris disetujui. Masalah yang terjadi tidak hanya sifat hubungan masa depan Jepang dengan Barat tetapi juga tingkat otoritas shogun dalam hubungan luar negeri. Sebelum meninggalkan Shimoda, Harris telah diperingatkan oleh penafsir seniornya di Jepang yakni Moriyama Takichiro (Einosuke) bahwa pendapat Edo tetap terpecah tentang pembukaan pelabuhan. Bahkan yang lebih menakutkan, sejumlah daimyo telah memprotes keputusan bakufu yang telah memberi kesempatan Harris dalam mempresentasikan usulannya. Hal ini tidak mengejutkan bagi Harris tetapi, berita tentang apa yang sedang dibahas selama bulan Januari dan Februari 1858 semakin meluas dan telah memunculkan banyak protes (Beasley dalam Marius, 2008: 281).

Hotta menyadari untuk mempertahankan martabat bakufu maka harus ada persetujuan dari istana Kaisar untuk menyetujui tindakan yang akan dilakukannya dan untuk membungkam kelompok-kelompok yang mengkritiknya (Lan, 1962: 129). Cara yang dilakukan Hotta adalah dengan menunda sementara penandatanganan perjanjian antara Jepang dan Amerika. Selama proses penundaan, Hotta berusaha mencari persetujuan dari pengadilan Kaisar dengan mengirim perwakilannya ke Kyoto.

Manabe kemudian dikirim ke Kyoto untuk membujuk Kaisar agar berkenan menyetujui perjanjian yang telah dibuat. Usaha yang dilakukan Manabe tidak berhasil sebab Kaisar menolak untuk menyetujui perjanjian tersebut pada tanggal 1 Juni 1858.

Kaisar yang memimpin saat itu adalah Kaisar Osahito atau yang lebih dikenal dengan nama Komei. Alasan Kaisar Komei tidak menyetujui perjanjian tersebut selain karena rasa tidak sukanya kepada bangsa Barat juga karena di pengaruhi oleh pejabat-pejabat yang berada di Istana Kyoto. Para pejabat istana tidak suka dengan kepemimpinan Shogun yang mengucilkan mereka dari kehidupan di luar istana Kaisar (Beasley, 2003: 248; Dasuki, 1963b: 9; Beasley dalam Marius, 2008: 282). Tidak adanya persetujuan dari Kaisar mengakibatkan bakufu mengambil tindakan sendiri. Shogun yang menandatangani perjanjian antara Jepang dan Amerika. Dari sinilah hubungan antara Kaisar dengan Shogun mulai buruk.

Bersamaan dengan permasalahan mengenai perjanjian yang diusulkan Harris, dalam politik Jepang muncul perselisihan mengenai calon pengganti dari Tokugawa Iesada yang sudah sakit-sakitan. Tokugawa Iesada kemudian meninggal tanpa memiliki keturunan. Muncul dua kandidat yang akan menggantikan kedudukan Tokugawa Iesada. Kandidat pertama, Tokugawa Iemochi (1846-1866) yang berasal dari keluarga Kii yang memiliki hubungan darah lebih dekat dengan Iesada dan didukung oleh Li Naosuke. Kandidat kedua ialah, Tokugawa Yoshinobu (Hitotsubashi Keiki) (1837-1913) yang merupakan putra dari Tokugawa Nariaki. Tokugawa Iemochi saat itu berusia 12 tahun sedangkan Keiki usianya sudah lebih dewasa dan memiliki kemampuan yang baik sehingga banyak yang mendukungnya untuk menggantikan Iesada (Satow, 1921: 46; Beasley dalam Marius, 2008: 282-283).

Permasalahan yang pelik benar-benar terjadi di Edo, oleh karena itu untuk mengatasinya Hotta Masayoshi diturunkan dari kedudukannya dan Li Naosuke diangkat sebagai wali raja (Tairo) pada tanggal 4 Juni 1858. Hotta diturunkan dari jabatannya, karena Li menyadari bahwa Hotta telah mendukung Tokugawa Nariaki. Pengangkatan dirinya sebagai wali raja dimanfaatkan oleh Li Naosuke untuk menjadikan Tokugawa Iemochi sebagai Shogun ke 14 (1858-1866) (Beasley dalam Marius, 2008: 283; Beasley, 2003: 245). Li Naosuke melakukan ini agar keinginannya dalam membuka hubungan dagang dengan bangsa Barat dapat terwujud

sebab, Tokugawa Iemochi yang usianya masih muda akan mudah untuk dipengaruhi. Jika Tokugawa Nariaki yang dari awal tidak menyukai bangsa Barat berhasil menjadikan puteranya sebagai Shogun, maka hal ini akan menjadi halangan yang berat bagi Naosuke.

Pada pekan-pekan berikutnya muncul kabar bahwa duta besar Inggris Lord Elgin dan rekannya dari Perancis yakni Baron Gros berhasil melakukan perjanjian dengan China di Tietsin. Perjanjian Tietsin berhasil mengabdikan tuntutan Inggris dan Perancis, kemudian mereka memutuskan untuk bertolak menuju Jepang. Berita ini kemudian sampai ke telinga Harris saat dirinya berada di Shimoda dan bergegas menuju Edo untuk menemui utusan Shogun. Harris menjelaskan dan meyakinkan bahwa bahaya yang pernah dikemukakannya akan menjadi kenyataan. Dewan tetua bersama Li Naosuke kemudian bermusyawarah dan dengan bujukan Harris akhirnya perjanjian Perdagangan dan Persahabatan antara Jepang dan Amerika Serikat (Lampiran C; hal 132) ditandatangani pada tanggal 29 Juli 1858 (Beasley, 2003: 245).

Pada tanggal 12 Agustus 1858, apa yang diceritakan Harris ternyata benar. Lord Elgin tiba di teluk Edo dengan membawa 1 buah kapal. Elgin kemudian meminjam sekertaris Harris untuk menjelaskan kepada dirinya mengenai perjanjian yang telah dibuat antara Jepang dan Amerika Serikat. Elgin juga menggunakan perjanjian tersebut untuk dijadikan contoh, tetapi dalam perjanjian yang dibuatnya ada tambahan pasal mengenai perlakuan yang sama terhadap semua negara yang berdagang dengan Jepang. Sewaktu Elgin tiba di Edo, Laksamana Putiatin dan Curtius sudah berada di Jepang untuk melakukan perjanjian yang sama. Selama 2 bulan perjanjian berhasil ditandatangani oleh Rusia, Belanda, Inggris dan Perancis. Belanda (*Treaty of Amity and Commerce between the Netherlands and Japan*) pada tanggal 18 Agustus 1858 dan Rusia (*Treaty of Amity and Commerce between Russia and Japan*) pada tanggal 19 Agustus 1858. Inggris (*Anglo-Japanese Treaty of Amity and Commerce*) pada tanggal 26 Agustus 1858 dan Perancis (*Treaty of Amity and Commerce between*

France and Japan) yang diwakili oleh Baron Gros pada tanggal 9 Oktober 1858 (Beasley dalam Marius, 2008: 283).

Secara garis besar, perjanjian persahabatan dan perdagangan antara Amerika Serikat dan Jepang pada tahun 1858 berisi: (1) dibukanya 4 pelabuhan untuk perdagangan diantaranya, Kanagawa, Nagasaki, Niigata, dan Kobe; (2) disediakan perwakilan diplomatik; (3) memberikan ekstrateritorial kepada warga Amerika Serikat baik perdata maupun pidana; (4) melarang perdagangan opium; (5) memberikan kebebasan beragama bagi warga Amerika Serikat ; (6) disediakan tarif lama namun memberikan kewenangan bagi produk Amerika Serikat ; (7) pertukaran bebas mata uang Jepang dengan mata uang asing; (8) perdagangan bebas dan kebebasan warga negara Amerika Serikat tinggal di Edo dan Osaka; (9) meneruskan pelayanan terhadap negara yang difavoritkan; serta (10) peninjauan kembali perjanjian setelah 4 Juli 1872 (Bain, 1962: 69-70; Dasuki, 1963b: 8). Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, Jepang telah membuka dirinya dan kelima negara tersebut mulai mengirimkan kapal-kapal dan duta besar dari masing-masing negara di beberapa wilayah Jepang. Li Naosuke dikatakan berhasil menghindari terjadinya permusuhan bahkan peperangan antara Jepang dengan bangsa Barat, namun setelah terjadinya perjanjian tersebut akan datang bahaya yang mengancam jiwanya.

Penolakan dari Kaisar mengakibatkan semua perjanjian yang dilakukan oleh Jepang dengan bangsa Barat ditandatangani oleh Shogun. Bangsa Barat tidak mengetahui bahwa Shogun bukanlah penguasa sebenarnya. Shogun yang disebut *tycoon* (taikun) oleh bangsa Barat dikira tenno atau Kaisar yang secara *de jure* merupakan penguasa tunggal di Jepang. Semua perjanjian yang telah ditandatangani secara tergesa-gesa tanpa meminta izin dari Kaisar, menjadi kesalahan besar bagi Shogun (Dasuki, 1963b: 7). Kesalahan ini nantinya dijadikan sebagai senjata yang ampuh bagi kelompok-kelompok anti Tokugawa untuk menggulingkan kedudukannya. Saat itu banyak pendapat yang menyatakan bahwa Shogun telah menyelamatkan posisinya sehingga berani mengumumkan kebijakan dibukanya

Jepang untuk kepentingan hubungan luar negeri pada tahun 1853. Pihak Shogun sendiri merasa bahwa keputusan yang diambil semata-mata merupakan tindakan perikemanusiaan untuk melindungi Jepang agar tidak terjadi konflik, sebab pihak Shogun menyadari akan kemajuan militer yang dimiliki bangsa Barat (Bain, 1962: 70).

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa keberhasilan Townsend Harris dalam memperkuat hubungan yang terjadi antara Jepang dan Amerika Serikat dibuktikan dengan adanya perjanjian Persahabatan dan Perdagangan pada tanggal 29 Juli 1858. Perjanjian Persahabatan dan Perdagangan yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Jepang kemudian diikuti oleh negara-negara lainnya seperti, Rusia, Inggris, Perancis dan Belanda. Dengan demikian Jepang semakin membuka lebar pintunya untuk bangsa Barat.

Secara keseluruhan baik perjanjian Kanagawa maupun perjanjian Persahabatan dan Perdagangan menjadi tanda resmi bahwa Jepang membuka diri terhadap bangsa Barat. Pembukaan negara yang dilakukan oleh bangsa Barat, dilakukan bakufu dalam situasi dan kondisi yang mendesak. Semua perjanjian yang dilakukan Tokugawa dengan bangsa Barat menjadi suatu kesalahan yang amat fatal, karena semua perjanjian tidak memperoleh izin dari Kaisar. Hal ini tentu menimbulkan kebencian bagi masyarakat Jepang khususnya para daimyo yang dari awal tidak menyukai kepemimpinan Tokugawa.

BAB 6. DAMPAK PEMBUKAAN NEGARA JEPANG OLEH BANGSA BARAT TERHADAP KESHOGUNAN TOKUGAWA TAHUN 1853-1867

Bangsa Barat yang banyak terlibat dalam kekacauan yang terjadi di Jepang pasca pembukaan negara Jepang ialah negara Inggris, Belanda, dan Perancis. Amerika Serikat sebagai negara pertama yang berhasil membuka Jepang tidak begitu banyak terlibat karena pada tahun 1861-1865 tengah disibukkan dengan perang saudara yang terjadi di negaranya. Amerika Serikat masih ikut terlibat meskipun dalam skala kecil seperti pada peristiwa pengeboman Shimonoseki II. Hal ini berbeda dengan Rusia yang tidak terlibat sama sekali dengan kekacauan yang terjadi di Jepang. Alasannya karena Rusia mempunyai ambisi lain di daerah utara dan perdagangan yang dilakukan dengan Jepang kurang menarik (Beasley dalam Marius, 2008: 285).

Pembukaan negara Jepang yang dilakukan pada masa Keshogunan Tokugawa menyebabkan terjadinya kekacauan akibat tidak adanya izin dari Kaisar. Kelompok-kelompok yang anti asing dan tidak menyukai kepemimpinan Shogun semakin berambisi untuk menggulingkan Keshogunan Tokugawa dan menyatukan Jepang dalam kekuasaan tunggal Kaisar. Kondisi ini semakin mengawatirkan ketika banyak terjadi serangan dan pembunuhan yang dilakukan *shishi* terhadap warga asing. Serangan yang dilakukan memicu pecahnya perang antara daimyo-daimyo dengan bangsa Barat. Perang yang terjadi akhirnya berdampak pada kondisi keuangan bakufu. Buruknya lagi, dengan situasi dan kondisi yang semakin sulit menyebabkan Tokugawa Yoshinobu memilih untuk mengembalikan kekuasaan yang sebenarnya ke Kaisar Mutsuhito.

6.1 Munculnya Gerakan *Sonno Joi*

Keshogunan Tokugawa yang bersifat feodal dan digerakkan dengan kekuatan militer tidak akan mampu berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari daimyo-daimyo yang setia kepadanya. Daimyo adalah penguasa mutlak atas suatu kawasan,

tetapi menyatakan setia kepada kekuasaan pusat yang dipegang oleh Shogun yang memerintah atas nama Kaisar. Pada masa Tokugawa, daimyo dibedakan menjadi 3 yakni Shimpan, Fudai, dan Tozama. Daimyo Shimpan merupakan daimyo yang memiliki hubungan darah dengan keluarga Tokugawa sedangkan daimyo Fudai merupakan daimyo yang mendukung Tokugawa dalam perang Sekigahara. Daimyo Tozama adalah daimyo yang bukan keturunan langsung dari Tokugawa, bisa disebut juga dengan daimyo luar. Dikatakan daimyo luar sebab mereka merupakan pengikut dari Toyotami Hideyoshi yang dikalahkan Tokugawa dalam perang Sekigahara (Yukichi, 1985: 218). Para daimyo diberikan sejumlah tanah oleh Shogun yang nantinya pendapatan mereka diperoleh dari tanah yang dimilikinya. Daimyo Shimpan, Fudai dan Tozama memiliki tingkat kepemilikan tanah yang berbeda. Sebagai gambaran tanah yang dimiliki oleh daimyo Shimpan, Fudai dan Tozama ialah sebagai berikut:

Tabel 6.1 Perbandingan Jumlah Pemilikan Koku dalam Tingkatan Daimyo

No.	Daimyo	Lebih dari 500.000 koku	Lebih dari 200.000 koku	Lebih dari 100.000 koku	Lebih dari 50.000 koku	Lebih dari 25.000 koku	Jumlah
1.	Shimpan	2	4	8	1	8	23
2.	Fudai	-	2	16	33	94	145
3.	Tozama	5	9	8	12	64	98
	Jumlah	7	15	32	46	166	266

Satu koku adalah jumlah tanah yang menghasilkan jumlah beras yang dikonsumsi satu orang dalam satu tahun. 1 koku = 180,391 liter beras.

Sumber: Suryohadiprojo (1987)

Luas tanah yang dimiliki oleh masing-masing daimyo pada masa Keshogunan Tokugawa dapat dilihat pada (Lampiran E; hal 143). Selain mendapat sejumlah tanah dari Shogun, para daimyo juga memiliki samurai sebagai pengikut dan pelindung mereka. Para samurai inilah yang menjaga kehormatan tuannya bahkan nyawa mereka menjadi jaminan keamanan untuk tuannya.

Diantara semuanya, daimyo Tozama merupakan daimyo yang tidak menyukai kepemimpinan Tokugawa. Hal ini dikarenakan daimyo Tozama mendapatkan berbagai macam pembatasan, salah satunya menduduki jabatan-jabatan penting di Edo. Daimyo Tozama juga mendapatkan wilayah-wilayah yang berada di luar Edo, berbeda dengan daimyo Shimpan dan Fudai yang mendapatkan wilayah strategis di sekitar Edo. Menempati wilayah yang jauh dari Edo memberi keuntungan tersendiri bagi daimyo Tozama, sebab dengan begitu pengawasan dari Shogun terhadap tindakan mereka tidak begitu ketat. Tanpa pengawasan yang ketat daimyo Tozama dapat menyusun rencana untuk menggulingkan Keshogunan Tokugawa. Daimyo dari Satsuma (Kyushu Selatan) dan Choshu (Honshu Barat) yang termasuk dalam daimyo Tozama merupakan daimyo paling kuat di Jepang yang memiliki kekuatan militer sepadan dengan bakufu (Webb, 1957: 26-27).

Semenjak kedatangan Perry tahun 1853, diantara para daimyo muncul dua kelompok yang bertentangan yakni, kelompok konservatif dan kelompok realis. Kelompok konservatif merupakan kelompok penentang masuknya bangsa Barat ke Jepang yang banyak diwakili oleh daimyo Tozama utamanya dari Choshu, Satsuma, Tosa dan Hizen. Kelompok ini dapat dikatakan sebagai kelompok anti asing yang menginginkan *Joi* yang berarti “usir orang biadab”. Pengikut dari kelompok konservatif adalah, Tokugawa Nariaki, Matsudaira Keie dan daimyo lainnya (Suradjaja, 1984: 19).

Kelompok realis merupakan kelompok yang berpihak pada bakufu dan Shogun serta lebih melihat pada kenyataan yang ada. Pendapat yang dikeluarkan oleh kelompok realis bertentangan dengan kelompok konservatif. Jika kelompok konservatif menginginkan agar kebijakan politik *sakoku* atau pengasingan tetap dijalankan, maka kelompok realis menginginkan kebijakan *kokutai* atau membuka diri. Kelompok realis memilih untuk membuka Jepang dengan perhitungan yang rasional. Perhitungan tersebut terletak pada kekuatan militer Jepang yang kalah jauh dengan bangsa Barat. Menurut kelompok realis jika politik isolasi tetap dipertahankan maka Jepang akan mengalami kerugian yang sangat besar. Untuk mencegah kerugian

dipihak Jepang, maka membuka negara dan mengambil ilmu dari bangsa Barat menjadi tindakan yang lebih tepat. Pengikut dari kelompok ini adalah Li Naosuke, Abe Masahiro, dan pejabat-pejabat lainnya yang menjadi penasihat Shogun (Subakti, 2011: 24; Suradjaja, 1984: 19).

Ada pula kelompok nasionalis yang diketua oleh keluarga Tokugawa yakni daimyo Shimpan dari klan Mito yakni Tokugawa Mitsukuni. Tujuan dari kelompok nasionalis adalah mengembalikan kekuasaan yang sebenarnya dari Shogun ke Kaisar. Berdasarkan sejarah Jepang yang dipelajari kelompok nasionalis, hanya Kaisar yang mempunyai hak penuh untuk mengendalikan pemerintahan Jepang. Kelompok nasionalis sebenarnya telah ada sebelum kedatangan Perry, namun baru menunjukkan aksinya setelah bergabung dengan kelompok konservatif (Lan, 1962: 107; Dasuki, 1963b: 8). Keputusan untuk bergabung dengan kelompok konservatif dilakukan setelah melihat Shogun tidak mampu melindungi Jepang dari bangsa Barat. Bergabungnya dua kelompok tersebut semakin menyulitkan kedudukan Shogun dan bakufu baik di mata masyarakat Jepang maupun di hadapan bangsa Barat.

Pertentangan kelompok konservatif maupun realis awalnya terjadi dalam perdebatan politik, namun keadaan ini mulai meruncing ketika bakufu menyetujui perjanjian pembukaan beberapa pelabuhan di Jepang. Pertentangan ini bahkan semakin mengarah kepada peperangan antara pendukung Kaisar dan Shogun, ketika bakufu kembali menyetujui perjanjian persahabatan dan perdagangan dengan bangsa Barat tanpa mendapat izin dari Kaisar. Di satu sisi bakufu berusaha mempertahankan kekuasaan Keshogunn Tokugawa dan melakukan hubungan baik dengan bangsa Barat untuk menghindari terjadinya resiko yang buruk. Disisi lain, penentang Keshogunan Tokugawa berusaha mengembalikan kekuasaan yang sebenarnya ke Kaisar dan mengusir bangsa Barat dari bumi Jepang.

Setelah kelompok nasionalis dan konservatif menyatukan diri, mereka membentuk gerakan yang menyuarakan slogan *Sonno Joi* yang berarti “Junjung tinggi Kaisar, usir orang-orang biadab. Orang biadab yang dimaksud adalah bangsa Barat sebab, bangsa Jepang menyebut orang-orang berkulit putih dari Barat dengan

sebutan *nanbajin* yang berarti “orang-orang biadab dari selatan”. Seperti diketahui bahwa bangsa Barat mulai datang ke Jepang dengan kapal-kapal yang berlayar dari selatan. *Sonno Joi* bisa disebut juga dengan pemikiran politik yang berasal dari Neo Konfisiuanisme dan muncul antara tahun 1850 hingga 1860an (Yukichi, 1984: 216-217). Pemikiran inilah yang nantinya dijadikan sebagai landasan untuk menggulingkan pemerintahan Keshogunan Tokugawa dan menjadikan Jepang bersatu dibawah kekuasaan tunggal Kaisar.

Di tengah situasi politik yang sedang bergejolak, banyak dari kalangan samurai yang kecewa terhadap tindakan yang telah diambil pemerintahan Shogun. Para samurai tersebut banyak yang melepaskan diri dari ikatan feodal dan memilih untuk menjadi ronin. Menjadi ronin memberikan mereka kebebasan untuk menyuarakan keinginannya. Semua ronin yang tidak menyukai kepemimpinan Shogun dan anti asing berkelompok menjadi satu dan mengatasnamakan mereka sebagai *shishi* (seseorang yang memiliki cita-cita mulia) (Beasley, dalam Subakti, 2011: 26; Mattulada, 1979: 117). Kelompok *shishi* semakin berkembang ketika menyatukan diri dengan kelompok bangsawan lainnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang radikal. Kelompok-kelompok inilah yang nantinya disebut dengan Gerakan Kesetiaan.

Setelah mengetahui tindakan bakufu yang menyetujui semua perjanjian dengan bangsa Barat tanpa adanya persetujuan Kaisar gerakan *Sonno Joi* semakin lantang menyuarakan keinginannya. Slogan *Sonno Joi* yang terus dikumandangkan, menyebabkan para *shishi* dan daimyo lainnya yang tidak suka dengan Tokugawa bergabung dalam gerakan ini. Banyaknya pengikut dalam gerakan *Sonno Joi*, menjadikan mereka berani untuk menyatakan pendapat mereka yang tidak setuju dengan politik luar negeri Shogun dan mengutuk tindakan yang telah dilakukannya terhadap bangsa Barat. Semua yang tergabung dalam gerakan *Sonno Joi* tidak ingin lagi patuh kepada Shogun dan berencana melakukan tindakan-tindakan yang bersifat radikal. Hal ini tentu memperburuk kondisi pemerintahan Jepang.

Melihat situasi yang terjadi, Li Naosuke mulai melakukan tindakan untuk meredam gerakan *Sonno Joi*. Li Naosuke menyingkirkan siapa saja yang tidak sependapat dengan keinginannya. Pejabat bakufu yang bersimpati kepada Tokugawa Nariaki termasuk Hotta Masayoshi disingkirkan dari pemerintahan. Beberapa penguasa feodal terkemuka seperti Tokugawa Nariaki, Matsudaira Keiei dan Hitotsubashi Keiki (Yoshinobu) dijatuhi hukuman tahanan rumah. Dua menteri senior kekaisaran diganti dan pejabat lain yang mendukung Li Naosuke diberi beberapa hadiah. Li Naosuke juga berusaha melakukan gerakan Penyucian Ansei pada tahun 1859 yakni melakukan penangkapan terhadap hampir seratus *shishi*. Para *shishi* yang tertangkap selanjutnya dihukum mati atau dipenjara (Beasley dalam Marius, 2008: 284; Hillsborough, 2009: 9).

Tidak hanya disitu saja, bakufu juga menyingkirkan siapa saja yang menentangnya. Seperti peristiwa penghukuman Yoshida Shoin pada 27 Oktober 1859. Yoshida Shoin merupakan samurai muda dari Choshu yang mengajarkan kesetiaan kepada Kaisar. Ajaran yang disebarkan berhasil menghimpun samurai-samurai muda lainnya untuk menjadi pengikutnya. Kesetiaan kepada Kaisar oleh Shoin diwujudkan dengan persekongkolan yang dilakukannya untuk membunuh Manabe pada tahun 1858 (Lan, 1962: 131-132). Manabe merupakan rekan senior dari Li Naosuke yang saat itu dikirim ke Kyoto untuk meminta persetujuan Kaisar terhadap perjanjian yang sudah dilakukan bakufu dengan Amerika Serikat. Tindakan yang telah dilakukan, menyebabkan dirinya ditangkap dan di bawa ke Edo. Di kota ini Yoshida Shoin dihukum mati oleh bakufu.

Para *shishi* yang tidak terima dengan apa yang telah terjadi, menyusun rencana untuk membunuh Li Naosuke. Pada musim semi tanggal 3 Maret 1860 segerombolan samurai (17 dari Mito dan 1 dari Satsuma) tiba-tiba menghadang rombongan Li Naosuke yang saat itu hendak menuju Edo. Segerombolan samurai itu kemudian membunuh Li Naosuke ketika tandu kebangsawanannya mendekati gerbang Sakurada di Kastil Edo. Pembunuhan Li Naosuke ini disebut juga dengan Insiden Sakurada (*Sakurada Mongai no hen*). Berita terbunuhnya Li Naosuke tidak diumumkan oleh

pemerintah karena khawatir akan ada pembalasan yang lebih kejam. Hal ini juga dilakukan agar tidak menimbulkan situasi yang semakin kacau (Hillsborough, 2009: 10; Suradjaja, 1984: 25; Nurhayati, 1987: 43).

Posisi Li Naosuke kemudian digantikan oleh Kuze Hirochika. Berbeda dengan Li Naosuke, Kuze lebih berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Kuze lebih menggunakan cara-cara damai dalam melakukan tindakan. Situasi yang sedang kacau dalam pemerintahan Jepang coba diredam oleh Kuze dengan melakukan pernikahan politik antara Shogun ke 14 yakni Tokugawa Iemoci dengan putri dari Kaisar Ninko yakni Kazunomiya Chikako (Beasley, 2003: 249; Nurhayati, 1987: 43-44). Tujuan dilakukannya pernikahan politik ini adalah untuk memperbaiki dan menguatkan hubungan dengan antara Shogun dengan Kaisar. Hubungan yang kembali membaik tentu dapat meningkatkan otoritas Shogun di istana Kaisar. Perjalanan sang putri dan rombongannya sepanjang jalan Nakasendo dari Kyoto menuju Edo untuk melangsungkan pernikahan merupakan yang peristiwa terbesar sepanjang sejarah. Kemegahan pernikahan politik itu nyatanya tidak sejalan dengan hari-hari Tokugawa Iemochi dalam pemerintahan yang semakin hari semakin terbatas (Tsunenari, 2009: 134).

Pernikahan politik antara Shogun ke 14 dan putri Chikako ternyata harus dibayar mahal oleh bakufu. Kaisar meminta bakufu berjanji untuk membatalkan perjanjian dengan bangsa Barat dan mengusir mereka dari Jepang dalam waktu sepuluh tahun. Ini bukan hal yang mudah bagi bakufu, sebab hubungan yang sudah terjalin dengan bangsa Barat tidak dapat diakhiri begitu saja. Bakufu kemudian mencari cara agar bisa menjaga hubungan baik dengan bangsa Barat dan Kaisar. Saat itu harga barang semakin meningkat akibat kekacauan politik yang terjadi di Jepang. Kondisi ini kemudian digunakan bakufu untuk merundingkan permasalahan tersebut dengan perwakilan bangsa Barat yang ada di Edo (Beasley, 2003: 249-250).

Pada tanggal 1 Mei 1861 bakufu menjelaskan kepada perwakilan Inggris di Edo bahwa terjadi kenaikan harga komoditi akibat kekacauan politik yang terjadi di Jepang. Bakufu juga menjelaskan bahwa kekecauan politik yang terjadi akibat

kebencian beberapa daimyo yang tidak suka dengan bangsa Barat. Melalui beberapa pembicaraan ditemukan solusi untuk mengatasi hal tersebut. Solusinya adalah penundaan pembukaan pelabuhan dan kota lebih lanjut (Edo, Osaka, Hyogo, dan Niigata) untuk meredam kebencian yang ada (Beasley dalam Marius, 2008: 289). Solusi ini dapat dilakukan dengan mengirim utusan bakufu ke Eropa untuk membahas hal tersebut

Sebelum misi dikirim ke Eropa, terlebih dahulu dilakukan negosiasi antara Menteri Luar Negeri Inggris Lord Russell dan Menteri Inggris Sir Rutherford Alcock dengan anggota senior bakufu Kuze Hirochika. Alcock maupun Russell bersedia membuat suatu perjanjian untuk menyelesaikan permasalahan bakufu dan menyelamatkan perdagangan yang terjadi antara bangsa Barat dan Jepang. Alcock bersama utusan dari bakufu yang dipimpin oleh Takeuchi Yasunori berangkat ke Eropa untuk membahas perjanjian tersebut. Perjanjian akhirnya berhasil ditandatangani di London pada 6 Juni 1862 yang berisi tentang, (1) penundaan pembukaan pelabuhan dan kota sampai 1 Januari 1868; (2) mengurangi pajak impor anggur, minuman keras, dan barang pecah belah; (3) menyediakan didirikannya sebuah gudang (Beasley dalam Marius, 2008: 289-290).

Perjanjian yang berhasil dilakukan di London setidaknya mampu memberi ketenangan bagi bakufu dalam meredam kekacauan yang ada, namun hal ini tidak bertahan lama. Kekacauan mulai terjadi ketika para *shishi* melakukan penyerangan terhadap warga asing. Kondisi ini semakin buruk ketika terjadi Insiden Namamugi pada tahun 1862. Insiden tersebut merupakan peristiwa pembunuhan Richradson yang dilakukan oleh samurai dari Satsuma.

6.2 Serangan Terhadap Warga Asing

Setelah perjanjian Persahabatan dan Perdagangan resmi ditandatangani, pada tahun 1859 banyak orang-orang asing yang berdatangan ke Kanagawa dan Yokohama. Melihat hal tersebut banyak para samurai utamanya para *shishi* yang tidak menyukai kedatangan bangsa Barat. Terlebih dari awal bangsa Jepang tidak

menyukai bangsa Barat yang menurut mereka disebut bangsa bar-bar yang sombong. Tidak mengherankan jika bangsa Jepang tidak menyukai bangsa Barat, sebab keduanya memiliki etika dan adat istiadat yang berbeda (Hayes, 1994: 16-17).

Rasa tidak suka yang dimiliki para *shishi*, membuat mereka menjadi senjata pembunuh bagi orang-orang asing. Alasan lain para *shishi* melakukan ini ialah agar hubungan antara bakufu dan bangsa Barat menjadi buruk. Banyak terjadi penyerangan dan pembunuhan terhadap warga asing. Kejadian pertama diawali pada malam tanggal 26 Agustus 1859 seorang pelaut dan Perwira Angkatan Laut Rusia yakni Komandan Muraview ditemukan terpotong-potong di jalan-jalan Yokohama. Pada bulan November seorang warga keturunan China milik Perancis diserang dan dibunuh di pemukiman asing Yokohama. Dua bulan kemudian, juru bahasa Sir R. Alcock dari Kedutaan Inggris ditikam dari belakang saat ia berdiri di pintu gerbang kedutaan Inggris di Edo dan dalam waktu satu bulan lebih dua kapten pedagang Belanda dibantai di jalan utama Yokohama. Selanjutnya ada jeda selama delapan atau sembilan bulan, dimana seorang pegawai pemerintahan Kedutaan Perancis dipotong dan terluka parah saat berdiri di depan pintu gerbang Kedutaan di Edo (Satow, 1921: 46).

Serangan tidak berakhir disitu saja, pada tanggal 14 Januari 1861 Henry Heusken yang merupakan Sekretaris dari Townsend Harris, diserang dan dibunuh setelah makan malam di Kedutaan Prusia. Pada malam 5 Juli 1861 terjadi upaya paling berani yang dilakukan terhadap kehidupan warga asing di Jepang. Peristiwa tersebut terjadi ketika Kedutaan Inggris di Tozenji diserang oleh sekelompok orang bersenjata. Insiden penyerangan ini menyebabkan dua pegawai Inggris terluka dan dari pihak Jepang sendiri baik penjaga maupun penyerang mati (Beasley dalam Marius, 2008: 288).

Dalam setiap kasus serangan itu direncanakan dan tak beralasan, dan pelaku pada setiap kesempatan berkaitan dengan kelompok dari kelas samurai. Tidak ada pelanggaran telah dilakukan oleh para korban kepada mereka yang telah kejam membunuh mereka. Mereka dibunuh dengan motif yang bersifat politis dan hal ini

dilakukan untuk menciptakan perselisihan antara bakufu dengan bangsa Barat. Jepang jadi dikenal sebagai negara dimana kehidupan orang asing berada di tangannya, dan ketakutan ini menimbulkan nasib yang begitu banyak di kalangan warga. Bahkan di Inggris, beberapa warganya yang ingin ke Jepang termasuk Ernest Satow membekali diri dengan senjata seperti pistol, dengan pasokan bubuk, peluru dan topi sebelum hidupnya berakhir ditangan para samurai Jepang. Semenjak kejadian penyerangan itu, hampir semua warga asing yang berada di Jepang selalu menggunakan pistol saat melakukan perjalanan di luar batas pemukiman asing, dan terus-menerus tidur dengan pistol di bawah bantalnya (Satow, 1921: 47).

Melihat situasi yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, perwakilan bangsa Barat yang berada di Jepang meminta kepada bakufu untuk membela semua warganya yang berada di Jepang. Langkah ini dilakukan untuk dapat mempertahankan kehidupan mereka yang semakin terancam. Peristiwa penyerangan yang terjadi pada Heusken, menyebabkan para menteri dari Inggris dan Perancis secara terang-terangan tidak ingin kembali ke Yokohama sampai situasi kembali membaik dan keselamatan mereka dapat dijamin. Insiden yang telah terjadi di Tozenji mengakibatkan Sir Rutherford Alcock yang awalnya mengirimkan korps Angkatan Laut untuk menjaga kedutaan kemudian menggantinya dengan mendatangkan detasemen tentara dari Hongkong (Beasley dalam Marius, 2008: 288-289).

Selanjutnya, pada tanggal 14 September 1862 pembunuhan yang paling keji dilakukan terhadap 4 warga berkebangsaan Inggris yakni, pedagang dari Shanghai yang bernama Charles Lennox Richardson, Margaret Watson Borradaile dari Hongkong, Woodthorpe Charles Clark dan William Marshall yang merupakan pedagang di Yokohama. Richardson, Borradaile, Clark dan Marshall tengah melakukan perjalanan dengan berkuda di sepanjang jalan yang tinggi antara Kanagawa dan Kawasaki. Ketika melewati desa Namamugi, mereka bertemu dengan rombongan besar samurai yang didalamnya terdapat seorang daimyo yang merupakan pemimpin Satsuma yakni Shimadzu Saburo. Saat itu Shimadzu Saburo baru kembali

dari Edo bersama para pengikutnya. Shimadzu Saburo datang ke Edo untuk menyampaikan pesan kepada Shogun dari Kaisar (Satow, 1921: 51-52).

Ketika kuda dari Richardson, Borradaile, Clark dan Marshall berpapasan dengan rombongan, mereka tidak turun dari kudanya untuk memberi hormat meskipun telah diberi isyarat. Dalam adat Jepang seseorang yang bertemu dengan daimyo maka harus memberi hormat dengan bersimpuh di tanah (Suradjaja, 1984: 25). Sikap yang ditunjukkan ke 4 warga berkebangsaan Inggris menurut para samurai pengikut Saburo dianggap sebagai tindakan yang tidak sopan. Samurai memiliki hak hukum untuk menyerang siapa pun yang menunjukkan rasa tidak hormat.

Para pengikut Saburo kemudian memerintahkan mereka untuk kembali, dan saat memutar kuda mereka tiba-tiba diserang oleh beberapa pria bersenjata pedang tajam. Richardson jatuh dari kudanya dalam keadaan sekarat, dan dua orang lainnya terluka begitu parah. Seorang lainnya berhasil selamat yakni Margaret Watson Borradaile kembali ke Yokohama dan memberikan peringatan tanda bahaya. Semua orang di permukiman yang memiliki kuda dan pistol kemudian mempersenjatai diri dan segera berlari menuju tempat kejadian. Mayat Richardson ditemukan di bawah naungan pohon di pinggir jalan. Tenggorokannya telah dipotong saat dia terluka dan tak berdaya. Tubuh Richardson dipenuhi dengan luka pedang dan itulah salah satu penyebab kematiannya. Clarke dan Marshall yang meskipun mendapat luka parah berhasil melarikan diri untuk menemukan perlindungan dan bantuan bedah dari tangan Dr. Hepburn dan dari Dr. Jenkins. Terbunuhnya Richardson dikenal dengan Insiden Namamugi (Satow, 1921: 52).

Insiden itu memicu ketakutan warga asing yang berada di Jepang, khususnya yang berbasis di distrik Kannai Yokohama. Banyak pedagang asing menghimbau kepada pemerintah Jepang untuk mengambil tindakan. Respon yang diberikan bakufu sendiri dalam menghadapi masalah ini cenderung lamban dan tidak tegas. Hal ini memicu kemarahan dari pihak Inggris. Bakufu sendiri mengalami kesulitan sebab, daimyo Satsuma tidak ingin menyerahkan pelaku yang telah membunuh Richardson.

Bakufu yang dinilai lamban kemudian menyebabkan Lord Russel selaku Menteri Inggris untuk segera mengambil keputusan. Pada tanggal 24 Desember 1862 dikirim seorang utusan dari Inggris yakni St. Jhon Neale untuk menuntut permintaan maaf secara resmi dan ganti rugi dari bakufu. Selain itu, karena Satsuma dan pemimpinnya tidak dapat dipaksa oleh pemerintah Jepang untuk menyerahkan pelaku penyerangan dan pembunuhan maka pemerintah Inggris tidak akan membiarkan pelakunya melarikan diri dari hukuman yang harus dijalani akibat kejahatan yang telah dilakukan (Beasley dalam Marius, 2008: 91-92).

Sebuah laporan lengkap mengenai pembunuhan Richardson dan gagalnya pemerintah Jepang dalam menyediakan ganti rugi akibat penyerangan terhadap kantor kedutaan Inggris telah dikirim ke kantor Departemen Luar Negeri Inggris. Pada bulan Maret, Jhon Neale diinstruksikan oleh Departemen Luar Negeri Inggris untuk menuntut ganti rugi baik dari bakufu maupun Satsuma. Pada tanggal 6 April 1863 Neale mengirim Eusden ke Edo dengan kapal perang “Havoc” untuk memberikan sebuah laporan. Laporan tersebut berisikan tuntutan permintaan maaf dan pembayaran denda kepada bakufu sebesar £ 10.000 dalam bentuk emas untuk istri dan keluarga Manis dan Crimp selaku pegawai yang mengalami penyerangan di Kedutaan Inggris. Untuk insiden penyerangan dan pembunuhan Richardson beserta kawannya, bakufu dituntut melakukan permintaan maaf secara resmi dan dikenai ganti rugi pembayaran £ 100.000 karena lamban dalam menangkap para pelaku. Neale memperingatkan bakufu bahwa penolakan akan dihadiri dengan konsekuensi yang sangat menyedihkan untuk negara mereka, dan memberi jangka waktu dua puluh hari untuk mempertimbangkan jawaban yang akan diberikan. Periode ini kemudian diperpanjang karena tidak adanya Shogun dan penasihat utamanya yang telah meninggalkan Edo menuju Kyoto (Satow, 1921: 72).

Jika tidak ada jawaban yang dikembalikan atau tidak memuaskan, maka tindakan koersif akan segera diambil. Setelah kapal “Havoc” kembali dari Edo, maka kapal “Muticara” harus dikirim ke Kagoshima untuk mengirimkan tuntutan kepada pemimpin Satsuma. Neale menetapkan bahwa Satsuma tidak hanya harus

mengeksekusi pembunuh Richardson di hadapan perwira angkatan laut Inggris, tetapi juga harus membayar ganti rugi lain sebesar £ 25.000 untuk dibagikan kepada rekan Richardson yakni Marshall, Clarke dan Borradaile. Petugas senior angkatan laut Inggris bersama skuadronnya yang berada di laut Cina akan diizinkan untuk mengambil langkah-langkah tepat seperti pembalasan atau blokade, terhadap bakufu dan maupun klan Satsuma jika hal tersebut ditolak. Neale sebisa mungkin menghindari ancaman blokade, karena menurutnya hal ini akan mengakibatkan pedagang asing yang ada di sekitar pelabuhan akan menjadi korban (Beasley dalam Marius, 2008: 292; Satow, 1921: 72).

Tokugawa Iemochi saat itu bersama penasehatnya melakukan kunjungan ke Kyoto pada musim semi 1863 setelah mendapat pesan dari Kaisar yang dikirim melalui Shimadzu Saburo. Belum pernah ada Shogun datang ke Kyoto semenjak Shogun ke 3 yakni Tokugawa Iemitsu melakukan perjalanan ke selatan bersama rombongan besarnya pada tahun 1634. Kunjungan tokugawa Iemochi kontras berbeda dengan Tokugawa Iemitsu. Tokugawa Iemitsu berkunjung ke Kyoto untuk menunjukkan kekuasaannya, memutuskan koneksi antara daimyo dengan pengadilan dan mengarahkan daimyo yang tinggal di Kyoto untuk hadir di Edo. Tokugawa Iemochi berkunjung ke Kyoto untuk menyelesaikan beredarnya isu-isu politik akibat kebijakan politik luar negeri yang sudah diambil dan untuk memusatkan perhatian daimyo yang mulai bergeser dari Edo ke Kyoto (Beasley dalam Marius, 2008: 331).

Pada 21 April 1863 Tokugawa Iemochi tiba di Kyoto dan beserta penasehatnya shogun ke 14 tersebut jadi tunduk terhadap tekanan dalam istana kekaisaran yang menginginkan pengusiran bangsa Barat di Jepang. Satsuma yang masih belum menyelesaikan masalah dengan Inggris tidak dapat melakukan kontrol terhadap istana. Setelah berdiskusi, ditetapkan bahwa tanggal 25 Juni 1863 dijadikan sebagai tanggal pengusiran bangsa Barat dari Jepang. Bakufu setuju mengenai dikeluarkannya dekrit pengusiran tersebut, namun secara rahasia mereka mengartikan hal ini tidak lebih sebagai perundingan-perundingan baru untuk menutup pelabuhan

Yokohama. Bakufu tidak ingin merusak hubungan yang sudah dijalin dengan baik antara Tokugawa dengan bangsa Barat (Beasley dalam Marius, 2008: 292).

Pada tanggal 1 Mei 1863 bakufu meminta penundaan selama lima belas hari untuk membayar ganti rugi. Eusden kemudian dikirim ke Edo dengan membawa pesan kepada bakufu bahwa sebelum Kolonel Neale mengabulkan permintaan mereka, harus dikirim seorang utusan ke Yokohama untuk menerima komunikasi penting. Pada tanggal 4 dan 5 Mei 1863 konferensi panjang terjadi antara pihak Inggris, Laksamana dan perwakilan dari Perancis dan serta dua Komisaris Luar Negeri Jepang yakni Takemoto Kai no Kami dan Takemoto Hayato no sho, yang diutus oleh bakufu untuk menjelaskan alasan mengapa penundaan lebih lanjut perlu dilakukan. Dua Komisaris Luar Negeri Jepang menjelaskan bahwa kesulitan dalam mengakses tuntutan Inggris muncul dari daimyo yang anti asing. Dalam hal ini mereka membuat tawaran kepada pasukan Inggris dan pasukan Perancis untuk dapat membantu Shogun memadamkan perlawanan dari pihak anti-asing agar nantinya mampu melaksanakan janji-janji yang telah dibuat dengan Inggris seperti pembayaran ganti rugi. Akhirnya perpanjangan waktu itu diberikan Kolonel Neale hingga 23 Mei 1863, selain itu tawaran bantuan juga dikabulkan (Satow, 1921: 74).

Bakufu mengira jika Shogun akan menyetujui rencana penerimaan bantuan dari Inggris maupun Perancis, namun nyatanya hal ini berbanding terbalik. Shogun tidak bisa menerima bantuan dalam bentuk apapun dari pihak Inggris maupun Perancis. Pada tanggal 24 Mei bakufu memberi tahu Kolonel Neale bahwa Shogun akan kembali ke Edo tanggal 24 Mei 1863. Ogasawara Nagamichi yang merupakan salah satu penasihat Hitotsubashi Keiki berusaha menahan Kolonel Neale untuk tetap sabar menanti jawaban atas tuntutan ganti rugi pihak Inggris kepada bakufu (Beasley dalam Marius, 2008: 293).

Keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 25 Mei 1863 terjadi konferensi lain antara Inggris, diplomatik Perancis dan penguasa angkatan laut di satu sisi dengan Takemoto Kai no Kami dan seorang pria baru bernama Shibata Sadataro disisi yang lain. Pembicaraan kemudian dimulai dengan ucapan terimakasih atas nama Shogun

kepada perwakilan Inggris dan Perancis untuk tawaran bantuan material yang akan diberikan, namun bagaimanapun bakufu harus tunduk kepada apa yang diperintahkan Shogun. Bakufu harus bisa menyelesaikan permasalahan dengan kelompok konservatif dengan pasukan sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Pembicaraan selanjutnya berkaitan dengan pembayaran ganti rugi dari bakufu kepada Inggris yang totalnya sejumlah £ 110.000 dapat dipenuhi dengan beberapa angsuran (Satow, 1921: 77).

Pada tanggal 14 Juni 1863 Kikuchi Iyo no Kami dan Shibata Sadataro selaku Komisaris Urusan Luar Negeri Jepang tiba di Kedutaan Yokohama. Kedatangan mereka bertujuan untuk menyelesaikan pengaturan pembayaran ganti rugi sebesar £ 110.000 dalam tujuh kali angsuran yang akan dilakukan selama lebih dari enam minggu. Angsuran pertama akan dilakukan pada tanggal 18 Juni 1863, namun kenyataannya bakufu baru menyerahkan angsuran pertama pada tanggal 24 Juni 1863. Tindakan Shogun dalam membayar ganti rugi kepada Inggris tentu dijadikan alasan yang tepat oleh kelompok radikal di sekitar Kaisar untuk menekan otoritas Shogun (Satow, 1921: 80; Beasley dalam Marius, 2008: 293).

Dengan demikian kebencian masyarakat Jepang khususnya para *shishi* terhadap bangsa Barat diwujudkan dengan melakukan aksi penyerangan kepada warga asing dan kantor kedutaan bangsa Barat yang ada di Jepang. Puncak dari penyerangan ini terjadi ketika Richardson dibunuh oleh samurai dari daimyo Satsuma. Insiden ini menyebabkan timbulnya permusuhan antara daimyo Satsuma dengan Inggris. Keadaan ini semakin meruncing saat pasukan Inggris menyerang Kagoshima.

6.3 Pengeboman Kagoshima

Sementara bakufu berusaha menyelesaikan permasalahan dengan Inggris, Kolonel Neale sedang menyelesaikan persiapan ekspedisi menuju Satsuma. Ekspedisi ini dilakukan untuk menuntut ganti rugi tindakan samurai Satsuma terhadap Richardson dan 3 kawannya. Marshall dan Clarke telah sembuh dari luka-luka yang dideritanya, sedangkan Borradaile yang selamat dari insiden telah kembali ke

Tiongkok. Dalam hal ini Kolonel Neale telah meminta kepada Laksamana Inggris untuk mengirimkan dirinya bersama beberapa staf menuju Kagoshima. Laksamana Kuper awalnya tidak ingin mengirim lebih dari beberapa kapal untuk ekspedisi ini namun, akhirnya ditentukan bahwa kapal yang dikirim harus terdiri dari H.M.S. “Euryalus”, “Pearl”, “Perseus”, “Argus”, “Coquette”, “Racehorse”, dan kapal perang “Havoc”. Ernest Satow selaku juru bahasa yang dikirim oleh Inggris pada bulan September 1862 juga ikut dalam kapal “Argus” yang dipimpin oleh Komandan Lewis Moore (Satow, 1921: 84).

Pada tanggal 6 Agustus 1863 Kolonel Neale bersama stafnya meninggalkan Yokohama dengan membawa kapal-kapal yang telah ditentukan. Pada saat itu cuaca sedang cerah dan kapal-kapal Inggris tiba di mulut teluk Kagoshima 5 hari kemudian tepatnya pada sore hari tanggal 11 Agustus 1863. Pada pagi hari berikutnya pasukan melanjutkan perjalanan ke teluk Kagoshima dan melabuhkan kapal di sebuah kota. Sebuah surat berisi tuntutan Russel telah dipersiapkan yang sebelumnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang oleh Siebold dan gurunya. Awak dari salah satu perahu kemudian turun dengan ditemani dua petugas untuk menyampaikan surat kepada pimpinan Satsuma (Beasley dalam Marius, 2008: 293; Satow, 1921: 84-85).

Pada sore hari berikutnya, seorang pejabat dari Satsuma yakni Ijichi Shoji bersama 40 pria datang ke kapal dan menemui Kolonel Neale. Setelah bertukar sate secara tiba-tiba mereka membuat serangan terhadap perwira Inggris dan membunuh orang-orang penting yang ada didalamnya. Ini merupakan rencana yang cukup berani dan bisa saja serangan ini akan berhasil jika Inggris tidak waspada. Setelah penyerangan itu hanya ada dua atau tiga orang perwakilan dari Satsuma yang dipanggil ke kabin Laksamana Kuper. Pada tanggal 14 Agustus 1863 utusan Inggris mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan dari Satsuma. Selain itu Satsuma juga menjelaskan bahwa tidak diperlukannya komunikasi lebih lanjut dalam menangani masalah tersebut. Menanggapi hal ini, Laksamana Kuper kemudian melakukan sedikit perjalanan ke Teluk untuk meninjau beberapa kapal uap milik Satsuma yang bersandar di teluk (Satow, 1921: 85).

Pada sore hari komandan dari berbagai kapal dikumpulkan dalam kapal utama untuk menerima instruksi dari Laksamana. Tidak ada niatan untuk menyerang benteng dari Satsuma, oleh karena itu Laksamana berencana untuk mengambil beberapa kapal uap milik Satsuma. Penyitaan 3 kapal uap milik Satsuma ini nantinya dapat mendorong mereka untuk memberikan jawaban yang lebih memuaskan daripada jawaban sebelumnya. Dalam rencana ini Kapten Borlase yang berada di kapal “Pearl” dengan kapal “Coquette”, “Argus”, dan “Racehorse” mulai merebut kapal uap milik Satsuma pada pagi hari tanggal 15 Agustus 1863 (Satow, 1921: 86).

Pada siang hari ketika kapal-kapal Inggris menanti tanggapan dari Satsuma setelah menyita 3 kapal uap miliknya, tiba-tiba terdengar suara ledakan dan semua benteng mulai melepaskan tembaknya ke kapal-kapal Inggris. Meskipun hujan dan angin bertiup seperti topan, Laksamana memberikan perintah untuk menyerang, dan membuat sinyal kepada kapal “Coquette” dan “Racehorse” untuk membakar 3 kapal uap milik Satsuma. Mendengar perintah tersebut, semua bergegas menuju kapal dan mulai menjarah semua benda yang ada di dalamnya. Setelah sekitar satu jam menjarah, 3 kapal uap itu kemudian ditenggelamkan dan dibakar (Satow, 1921: 87).

Pertempuran antara daimyo Satsuma dengan pasukan Inggris tidak dapat dihindari lagi. Berkali-kali benteng-benteng di Kagoshima melepaskan tembakan dan hal ini mengakibatkan kerusakan pada kapal-kapal milik Inggris. Semua kapal diperintahkan untuk menjauh dari teluk. Sekitar 45 menit setelah pertempuran dimulai, kapal pemimpin dan kapal “Pearl” yang agak tertinggal menbelok keluar dari garis. Hal ini disebabkan Kapten Josling dan Komandan Wilmot dari kapal “Euryalus” mendapat tembakan peluru dari benteng Kagoshima. Selain itu sebuah granat berukuran 10 inci diledakkan sehingga menewaskan 7 orang dan melukai seorang perwira. Kapal-kapal Inggris kemudian membalasnya dengan menembakkan roket ke kota Kagoshima. Hal ini dilakukan untuk membakar kota, dan dengan angin kencang yang bertiup usaha warga untuk memadamkan api sia-sia. Saat itu pemandangan yang muncul sangat dahsyat dan mengerikan. Langit tertutupi oleh

kepuluan asap hitam akibat kobaran api yang menjilat-jilat dibawahnya (Satow, 1921: 88).

Pertempuran ini mengakibatkan terbakarnya kota Kagoshima. Pada hari Minggu pagi 16 Agustus 1863 mayat Kapten Josling, Komandan Wilmot dan sembilan orang yang kehilangan nyawa dalam pertempuran dikuburkan di laut. Selanjutnya pada malam hari Kapal-kapal berlabuh ke tempat yang agak jauh dari kota. Pada tanggal 17 Agustus 1863 kapal-kapal mulai melanjutkan perjalanan kembali ke Yokohama (Satow, 1921: 89). Kesan pahit mungkin dialami oleh pasukan Inggris yang harus mundur dalam pertempuran, tetapi setidaknya mereka merasa puas setelah berhasil membakar 3 kapal uap milik Satsuma dan membakar kota Kagoshima. Para daimyo Satsuma yang mengalami banyaknya kerugian mulai sadar bahwa pengusiran bangsa Barat dari Jepang sulit dilakukan. Kesulitan ini disebabkan kemiliteran Jepang yang tertinggal jauh dengan bangsa Barat.

Pertempuran ini menyebabkan jatuhnya korban baik dari pihak Inggris maupun Satsuma. Pasukan Inggris yang dipimpin oleh Laksamana Sir Augustus Kuper mengalami kerugian yang cukup banyak yakni 3 kapal perang rusak, 11 orang meninggal, dan 52 lainnya terluka. Pasukan Satsuma sendiri kehilangan 3 kapal uap yang saat itu harganya diperkirakan \$ 300.000, 5 orang meninggal, dan 500 rumah terbakar (http://en.wikipedia.org/wiki/Bombardment_of_Kagoshima (05 Maret 2015)). Pertempuran di Kagoshima mulai menyadarkan para daimyo dan samurai Satsuma bahwa bangsa Barat khususnya Inggris memiliki angkatan laut yang lebih maju dibanding Jepang. Peristiwa tersebut setidaknya mulai menghapus perasaan anti asing kelompok konservatif yang dari awal menolak untuk membuka Jepang khususnya para daimyo dari Satsuma.

Suatu kejutan yang menyenangkan Inggris muncul di Kedutaan, saat dua perwira tinggi Satsuma bersedia untuk membayar ganti rugi sebesar £ 25.000 dan akan memenuhi tuntutan Inggris untuk menangkap pembunuh Richardson yang selanjutnya akan dihukum mati di depan perwira Inggris. Kesepakatan damai kemudian ditandatangani tanggal 11 Desember 1863 antara pihak Satsuma dengan

Inggris (Beasley dalam Marius, 2008: 293). Uang yang digunakan daimyo Satsuma untuk membayar ganti rugi diperoleh dengan meminjam kas Shogun. Setelah pertempuran di Kagoshima, Satsuma mulai bekerja sama dengan Inggris.

Rencana kerjasama antara Inggris dengan daimyo dari Satsuma dimulai dengan mendapatkan senjata moderen seperti bangsa Barat dan memperoleh ilmu untuk membuat senjata tersebut. Satsuma kemudian memesan meriam amstrong (sejenis meriam yang digunakan Inggris dalam pengeboman Kagoshima). Selain itu, terjadi penandatanganan sejumlah kontrak yang dilakukan daimyo Satsuma dengan pengusaha Belgia (Beasley, 2003: 252-253). Kontrak ini dilakukan untuk mengembangkan perdagangan. Pendapatan yang diperoleh dari perdagangan tersebut nantinya dapat digunakan untuk memesan kapal dan meriam. Satsuma benar-benar menghapus perasaan anti asingnya untuk mendapat dukungan diplomatik dari Inggris.

Mengirim samurai muda dari Satsuma untuk belajar keluar negeri tidak lupa juga dilakukan. Pada tahun 1865 samurai muda dari Satsuma tiba di London. Selama beberapa tahun di Universitas College London para samurai mendapat bantuan pengusaha Skotlandia. Samurai muda ini mendapat tugas untuk memperoleh ilmu-ilmu dari bangsa Barat khususnya militer. Setelah menyelesaikan studinya beberapa samurai muda dari Satsuma ada yang kembali ke Jepang, namun ada juga yang dikirim lagi ke Amerika untuk melanjutkan studinya (Beasley, 2003: 271-272).

Dengan demikian, pengeboman Kagoshima yang terjadi tanggal 15 Agustus 1863, menyadarkan daimyo Satsuma akan keunggulan militer yang dimiliki bangsa Barat khususnya negara Inggris. Kesadaran ini oleh daimyo Satsuma diwujudkan dengan dipenuhinya tuntutan dari pihak Inggris dan persahabatan yang terjalin dikemudian hari. Persahabatan ini dilakukan daimyo Satsuma untuk memodernisasi pasukannya. Tujuannya tidak lain untuk dapat mengalahkan pasukan Tokugawa sehingga dapat menggulingkan Keshogunan Tokugawa dan mengembalikan kekuasaan yang sebenarnya ke Kaisar.

6.4 Pengeboman Shimonoseki I

Keputusan mengenai pengusiran bangsa Barat pada tanggal 25 Juni 1863 yang telah disepakati secara bersama membuat Choshu melakukan tindakannya sendiri. Choshu dari awal memang tidak menyukai bangsa Barat yang menurut mereka merupakan bangsa yang sombong. Kaisar Osahito (Komei) yang saat itu memegang tampuk kepemimpinan secara terang-terangan menghimbau kepada rakyatnya untuk mengusir bangsa Barat dari bumi Jepang. Perintah kaisar untuk mengusir bangsa Barat semakin membakar semangat Choshu untuk segera melakukan tindakan. Alasan Choshu ingin segera melakukan tindakan terhadap bangsa Barat untuk mendapatkan pengaruh di Istana Kekaisaran dan untuk memperkecil otoritas Tokugawa di Kyoto.

Secara terbuka Lord Mori Takachika selaku pemimpin pasukan Choshu menentang Shogun dan memerintahkan pasukannya untuk menembak tanpa peringatan pada semua kapal asing yang melintasi Selat Shimonoseki. Choshu dilengkapi dengan sebagian besar meriam kuno untuk menembak, tetapi juga terdapat beberapa persenjataan modern. Pada tanggal 25 Juni 1863 pasukan Choshu menembak kapal dagang “Pembroke” milik Amerika yang sedang melintasi di selat Shimonoseki. Di bawah gencarnya tembakan meriam kapal “Pembroke” yang berada di bawah pimpinan Kapten Simon Cooper berhasil melarikan diri melalui Terusan Bungo. Kapal tersebut mengalami kerusakan ringan dan tidak ada korban. Ketika tiba di Shanghai, Cooper mengajukan laporan atas serangan yang dialaminya dan dikirim ke Konsulat AS di Yokohama Jepang. Keesokan harinya pada tanggal 26 Juni 1863 Perancis yang saat itu mengirimkan angkatan lautnya menggunakan korvet “Kienchang” juga mendapatkan tembakan saat melintas di sekitar Shimonoseki. Korvet Perancis berhasil lolos meskipun mengalami kerusakan di beberapa tempat dan satu pelaut terluka. Pada tanggal 11 Juli, kapal perang “Medusa” milik Belanda melaju ke Selat Shimonoseki. Kapal tersebut dipimpin oleh Kapten François de Casembroot. Belanda tidak memperdulikan saran dari Perancis dan yakin bahwa Lord Mori tidak akan menembak kapalnya karena kekuatan kapalnya dan hubungan lama

antara Belanda dan Jepang. Nyatanya Lord Mori melepaskan tembakan kepada “Medusa” dan mengakibatkan sembilan pelaut terluka (Satow, 1921: 95; Beasley dalam Marius, 2008: 293-294; Suradjaja, 1984: 20).

Setelah serangan terhadap “Pembroke”, Commodore Mc. Dougal memanggil semua pasukannya pada tanggal 14 Juli 1863 untuk melakukan tindakan balasan terhadap Choshu. Pada hari itu juga kapal perang milik Amerika “Wyoming” segera menuju selat Shimonoseki. Setelah perjalanan dua hari, mereka tiba di pulau Himeshima pada malam 15 Juli 1863 dan berlabuh di sisi selatan pulau tersebut. Keesokan harinya, kapal perang “Wyoming” melanjutkan perjalanan menuju selat Shimonoseki dan memasuki selat pada pukul 10:45. Kapal “Wyoming” kemudian melepaskan tiga tembakan yang menggelegar sebagai tanda peringatan kepada benteng dan kapal-kapal dari Lord Mori selaku pemimpin dari Choshu. Pada sekitar pukul 11:15 kapal “Wyoming” mengeluarkan senjata poros 11 incinya (http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Shimonoseki_Straits (05 Maret 2015)). Tanpa memperdulikan benteng Choshu, Mc. Dougal memerintahkan kapal “Wyoming” untuk terus melakukan serentetan tembakan ke arah kapal uap, dan kapal-kapal yang berlabuh di selat Shimonoseki. Satu tembakan dari rentetan tembakan yang dikeluarkan Choshu berhasil menewaskan dua orang dan melukai empat orang. Pasukan Amerika kemudian melepaskan senjata poros 11 incinya ke kapal musuh dan berhasil merusaknya. Dua tembakan terarah berhasil meledakkan ketel uap kapal dan berhasil menenggelamkan kapal. Setelah berada dalam peperangan selama kurang lebih satu jam, kapal perang “Wyoming” kembali ke Yokohama. Kapal Wyoming mendapat tembakan sebanyak 11 kali, dengan kerusakan yang cukup besar untuk cerobong dan tali-temalnya.

Korban dari pihak Amerika ialah empat orang meninggal dan tujuh luka-luka, satu di antaranya kemudian meninggal. Di pihak Choshu dua kapal uap miliknya berhasil ditenggelamkan oleh kapal perang “Wyoming”, selain itu 4 benteng pantai mengalami kerusakan, dan 40 orang dari pihak Choshu meninggal (http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Shimonoseki_Straits (05 Maret 2015)).

Meskipun Amerika Serikat saat itu tengah disibukkan dengan perang yang terjadi di negaranya, tapi Kapal “Wyoming” yang merupakan kapal perang asing pertama yang berusaha melakukan serangan untuk menegakkan hak-hak perjanjian yang telah dilakukan dengan Jepang. Setelah pertempuran tersebut selesai, Choshu kembali membangun benteng pantainya. Choshu tidak mengetahui jika satu setahun kemudian, bangsa Barat akan melakukan serangan balasan yang terdiri dari Inggris, Amerika Serikat, Perancis, dan Belanda.

Pada tanggal 20 Juli, Angkatan Laut Perancis melakukan tindakan yang sama dengan Amerika Serikat atas serangan terhadap kapal dagang mereka. Kekuatan Perancis terdiri dari Anggota Korps Komando Operasi AL dan dua kapal perang, yakni “Tancredi” dan “Dupleix” dengan 250 orang di bawah Kapten Benjamin Jaurès. Pasukan menyerang Shimonoseki dengan menghancurkan sebuah kota kecil, bersama dengan setidaknya satu pasukan bagian meriam. Tindakan ini didukung oleh perwakilan Perancis yang berkuasa penuh di Jepang yakni Duchesne de Bellecourt. Peristiwa ini kemudian sampai ke pemerintah Perancis dan mengakibatkan munculnya kritik keras terhadap wakil mereka di Jepang yang mengambil langkah-langkah untuk berperang. Hal ini dikarenakan Perancis memiliki komitmen militer yang lebih penting untuk menghormati negara lain. Akibat peristiwa tersebut Duchesne de Bellecourt dilepaskan dari jabatannya pada tahun 1864. Berbeda dengan Bellecourt, Kapten Jaurès selaku pemimpin pasukan dari Perancis mendapatkan ucapan selamat dari Shogun karena telah mengambil langkah tegas terhadap pasukan anti asing khususnya Choshu yang banyak menimbulkan kekacauan dan dianugerahi sebuah spanduk khusus (http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Shimonoseki_Straits (05 Maret 2015)). Dengan demikian, bukan hanya Amerika Serikat yang membalas serangan Choshu, Perancis juga melakukan pembalasan. Pembalasan ini dilakukan untuk menghentikan perasaan anti asing yang dimiliki beberapa daimyo di Jepang khususnya daimyo dari Choshu.

Semenjak peristiwa tersebut Choshu benar-benar menutup selat Shimonoseki. Choshu melakukan pengawasan yang ketat terhadap kapal-kapal bangsa Barat yang

memasuki selat. Bila melihat tanda-tanda masuknya kapal dari bangsa Barat mereka tidak segan-segan untuk menembak dengan meriam-meriam yang telah dipasang disepanjang pantai. Choshu juga semakin memperkuat pasukannya dengan membangun lagi beberapa benteng. Penutupan selat Shimonoseki jelas merugikan perdagangan bangsa Barat dan masalah ini harus diselesaikan secepatnya.

Di sisi lain, melihat tindakan yang telah dilakukan Choshu dan Satsuma menyebabkan Shogun mengambil suatu rencana untuk menekan tindakan anarkis tersebut. Rencana yang dimaksud oleh Shogun ialah menutup pelabuhan Yokohama. Tindakan ini diharapkan dapat menekan konflik yang telah dimunculkan oleh kelompok konservatif khususnya dari Satsuma dan Choshu. Langkah-langkah untuk melaksanakan rencana ini dilakukan pada awal bulan tahun 1864. Hal pertama yang dilakukan adalah dengan mengirim misi ke Perancis pada bulan Februari 1864. Misi ini diharapkan dapat memenangkan penerimaan tuntutan bakufu di Eropa mengenai penutupan Yokohama, atau setidaknya untuk membuat negosiasi tentang masalah yang terus terjadi sehingga dapat memberikan sedikit ketenangan bagi bakufu. Kedua, Shogun pergi ke Kyoto lagi untuk melakukan pembicaraan tentang isu yang beredar. Di Kyoto, Hitotsubashi Keiki yang bertindak sebagai utusan Shogun, membicarakan kepada Kaisar mengenai usulan pengusiran bangsa Barat. Menurut Keiki pengusiran yang dilakukan hanya mengakibatkan kerugian akibat pertengkaran terbuka antara Inggris dengan Shimazu Saburo, dan merupakan suatu gagasan yang tidak realistis (Beasley dalam Marius, 2008: 294).

Di Paris, Ikeda Chohatsu yang menjadi utusan bakufu menerima dengan penolakan terhadap rencana penutupan Yokohama. Perancis saat itu posisinya sangat tergantung pada Jepang. Hal ini dikarenakan pasokan sutra mentah untuk Perancis hampir seluruhnya dikirim melalui Yokohama. Ikeda yang tidak dapat memperjuangkan rencananya harus menandatangani konvensi di Paris pada tanggal 24 Juni 1864 yang menjanjikan bahwa bakufu akan membuka selat Shimonoseki dalam waktu tiga bulan, jika perlu dengan bantuan angkatan laut Perancis (Beasley dalam Marius, 2008: 294-295).

Dengan demikian, pengeboman Shimonoseki I terjadi karena adanya keputusan terbuka dari Kaisar untuk mengusir bangsa Barat dari tanah Jepang. Choshu yang tidak suka dengan bangsa Barat melakukan tindakan sendiri dengan menembaki kapal milik Amerika Serikat, Perancis dan Belanda yang melintasi selat Shimonoseki. Hal ini mengakibatkan pasukan Inggris, Perancis, Belanda dan Amerika Serikat menyatukan kekuatan untuk melakukan serangan balasan terhadap Choshu. Tindakan balasan inilah yang nantinya menyadarkan daimyo Choshu akan keunggulan militer bangsa Barat.

6.5 Pengeboman Shimonoseki II

Satu bulan berikutnya tepatnya pada awal Maret 1864 Sir Rutherford Alcock kembali ke Jepang setelah mengambil cuti pada musim semi tahun 1862, sedangkan Kolonel Neale kembali ke Eropa. Sir Rutherford Alcock datang ke Jepang dengan membawa kekuatan yang banyak. Kabar mengenai penembakan yang dilakukan Choshu terhadap kapal dagang Amerika, kapal-kapal milik Perancis dan Belanda telah didengarnya sehingga hal ini membuatnya ingin menghukum Choshu terhadap sikap anti asingnya. Alasan lainnya, Alcock ingin agar perdagangan yang telah terjadi berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan dari pihak manapun terlepas dari permasalahan internal yang ada di Jepang, sebab bangsa Barat telah terbiasa melewati selat Shimonoseki untuk melanjutkan perjalanan menuju Nagasaki dan terakhir menuju Yokohama. Alcock berpendapat jika Satsuma berhasil ditaklukan dengan tindakan penyerangan, maka cara yang sama akan digunakan kepada Choshu untuk menimbulkan efek yang sama (Satow, 1921: 95-96).

Sir Rutherford Alcock kemudian membuat koalisi dengan perwakilan dari Perancis, Belanda dan Amerika Serikat dalam menanggapi masalah penutupan selat Shimonoseki yang dilakukan oleh Choshu. Pada tanggal 30 Mei 1864, 4 menteri dari Inggris, Perancis, Belanda dan Amerika Serikat mengirim catatan kepada Shogun yang berisi tentang penolakan penutupan Yokohama dan menghapus halangan perdagangan (penutupan selat) yang dimunculkan daimyo Choshu. Selanjutnya

mereka memperingatkan Shogun jika dalam waktu 10 hari selat tidak segera dibuka, maka kapal-kapal bangsa Barat khususnya Inggris, Perancis, Belanda dan Amerika Serikat akan pergi ke Shimonoseki membawa pemimpin Choshu. Saat ini tidak ada tindakan lebih lanjut sampai bala bantuan Inggris datang dan memastikan pertahanan pemukiman asing di Yokohama. Pada bulan Juni 1864, 1500 anggota Korps Komando Operasi AL Inggris (Beasley dalam Marius, 2008: 295).

Secara kebetulan, saat itu dua dari lima samurai muda dari Choshu yakni Ito Shunsuke dan Inouye Bunda tengah kembali ke Jepang. Pengiriman mereka ke Inggris dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk melihat dunia dan belajar mengenai kekuatan bangsa Barat. Tiga samurai muda yang lain yakni Endo Kinsuke, Inouye Masaru, dan Yamao Yozo masih berada di Inggris. Melihat kesempatan ini Sir Rutherford Alcock menawarkan kepada Ito dan Inouye untuk dapat berkomunikasi secara langsung kepada pimpinan klan mereka. Komunikasi ini nantinya dapat membujuk pimpinan Choshu untuk dapat meninggalkan sikap anti asing dan permusuhan dengan bangsa Barat. Setelah mendapat persetujuan dari rekan-rekannya Sir Rutherford Alcock kemudian mengirim pasukannya untuk mengantar dua samurai muda ke tempat yang nyaman. Ito dan Inouye juga diberi catatan dari Inggris untuk diberikan kepada pemimpin Choshu. Sementara itu, seorang petugas Perancis yakni Komandan Layrle dan seorang Perwira Angkatan Laut Belanda yakni Mayor Wray R. E dikirim ke selat untuk memperoleh informasi terkini mengenai kondisi yang ada (Satow, 1921: 95-96).

Pada tanggal 21 Juli 1864 pasukan yang mengantar Ito dan Inouye berangkat dengan menggunakan korvet “Barrosa” yang dipimpin Kapten W.M Dowell dan kapal meriam “Cormorant” yang dipimpin Komandan Buckle. Pasukan kemudian melewati terusan Bungo dan berlabuh di Pulau Himeshima pada tanggal 26 Juli 1864. Pada hari berikutnya, pasukan mendaratkan Ito dan Inouye (yang waktu itu pergi dengan nama Shiji) dan melakukan perjanjian untuk bertemu mereka kembali pada tanggal 7 Agustus di Pulau Kasato lepas pantai Suwo. Pada tanggal 1 Agustus 1864 ketika matahari terbit pasukan mencoba pergi ke selat untuk melihat situasi yang ada.

Korvet “Barrosa” berlabuh di tempat yang jaraknya 10 mil di sisi Shimonoseki sedangkan kapal “Cormorant” pergi ke pantai Buzen dan menuju batas Isaki. Ketika setengah perjalanan melintasi mulut selat pasukan melihat sinyal senjata yang ditembakkan sepanjang pantai utara dari Chofu ke Saho. Melihat kondisi ini pasukan memutuskan untuk kembali ke pulau Himeshima (Satow, 1921: 97-98).

Pada tanggal 6 Agustus 1864 di korvet “Barrosa” Ito dan Shiji datang dengan membawa pesan dari pemimpin mereka. Ito dan Shiji datang ditemani 1 punggawa dan beberapa tentara yang dikirim oleh pemimpin mereka. Setelah mendapat jamuan makan malam Ito dan Shiji menjelaskan bahwa mereka telah bertemu dengan pemimpin mereka di Yamaguchi dan memberikan surat dari 4 perwakilan asing yakni Inggris, Perancis, Belanda, dan Amerika Serikat. Setelah berkonsultasi dengan pemimpin mereka diputuskan bahwa pemimpin Choshu sepenuhnya mengakui kebenaran yang tercantum dalam surat dan sadar akan ketidakmampuan mereka untuk mengatasi kekuatan bangsa Barat. Tindakan yang dilakukan Choshu semua berada dibawah perintah yang disetujui Shogun dan Kaisar, oleh karena itu perwakilan dari bangsa Barat hendaknya menghadap ke Kyoto. Ito dan Shiji melaporkan hal tersebut melalui lisan dan mereka tidak membawa dokumen tertulis, selain itu mereka menyarankan untuk mengakhiri urusan dengan Shogun (Satow, 1921: 98-99).

Ito dan Shiji gagal melakukan misi ini sebab mereka tidak berhasil dalam membujuk pemimpin mereka. Menurut pemimpin Choshu, persoalan yang sudah terlanjur terjadi tidak akan bisa diselesaikan tanpa adanya pertempuran. Setelah mendengar penjelasan mereka keesokan harinya kapal melanjutkan perjalanan dan tiba di Yokohama pada tanggal 10 Agustus 1864. Selanjutnya akan diadakan sebuah pertemuan antara 4 perwakilan dari Inggris, Perancis, Belanda, dan Amerika Serikat dengan menteri-menteri dari Shogun. Tujuan pertemuan ini adalah penegasan akan datangnya pasukan laut yang siap membuka selat Shimonoseki (Satow, 1921: 100).

Sebelum pertemuan ini berlangsung pada tanggal 19 Agustus 1864 Ikeda Chohatsu yang dikirim ke Paris Perancis tiba di Yokohama. Ikeda datang dengan

membawa konvensi yang ditandatangani di Paris dan suatu tuntutan dari pihak Perancis. Tuntutan tersebut berisi permintaan ganti rugi akibat serangan yang dilakukan Choshu terhadap kapal perang Perancis dan ganti rugi sebesar \$ 35.000 untuk diberikan kepada kerabat Letnan Camus. Mengetahui konvensi tersebut berisikan permintaan kepada Shogun untuk pembukaan selat mengakibatkan Ikeda dipecat dan jika konvensi ini disetujui oleh bakufu maka akan terjadi perang saudara (Beasley dalam Marius, 2008: 296).

Pendekatan yang dilakukan ternyata tidak juga membuahkan hasil sehingga tidak ada jalan lain selain mengirim pasukan untuk membuka paksa selat Shimonoseki. Pasukan yang terdiri dari gabungan antara Inggris, Perancis, Belanda dan Amerika Serikat disiapkan dibawah pimpinan Laksamana Sir Augustus Leopold Kuper. Pasukan yang disiapkan berjumlah 17 kapal yang terdiri dari 9 kapal Inggris, 3 kapal Perancis, 4 Kapal Belanda dan 1 Kapal Amerika Serikat. Saat itu Amerika Serikat membatasi diri untuk menunjukkan dukungan militer karena terlibat dalam Perang Saudara. Kapal-kapal Inggris terdiri dari kapal "Euryalus" 35, dipimpin oleh Kapten Alexander; korvet "Tartar" 21, dipimpin oleh Kapten Hayes; kapal "Barrosa" 21, dipimpin oleh Kapten W. M. Dowell; kapal "Conqueror" 48, dipimpin oleh Kapten Luard; kapal "Leopard" 18, dipimpin oleh Kapten Leckie; kapal "Argus" 6, dipimpin oleh Komandan Moresby; kapal "Coquette" 14, dipimpin oleh Komandan Roe; kapal "Perseus" 17, dipimpin oleh Komandan Kingston; dan kapal perang "Bouncer" 2, dipimpin oleh Letnan Holder. Kapal Perancis terdiri dari kapal "Semiramis" 35, dipimpin oleh Laksamana Jaures; korvet "Dupleix" 10, dan kapal "Tancredi" 4. Kapal Belanda terdiri dari korvet Belanda "Metalen Kruis" 16, dipimpin oleh Kapten de Man; "Djambi" 16, dipimpin oleh Kapten van Rees; "Amsterdam" 8; dan "Medusa" 16, dipimpin oleh Kapten de Casembroot. Amerika mengirim kapal uapnya "Takiang" yang membawa senapan dan beberapa pasukan. Semua pasukan meninggalkan teluk Kanagawa pada tanggal 28 Agustus 1864 (Satow, 1921: 102-103).

Pada tanggal 2 September pasukan tiba di pulau Himeshima dan pada sore harinya Laksamana Kuper, Kapten Alexander dengan petugas lainnya termasuk Ernest Satow selaku juru bahasa dari Inggris pergi ke daratan untuk berjalan-jalan. Di malam hari pasukan mengambil 150 ton batubara untuk semua kapal. Pada tanggal 4 September 1864 pukul 09:00 pasukan melanjutkan perjalanan ke arah selat Shimonoseki. Delapan kapal Inggris berada ditengah dengan kapal Euryalus didepan sedangkan kapal-kapal Perancis dan kapal Takiang berada di sebelah kiri. Disisi sebelah kanan diisi oleh 4 kapal milik Belanda. Barisan kapal ini memperlihatkan kekuatan bangsa Barat yang terbentang diatas tenangnya permukaan laut pedalaman. Pada pukul 03:30 pasukan berlabuh ditempat yang jaraknya sekitar dua mil dari mulut selat dan siap beraksi (Satow, 1921: 103-104).

Kapal “Barrosa”, “Tartar”, “Djambi”, “Metalen Kruis”, “Leopard” dan “Dupleix” menuju pintu masuk selat yang berada disepanjang pantai selatan dan menempatkan posisi di depan Tanoura. Kapal “Perseus”, “Medusa”, “Tancrede”, “Coquette” dan “Bouncer” melewati sepanjang pantai utara sedangkan kapal “Amsterdam” dan “Argus” menempati posisi cadangan. Kapal “Euryalus”, “Semiramis”, “Conqueror” dan “Takiang” berlabuh di luar jangkauan benteng musuh. Tembakan pertama dikeluarkan oleh kapal “Euryalus” yang kemudian diikuti oleh tembakan dari kapal-kapal yang berada di Tanaoura. Kapal “Semiramis” melepaskan tembakan dengan efek yang mengerikan dan kapal “Takiang” melakukan hal yang terbaik dengan senapan yang dibawa. Kapal “Conqueror” menembakkan tiga peluru yang salah satunya meledak di antara sekelompok besar orang yang berada di benteng. Kapal-kapal dibagian utara yang berhasil membungkam benteng lawan datang untuk membantu ke enam kapal yang berlabuh di bagian selatan karena terlibat konflik tajam dengan benteng musuh (Satow, 1921: 105).

Beberapa saat kemudian sinyal untuk menghentikan penembakan dikeluarkan oleh musuh, melihat situasi tersebut Komandan Kingston dari kapal “Perseus” dan Kapten De Casembroot dari “Medusa” mendarat dan menghentikan empat belas senjata yang ada di benteng Maeda Mura. Seluruh korban di pihak Inggris, Perancis,

Belanda dan Amerika pada hari pertama berjumlah enam orang terluka yang semuanya berada dalam kapal "Tartar". Keesokan harinya salah satu benteng yang ada di selat Shimonoseki yakni benteng Maeda Mura kembali menembaki kapal-kapal yang berlabuh di Tanoura, akan tetapi hal ini langsung dibalas dengan cepat dan berhasil membungkam benteng. Kapal "Dupleix" kehilangan beberapa awak kapalnya yakni dua meninggal dan dua lainnya terluka. Kapal "Tartar" yang dilanda tembakan mengakibatkan Letnan terluka parah (Satow, 1921: 108).

Pada pukul 09:00 pasukan yang dipimpin oleh Kapten Alexander mendarat di pantai. Pasukan ini mendapat tugas untuk memberi gertakan di daerah sebelah timur dari benteng Maeda Mura dan mengambil senjata yang masih ada. Sementara itu kapal "Perseus", "Amsterdam", dan "Argus" melepaskan tembakan ke atas bukit yang ada di dekat Tanoura. Ujung timur kota Shimonoseki berhasil dibakar oleh tentara Perancis. Setelah pasukan berhasil menghancurkan dan menduduki beberapa benteng, mengambil senjata musuh dan membakar beberapa pemukiman akhirnya pertempuran dihentikan (Satow, 1921: 110-113).

Pada tanggal 7 September 1864 pasukan meledakkan semua bubuk dari pihak musuh yang tersisa dan melemparkan granat ke laut. Daftar korban dalam pertempuran selama dua hari 5-6 September 1864 ialah 8 meninggal dan tiga puluh terluka. Di siang hari pasukan mendarat di sisi Tanaoura untuk menguburkan jenazah. Keesokan harinya pasukan berhasil mengambil sembilan belas senjata dari benteng Maeda Mura dan benteng Hikushima (pulau besar yang berada di pintu masuk selat bagian Barat). Setelah pertempuran ini Sir Rutherford Alcock berharap selat Shimonoseki dapat dibuka kembali (Satow, 1921: 114-115).

Dihari yang sama, Ito Shunsuke datang untuk memberitahukan bahwa Choshu menginginkan perdamaian dan *karo* atau menteri yang dilengkapi dengan kekuatan penuh datang untuk membicarakan sesuatu. Sebuah perahu datang dan bersandar di dekat kapal. Perwakilan dari Choshu kemudian masuk ke kapal dan dibawa ke Laksamana. Mereka kemudian menyatakan bahwa pemimpin klan Choshu mengakui kekalahannya dan ingin berdamai untuk mengadakan hubungan persahabatan. Utusan

dari Choshu tidak membawa lagi bukti tertulis oleh karena itu, Laksamana memberi waktu kepada mereka selama 48 jam untuk membawa surat dari pimpinan Choshu. Utusan tersebut juga diberitahu bahwa surat yang akan dibawa harus mengandung substansi apa yang tadi dikatakan, mengakui telah melakukan kesalahan yang menyedihkan karena telah menembaki kapa-kapal bangsa Barat khususnya Inggris, Perancis, Belanda, dan Amerika, serta memohon adanya perdamaian. Surat tersebut harus ditandatangani oleh pemimpin Choshu, di stempel, dan harus mempunyai salinan untuk diberikan kepada masing-masing 4 perwira senior Angkatan Laut yakni Inggris, Perancis, Belanda, dan Amerika (Satow, 1921: 116).

Kondisi tersebut sangat membebani Choshu sebab, (1) senjata yang masih tersisa harus dikeluarkan dan benteng-benteng dihancurkan; (2) permusuhan akan dihentikan dan pihak Choshu melakukan hal yang sama, tetapi jika mereka melepaskan tembakan lain maka pasukan gabungan akan membakar segala sesuatu yang ada di wilayah Choshu; (3) para pelaut Belanda dan kapal yang telah jatuh ke tangan Choshu harus diserahkan secara utuh; dan (4) Choshu harus mendorong penduduk desa membawa unggas mati dan sayuran segar untuk dijual kepada pasukan. Agar ada tanda damai dari pihak Choshu kepada pasukan, maka bendera putih harus dinaikkan di pintu utama sampai berakhirnya waktu yang telah ditentukan. Utusan dari Choshu saat itu ialah Shishido Giôma yang merupakan anak angkat Shishido Bizen, Sugi Tokusuké, dan Watanabe Kurata. Mereka kemudian kembali ke pantai, setelah berkomunikasi dengan komandan dari masing-masing kapal (Satow, 1921: 116-117).

Pada tanggal 9 September 1864 kapal “Coquette” bersama dua Laksamana melewati selat untuk mengunjungi benteng di Hikushima dengan ditemani Ernest Satow selaku juru bahasa dari Inggris. Setelah melewati teluk kecil yang dipenuhi dengan barang-barang rongsokan kapal tiba di benteng Hikushima. Setelah turun dari kapal mereka memeriksa sisi benteng yang senjatanya telah dihancurkan oleh pasukan gabungan. Salah satu benteng yang awalnya memiliki 6 senjata yang terpasang, setelah pertempuran 6 senjata tersebut berhasil dihancurkan. Semenjak

tanggal 7 September 1864 kapal “Tartar”, “Dupleix”, “Djambi”, dan “Matelan Kruis” telah siaga di Hikushima untuk membongkar benteng (Satow, 1921: 117-118).

Pada tanggal 10 September 1864 utusan Choshu kembali datang untuk membawa surat dari pimpinan mereka. Utusan tersebut terdiri dari Mori Idzumo, Menteri (Karo) Yamada Uyemon, Hadano Kingo (Hadano itu kemudian lebih dikenal sebagai Hirozawa Hiôsuké), Watanabe Kurata yang merupakan anggota dewan (Sansei), anggota dewan Isota Kenzo dan Harata Junji dari Chofu, serta Shiji Bunda. Mereka kemudian membacakan surat dari pimpinan Choshu yang menuntut adanya perdamaian. Laksamana menyetujui hal ini dan menjelaskan jika tidak ada niatan untuk melawan Choshu. Tindakan ini terpaksa dilakukan untuk memperkuat persahabatan antara Jepang dengan bangsa Barat utamanya dalam hal perdagangan. Setelah berkonsultasi diputuskan bahwa tanggal 14 September 1864 utusan Choshu akan menemui Laksamana dan memberikan persetujuan atas tuntutan yang diajukan Laksamana. Tuntutan tersebut berisi tentang, (1) tidak ada benteng yang dibangun di selat sampai permasalahan antara bangsa Barat dengan Jepang dapat diselesaikan oleh Shogun dan para menteri luar negeri yang ada di Edo; (2) menurut kebiasaan bangsa Barat pada saat perang harus ada pembayaran ganti rugi; (3) ketika kapal bangsa Barat yang melintasi selat membutuhkan batubara, perbekalan, atau air, maka akan diizinkan untuk membeli apa yang diinginkan (Satow, 1921: 119-120).

Laksamana juga menjelaskan bahwa selama pasukan tinggal di Shimonoseki, warga yang menempati wilayah tersebut harus menjual apa saja yang tersedia. Lebih tepatnya Laksamana menginginkan adanya pasar didekat pantai. Awalnya para utusan keberatan, sebab menurut mereka wilayah tersebut telah ditinggalkan oleh penghuninya. Setelah melewati beberapa pembicaraan, utusan Choshu menyanggupi hal tersebut. Pertemuan antara utusan Choshu dan Laksamana akhirnya bisa diselesaikan secara baik-baik (Satow, 1921: 120).

Berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, pada tanggal 14 September 1864 tepatnya pukul dua siang utusan Choshu datang sebagai perwakilan pimpinan Choshu. Kali ini utusan Choshu sudah berusaha membujuk pemimpinnya

untuk datang, namun karena suatu alasan tertentu pemimpin mereka tidak bisa hadir. Utusan dari Choshu terdiri dari Shishido Bizen, Mori Idzumo, Shishido Giôma, Ibara Kazuyé, Nawozaki Yahichirô (sekretaris Metsuké), Ito Shunsuke dan Hadano Kingo. Dalam pertemuan itu utusan Choshu mengumumkan persetujuan dari pemimpin mereka terhadap tuntutan Laksamana. Tuntutan yang dibacakan oleh utusan Choshu terdiri dari, (1) kapal asing yang melintasi selat harus diperlakukan dengan ramah, diizinkan untuk membeli batubara, perbekalan, air dan keperluan lainnya dan jika cuaca di laut tidak memungkinkan untuk berlayar, maka awak kapal akan diizinkan untuk mendarat; (2) tidak ada benteng baru yang akan dibangun, benteng yang lama tidak akan diperbaiki dan tidak ada senjata yang dipasang di dalam benteng; (3) pemimpin Choshu bersedia membayar tebusan dan membiayai biaya yang dikeluarkan dalam ekspedisi. Jumlah keseluruhan akan ditentukan oleh perwakilan bangsa Barat yang ada di Edo. Berdasarkan hasil yang ditentukan, ganti rugi yang dibebankan kepada Choshu sebesar \$ 3.000.000 (Tiga Juta Dollar Meksiko) yang saat itu harganya setara dengan 30 kapal uap. Perjanjian ini akhirnya ditandatangani dan distempel pada tanggal 16 September 1864 (Satow, 1921: 124-125).

Tuntutan-tuntutan tersebut merupakan sebuah perjanjian untuk menghentikan permusuhan antara Choshu dengan bangsa Barat. Kali ini kekuatan militer bangsa Barat telah meyakinkan Choshu bahwa pertempuran yang dilakukan hanya akan merugikan Jepang. Bukan hanya Choshu, sebagian besar samurai bahkan para shishi yang awalnya benci kepada bangsa Barat mulai menghilangkan perasaan itu dan menggantinya dengan keinginan mempelajari semua yang berkaitan dengan bangsa Barat. Perjanjian ini menandakan dimulainya persahabatan antara Choshu dengan bangsa Barat. Hal ini dibuktikan dengan dikirimnya samurai muda Choshu untuk menuntut ilmu dan memperoleh keterampilan teknologi. Berkat mempelajari ilmu dari bangsa Barat, Choshu mampu memodernisasi pasukannya. Pasukan yang berhasil dilatih nantinya akan digunakan untuk menyerang Shogun dan mengembalikan kekuasaan ke Kaisar.

Ditahun yang sama, Choshu tidak hanya berperang dengan bangsa Barat di selat Shimonoseki. Pada tanggal 1 September 1864 Keshogunan Tokugawa mengirim ekspedisi pertamanya untuk menghukum Choshu akibat serangan yang dilakukannya di Istana Kaisar. Ekspedisi ini nyatanya tidak berakhir dengan peperangan, sebab sebuah kompromi dilakukan oleh pasukan militer Keshogunan Tokugawa dengan Choshu yang ditengahi oleh Satsuma. Saigo Takamori yang saat itu menjadi Komandan pasukan militer Keshogunan Tokugawa diberi usulan untuk menghindari pertempuran dan sebagai gantinya pasukan mendapat pemimpin dari Choshu yang bertanggung jawab atas pemberontakan. Pasukan militer Keshogunan Tokugawa yang tidak tertarik dengan peperangan menyetujui hal tersebut, begitu pula Choshu. Ekspedisi pertama yang dikirim Keshogunan Tokugawa kepada Choshu berakhir tanpa adanya perlawanan yang berarti dari kedua belah pihak (http://en.wikipedia.org/wiki/First_Ch%C5%8Dsh%C5%AB_expedition (05 Maret 2015)).

Disisi lain, muncul permasalahan baru mengenai perjanjian yang disepakati oleh pemimpin Choshu dengan bangsa Barat. Permasalahan tersebut terkait dengan ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak Choshu. Choshu yang memiliki wilayah dengan pendapatan sebesar 369.000 koku per tahun tidak sanggup membayar ganti rugi tersebut. Ketidaksanggupan Choshu akhirnya membuat Inggris mengambil inisiatif untuk meminta ganti rugi kepada bakufu. Menurut Sir Rutherford Alcock, jika suatu daerah tidak mampu membayar ganti rugi maka pemerintah yang harus bertanggung jawab untuk menanganinya. Hal ini mengakibatkan terjadinya perjanjian yang ditandatangani bakufu pada tanggal 22 Oktober 1864. Perjanjian itu menjelaskan bahwa bakufu harus membayar ganti rugi sebesar \$ 3.000.000 dalam enam kali angsuran. Sir Rutherford Alcock menyadari bahwa tindakan penetapan ganti rugi tersebut dilakukan untuk memberi tekanan pada bakufu dalam rangka mewujudkan persetujuan Kaisar terhadap perjanjian-perjanjian yang sudah dilakukan (Satow, 1921: 125; Beasley dalam Marius, 2008: 296).

Bangsa Barat mulai menyadari bahwa terjadi dualisme pemerintahan dalam Jepang. Pemerintahan yang satu berpusat di Edo dengan Shogun sebagai pemimpinnya dan pemerintahan yang lain berpusat Kyoto dengan Kaisar sebagai pemimpinnya. Seiring berjalannya waktu bangsa Barat juga mulai memahami jika Kaisar yang sebenarnya memiliki otoritas tertinggi dalam pemerintahan Jepang bukan Shogun. Jika hal ini terus berjalan maka permasalahan yang terus terjadi di Jepang tidak bisa diselesaikan. Persahabatan dan perdagangan yang sudah terjalin dengan baik antara bangsa Barat dan Jepang tidak ingin dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu, bangsa Barat mencari cara agar Kaisar memberi persetujuan terhadap semua perjanjian yang telah dilakukan. Tidak terkecuali Sir Rutherford Alcock yang sudah menjalankan rencananya.

Rencana yang disiapkan Alcock ternyata tidak sia-sia, pada bulan April 1865 bakufu menyatakan tidak mampu membayar ganti rugi pada angsuran kedua dan selanjutnya sehingga meminta penundaan pembayaran. Pada saat itu bakufu tengah dalam masa krisis sebab banyak pengeluaran tak terduga yang harus dikeluarkan. Mendengar hal itu perwakilan dari Inggris kemudian melapor kepada Lord Russel. Lord Russel yang mengetahui rencana Alcock segera mengambil tindakan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. Lord Russel kemudian membuat proposal yang berisi syarat-syarat tertentu untuk menjawab permintaan penundaan pembayaran (Beasley dalam Marius, 2008: 298).

Setelah proposal dibuat, Harry Parkes yang menggantikan posisi Sir Rutherford Alcock menemui perwakilan dari Perancis, Belanda dan Amerika. Setelah mendengarkan penjelasan Parkes, Perancis dan Belanda tidak keberatan dengan perjanjian tersebut, namun Leon Roches tidak sependapat dengan kebijakan yang dibuat Inggris. Leon Roches yang sudah memiliki hubungan baik dengan bakufu ingin agar Keshogunan Tokugawa menjadi penguasa Jepang, sehingga keuntungan yang lebih besar dapat diambil oleh Perancis. Roches berusaha menolak perjanjian tersebut, namun karena lebih banyak yang memberi suara setuju maka keinginan Roches diabaikan (Beasley dalam Marius, 2008: 299).

Pada dasarnya baik Parkes maupun Alcock melakukan hal ini sebagai tindakan persiapan jika nantinya terjadi pergantian penguasa di Jepang. Perwakilan bangsa Barat sadar bahwa telah terjadi perebutan kekuasaan di Jepang. Oleh karena itu, jika perjanjian-perjanjian yang sudah dilakukan mendapat persetujuan dari Shogun maupun Kaisar maka persahabatan dan perdagangan yang sudah terjalin tidak akan mendapat efek yang buruk dari perebutan kekuasaan tersebut. Pada tanggal 30 Oktober 1864 empat menteri bertemu dengan bakufu dan menjawab permintaan penundaan yang diminta. Bakufu diberi tawaran akan dibebaskan dari sisa ganti rugi yang tidak bisa dibayar dengan memenuhi suatu perjanjian yang berisi syarat-syarat tertentu. Perjanjian tersebut berisi, (1) Pembukaan Hyogo dan Osaka yang lebih awal dari jadwal yang telah ditetapkan dalam Protokol London; (2) persetujuan dari Kaisar mengenai perjanjian-perjanjian yang sudah dilakukan; (3) pengurangan tarif bea masuk dan penetapan tarif dasar sebesar 5% (Beasley dalam Marius, 2008: 298-299).

Bakufu saat itu tidak punya pilihan lain sehingga menerima syarat-syarat yang diajukan dalam perjanjian tersebut, selain itu hal ini dilakukan agar hubungan baik dengan bangsa Barat tetap terjaga. Setelah bakufu menerima persyaratan, bangsa Barat tidak lagi meminta persetujuan dari Edo melainkan dari Kyoto. Semenjak saat itu, usaha untuk mendapat persetujuan dari Kaisar mulai dilakukan oleh bangsa Barat. Hal ini dikarenakan bangsa Barat mengerti jika status mereka di Jepang lemah karena tidak adanya persetujuan dari Kaisar. Pihak Inggris, Perancis, Belanda dan Amerika Serikat mulai mempersiapkan pasukan yang terdiri dari 9 kapal. Sembilan kapal yang dikirim terdiri dari 4 kapal dari Inggris, 3 kapal dari Perancis, 1 kapal dari Belanda dan Amerika Serikat (Lan, 1962: 136).

Pada tanggal 4 November 1865 kapal-kapal dari bangsa Barat tiba di Hyogo. Sebelum memberikan surat kepada pejabat kaisar, terlebih dahulu pasukan memamerkan kekuatan angkatan laut mereka. Masyarakat di wilayah Hyogo dan para pejabat yang berada di istana Kaisar merasa kaget karena belum pernah menyaksikan aksi militer angkatan laut yang dimiliki bangsa Barat. Tindakan pasukan memamerkan kekuatan militernya dilakukan untuk menekan Kaisar agar setuju

menerima perjanjian yang diajukan. Surat yang berisi tuntutan bangsa Barat diberikan kepada pejabat Kaisar di Osaka pada tanggal 7 November 1865 dan memberikan waktu seminggu untuk membalas surat tersebut. Kaisar kemudian berdiskusi dengan pejabat istana mengenai tuntutan tersebut. Banyak pejabat istana yang keberatan mengenai pembukaan pelabuhan lebih awal, namun pada akhirnya Kaisar menyetujui tuntutan-tuntutan tersebut. Hal ini disebabkan aksi militer yang dilakukan oleh bangsa Barat menyadarkan Kaisar dan pejabat bakufu jika kemiliteran Jepang tertinggal jauh dengan bangsa Barat. Pada tanggal 13 November 1865 Kaisar menyetujui perjanjian yang dibuat bangsa Barat (Beasley dalam Marius, 2008: 299-300).

Pada tanggal 25 Juni 1866 perjanjian yang disetujui Kaisar ditandatangani oleh Amerika, Inggris, Perancis, dan Belanda. Perjanjian tersebut secara resmi mulai berlaku di Yokohama pada tanggal 1 Juli 1866 serta di Hokodate dan Nagasaki pada tanggal 1 Agustus 1866. Perjanjian ini berpengaruh pada lampiran yang ada pada perjanjian tahun 1858, dimana perdagangan bebas diterapkan sesuai dengan kondisi Jepang. Semenjak saat itu perwakilan dari bangsa Barat mulai diterima kehadirannya, selain itu permasalahan yang terjadi menjadi mudah untuk diselesaikan (Beasley dalam Marius, 2008: 301-302).

Semenjak Kaisar menyetujui perjanjian tersebut, para daimyo dan samurai dari Choshu dan Satsuma yang lebih dulu menyadari bahwa pengusiran bangsa Barat sia-sia mulai berkompromi untuk menggulingkan Keshogunan Tokugawa. Pemikiran anti asing mulai dibuang dan yang menjadi tujuan satu-satunya adalah penyatuan Jepang dalam satu kekuasaan tunggal dibawah kepemimpinan Kaisar. Baik Satsuma maupun Choshu yang menginginkan kekuasaan tunggal di tangan Kaisar berharap nantinya mendapat posisi yang kuat dalam pemerintahan yang baru. Bakufu yang mengetahui hal ini mengambil tindakan tegas kepada Choshu.

Ekspedisi kedua kembali dikirim oleh Keshogunan Tokugawa untuk menghukum Choshu. Ekspedisi ini disebut juga perang musim panas yang diumumkan pada tanggal 6 Maret 1865 dan operasi baru dimulai pada tanggal 7 Juni 1866 dengan pengeboman di Yamaguchi oleh angkatan laut Keshogunan Tokugawa.

Ekspedisi ini berakhir dengan bencana militer untuk pasukan Shogun yang harus menerima kekalahan dari pasukan Choshu. Pasukan Choshu memiliki pengikut kebanyakan dari samurai muda yang sudah dimodernisasi dan terorganisir secara efektif. Hal ini jelas berbeda dengan tentara Shogun yang terdiri dari pasukan feodal kuno dan memiliki semangat berperang yang menurun. Penyebab lain dari kekalahan tersebut karena Satsuma yang sudah bersekongkol dengan Choshu mengirimkan pasukannya untuk mengalahkan pasukan Shogun. Pasukan Satsuma tidak jauh berbeda dengan pasukan Choshu, keduanya sama-sama telah memodernisasi pasukannya (Hayes, 1994: 17-18; Mattulada, 1979: 117).

Kekalahan ini menandai sirnanya prestise bakufu dihadapan masyarakat Jepang. Hitotsubashi Keiki atau Tokugawa Yoshinobu yang pada musim gugur tahun 1866 menjadi Shogun ke 15 setelah kematian Iemochi, mulai melakukan perubahan untuk memperbaiki situasi yang ada. Bakufu melakukan berbagai reformasi untuk memodernisasi administrasi dan militer Keshogunan Tokugawa atau dapat juga dikatakan sebagai restorasi Tokugawa. Hal ini dilakukan untuk memperkuat Keshogunan Tokugawa, sehingga dapat mengantisipasi terjadinya upaya-upaya dari daimyo-daimyo yang ingin menggulingkannya. Nishi Amane yang baru kembali dari Belanda setelah menyelesaikan studinya diperintahkan oleh Tokugawa Yoshinobu untuk menyusun skema pemerintahan baru yang lebih moderen (Beasley dalam Marius, 2008: 351).

Pada tahun 1867 adik dari Tokugawa Yoshinobu yakni Akitake dikirim ke Perancis sebagai perwakilan dari bakufu untuk melihat sebuah pameran yang digelar di Paris. Akitake pergi Perancis juga untuk mengambil rancangan studi disana demi kepentingan kepemimpinan masa depan. Hubungan antara Shogun dengan bangsa Barat semakin diperkuat dengan adanya jamuan makan malam yang diadakan di Osaka dengan mengundang semua perwakilan bangsa Barat yang ada di Jepang. Di istana Shogun baju tradisional Jepang diganti dengan pakaian Barat yang lebih moderen. Tokugawa Yoshinobu juga sering meminta saran kepada Leon Roches yang merupakan perwakilan dari negara Perancis untuk membuat perbaikan-perbaikan

dalam pemerintahannya. Kolaborasi antara bakufu dengan Perancis semakin diperkuat dengan adanya misi militer yang dikirim ke Jepang pada tahun 1867-1868 (Beasley dalam Marius, 2008: 351-352).

Misi Militer Perancis ke Jepang dari 1867-1868 adalah salah satu misi pelatihan militer asing yang pertama di Jepang. Misi ini dibentuk oleh Napoleon III, terkait permintaan dari Keshogunan Tokugawa yang telah mengirim utusan secara pribadi yakni Shibata Takenaka (1823-1877) ke Eropa. Shibata sudah bernegosiasi dan mendapat dukungan dari Perancis untuk pembangunan Galangan Kapal Yokosuka. Shibata juga telah melakukan permintaan baik kepada Inggris maupun Perancis untuk mengirim misi militer yang melakukan pelatihan perang terhadap pasukan Keshogunan Tokugawa. Inggris memberikan dukungan kepada bakufu dengan mengirim Tracey Mission untuk memberi pelatihan angkatan laut. Menteri Luar Negeri Perancis Drouyn de Lhuys (1865-1881) memberikan pelatihan kepada angkatan bersenjata Shogun. Misi ini terdiri dari 17 anggota yang berada di bawah kewenangan Menteri Perang Jenderal Jacques Louis Randon dan dipimpin oleh Kapten Charles Sulpice Jules Chanoine. Tujuh belas anggota yang dikirim meliputi berbagai keahlian diantaranya, (1) empat petugas (mewakili infanteri, artileri dan kavaleri); (2) sepuluh bintara dan dua tentara. (Beasley dalam Marius, 2008: 352).

Dengan demikian, Choshu yang tidak mampu membayar ganti rugi sebesar \$ 3.000.000 akibat kekalahannya dalam pengeboman Shimonoseki II membuat Inggris meminta bakufu untuk melunasinya. Kondisi keuangan bakufu yang saat itu mulai menurun mengakibatkan mereka tidak sanggup membayar ganti rugi. Ketidaksanggupan inilah yang dimanfaatkan bangsa Barat untuk menekan Jepang. Tindakan bangsa Barat dalam menekan Jepang dilakukan dengan meminta persetujuan dari Kaisar terhadap tuntutan-tuntutan mereka. Persetujuan yang diberikan Kaisar menjadi bukti nyata bahwa Jepang mengakui keunggulan militer bangsa Barat. Semenjak saat itu tidak ada lagi keinginan untuk mengusir bangsa Barat. Daimyo-daimyo yang sebelumnya anti asing lebih memilih untuk

memfokuskan tujuan mereka dalam mengembalikan kekuasaan yang sebenarnya ke Kaisar.

6.6 Ekonomi yang Buruk

Perjanjian yang telah dilakukan dengan bangsa Barat mulai memunculkan adanya kontroversi akibat keuangan Jepang yang memburuk. Jepang berharap perdagangan yang berlangsung dengan bangsa Barat akan memberikan keuntungan bagi perekonomiannya, namun kenyataan yang terjadi berbanding terbalik. Menghadapi situasi ini Townsend Harris menyatakan kepada bakufu bahwa perdagangan akan berkembang dengan baik jika dilakukan penetapan terhadap nilai tukar mata uang. Harris juga menjelaskan bahwa mata uang asing yang hampir setara dengan mata uang di Jepang adalah dollar Meksiko. Dollar Meksiko saat itu sudah mulai digunakan dalam perdagangan di Tiongkok, sehingga hal ini akan mempermudah. Setelah melewati beberapa pembicaraan, ditetapkan bahwa 1 dollar Meksiko setara dengan 3 koin perak Jepang (Beasley dalam Marius, 2008: 285).

Penetapan ini nyatanya tidak juga membuat keadaan ekonomi Jepang membaik. Jepang tidak tahu jika bangsa Barat memanfaatkan situasi ini untuk meraih keuntungan. Keuntungan yang dicari adalah koin emas Jepang yang jika ditukar di luar Jepang setara dengan 15 koin perak. Di Jepang bangsa Barat menghargai 1 koin emas dengan 5 koin perak Jepang. Jika dengan 1 dollar Meksiko bangsa Barat mendapat 3 koin perak, maka hanya dengan 2 dollar Meksiko mereka bisa mendapatkan 1 koin emas dan 1 koin perak Jepang. Bisa dibayangkan berapa banyak keuntungan yang bisa diambil oleh bangsa Barat. Selain itu, adanya pasal dalam perjanjian tahun 1858 yang menjelaskan tentang kebebasan pertukaran nilai mata uang asing, semakin memudahkan keluarnya emas dari negara Jepang. Hal ini memicu adanya demam emas yang terjadi di tahun 1859-1860. Sebagian besar orang-orang asing yang menetap di Jepang berusaha menukarkan koin perak mereka dengan koin emas, yang selanjutnya akan dijual kembali ke pantai Tiongkok. Derasnya emas yang mengalir ke luar Jepang membuat bakufu mengurangi kadar emas dalam koin

hingga dupertiga. Hal ini tentu merusak mata uang negara dan sudah tentu Jepang menjadi pihak yang sangat dirugikan dalam perjanjian dengan Bangsa Barat (Dasuki, 1963b: 9; Beasley dalam Marius, 2008: 285-286).

Pada tahun 1859 bakufu pernah melakukan beberapa cara untuk memperbaiki keadaan ekonomi Jepang, yakni dengan membuat mata uang baru. Mata uang yang baru nilainya lebih meningkat daripada mata uang yang lama. Jika dulu untuk mendapat 1 dollar Meksiko harus mengeluarkan 3 koin perak, maka dengan mata uang yang baru hanya cukup 1 perak. Satu koin perak yang dapat ditukar dengan 1 dollar Meksiko disebut juga *nishu-gin*. Sebelum rencana ini berjalan lama, Townsend Harris dan Sir Rutherford Alcock memprotes keras tindakan tersebut. Bakufu akhirnya menarik kembali mata uang baru yang sudah dibuatnya (Beasley dalam Marius, 2008: 286).

Bakufu juga pernah melakukan cara lain untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi Jepang dengan cara memotong pasokan koin perak pada bulan November 1859. Tindakan yang dilakukan bakufu kembali mendapatkan protes dari Harris dan Alcock. Menurut keduanya jika pemotongan pasokan koin perak dilakukan maka akan menghentikan jalannya perdagangan dan hal ini bertentangan dengan perjanjian yang telah disepakati. Lebih parah lagi keduanya akan mengancam untuk mendeklarasikan perang terhadap Jepang jika tuntutan mereka tidak dikabulkan. Mengetahui hal ini bakufu tidak bisa berbuat apa-apa lagi (Beasley dalam Marius, 2008: 286-287).

Pada tahun-tahun berikutnya bakufu mulai terlena untuk memenuhi kebutuhan pertahanan Jepang. Banyak pengeluaran yang dikeluarkan bakufu untuk membeli senjata-senjata moderen dan mengirim samurai-samurai mudanya ke luar negeri untuk mempelajari teknologi militer Barat. Pada tahun 1863-1864 biaya yang dikeluarkan semakin membengkak bahkan sampai menghisap kas negara, ketika banyak pertarungan-pertarungan yang mengakibatkan adanya biaya ganti rugi. Pada tahun 1864 beban berat yang tidak tertahankan mengakibatkan bakufu tidak mampu

membayar ganti rugi akibat Insiden yang terjadi di Shimoneski antara Choshu dengan pasukan Inggris, Perancis, Belanda dan Amerika.

Ekspor dan Impor yang terus meningkat membuat ekonomi Jepang semakin tidak stabil. Ekspor yang dilakukan Jepang terkait dengan barang-barang seperti sutera, teh, emas dan lain sebagainya, sedangkan impor yang dilakukan berkaitan dengan senjata-senjata dan kapal-kapal berteknologi moderen. Berikut ini tabel yang melihat peningkatan ekspor dan impor Jepang pada masa Tokugawa.

Tabel 6.2 Perdagangan Luar Negeri Jepang Tahun 1860 dan 1865 (dalam dollar Meksiko)

Macam	1860	1865
Ekspor	4,7 Juta	17 Juta
Impor	1,66 Juta	15 Juta

Sumber: Wikipedia. <http://en.wikipedia.org/wiki/Bakumatsu>. [03 Maret 2015]

Meningkatnya ekspor dan impor yang dilakukan, semakin memperburuk kondisi ekonomi Jepang pada masa Keshogunan Tokugawa. Pada tahun 1868 Edo dan sejumlah wilayah lainnya di Jepang mulai banyak yang terlilit utang pada kreditor asing, yang bertindak sebagai penjamin pembelian kapal dan senjata-senjata moderen (Beasley, 2003: 253).

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa masuknya bangsa Barat tidak hanya menimbulkan gejolak dalam kehidupan politik dan sosial di Jepang tetapi juga pada kehidupan ekonomi. Kondisi ekonomi Jepang mengalami penurunan ketika banyak emas yang mengalir keluar Jepang. Adanya ganti rugi akibat konflik yang terjadi dengan bangsa Barat juga memperburuk keadaan. Parahnya lagi di akhir Keshogunan Tokugawa, Edo dan beberapa wilayah lainnya banyak yang terlilit hutang terhadap kreditor asing. Situasi ini jelas semakin menyulitkan Keshogunan Tokugawa.

6.7 Pengembalian Kekuasaan dari Shogun ke Kaisar

Pada tanggal 3 Februari 1867 Kaisar Komei wafat dan posisinya digantikan oleh putranya yang bernama Mutsuhito. Kaisar Mutsuhito disebut juga dengan Kaisar

Meiji yang saat menerima jabatan berusia 16 tahun. Kaisar Meiji berbeda dengan ayahnya, dia memiliki pemikiran yang lebih bijaksana dalam melihat masuknya bangsa Barat ke Jepang. Kaisar Komei dalam menjalankan pemerintahannya di istana Kaisar dibantu oleh seorang hakim yang cerdas yakni Iwakura Tomomi. Pada musim gugur tahun 1866 Iwakura pernah menyampaikan suatu pilihan kepada istana Kaisar untuk berpihak kepada bakufu atau melawan daimyo dari Choshu, Satsuma atau mungkin dari daerah lainnya yang menginginkan adanya pemerintahan baru yang bersatu. Iwakura juga menyarankan bahwa, Kaisar harus mengeluarkan perintah untuk bakufu agar meninggalkan sikap egoisnya dan bertindak sesuai dengan prinsip yang ada yakni pemulihan kekuasaan Kaisar. Negara harus bersatu dalam menghadapi bangsa Barat dan menangani permasalahan nasional yang terjadi. Menurut pendapat Iwakura, di langit tidak ada dua matahari dan di bumi tidak ada dua raja oleh karena itu, Kaisar harus mengambil tindakan untuk menghapus bakufu (Beasley dalam Marius, 2008: 353-354).

Disaat yang bersamaan gerakan pemulihan kekuasaan ke tangan Kaisar mulai mencapai puncaknya. Shimadzu Saburo yang merupakan pemimpin dari Satsuma setuju untuk mengadakan persetujuan dengan Choshu, yang selanjutnya diikuti oleh Echizen (di Kyushu), Tosa (di Shikoku) dan Uwajima. Pada bulan Mei 1867 Saigo Takamori dengan Shimadzu Saburo memimpin suatu pasukan menuju Kyoto. Tidak lama setelah itu, para samurai dari Echizen, Tosa, dan Uwajima dan sebagainya tiba di Kyoto (Lan, 1962: 136-137). Mereka semua pergi ke Edo untuk bertemu dengan Shogun ke 15 yakni Tokugawa Yoshinobu dan menyampaikan tuntutan. Pengembalian kekuasaan dari Shogun ke Kaisar merupakan isi dari tuntutan mereka. Jepang membutuhkan suatu perubahan untuk mengatasi krisis yang terjadi semenjak kedatangan bangsa Barat. Suatu negara yang dikepalai oleh 2 orang tidak bisa berjalan dengan baik, oleh karena itu jika kekuasaan yang seutuhnya berada di tangan Kaisar yang merupakan keturunan dari Amaterasu Omikami, Jepang bisa menjadi negara yang lebih baik.

Tokugawa Yoshinobu yang saat itu sedang berusaha melakukan perbaikan-perbaikan dalam pemerintahannya merasa jika kekacauan yang terjadi serta masalah keuangan yang belum terselesaikan menjadi beban yang berat bagi dirinya. Hal ini menyadarkan dirinya bahwa Keshogunan Tokugawa tidak memiliki hak untuk mempertahankan kekuasaannya ditengah krisis yang melanda Jepang. Melihat situasi dan kondisi yang sudah tidak memungkinkan lagi, Tokugawa Yoshinobu akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dan mengembalikan kekuasaan yang sebenarnya ke tangan Kaisar pada tanggal 8 November 1867. Berakhirlah periode Keshogunan Tokugawa setelah hampir dua setengah abad menguasai Jepang (Lan, 1962: 137).

Alasan Yoshinobu mengambil keputusan untuk mengembalikan kekuasaan ke Kaisar bukan semata-mata hanya karena adanya tekanan dari banyak pihak ataupun permasalahan yang begitu membebani dirinya. Ada alasan lain yang lebih penting yakni, agar pengembalian kekuasaan yang dilakukan secara damai ini masih memberikan kesempatan untuk keluarga Shogun dan pengikutnya untuk mendapatkan tempat dalam pemerintahan Jepang yang baru. Meski tidak menjadi penguasa, dengan masih mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan setidaknya keluarga Tokugawa beserta pengikutnya masih dapat membangun kekuasaan yang baru. Kenyataannya daimyo dari Choshu dan Satsuma yang tidak menyukai Tokugawa tidak membiarkan hal itu terjadi, sebab pada tanggal 3 Januari 1868 setelah bermusyawarah dengan pejabat istana secara resmi Kaisar Mutsuhito menghapus Keshogunan dan Shogun diberi perintah untuk mengembalikan semua kekayaan dan tanah milik bakufu. Pengembalian kekuasaan dari Shogun ke Kaisar merupakan peristiwa penting yang bersejarah, sebab semenjak peristiwa tersebut pemerintahan feodal yang berbasis militer dihapuskan dan Jepang berubah menjadi negara moderen yang memiliki kemajuan sepadan dengan bangsa-bangsa Barat lainnya (Dasuki, 1963b: 12).

Dengan demikian, pengangkatan Kaisar Mutsuhito sebagai pemimpin yang baru semakin mendorong para daimyo yang tidak menyukai kepemimpinan

Tokugawa untuk menggulingkan Keshogunan Tokugawa. Kaisar Mutsuhito yang masih muda dan memiliki pemikiran cemerlang diharapkan dapat membawa Jepang kearah yang lebih baik. Keinginan para daimyo yang anti Tokugawa akhirnya terwujud pada tanggal 8 November 1867. Tidak dapat dipungkiri bahwa berakhirnya Keshogunan Tokugawa tidak hanya disebabkan oleh permasalahan internal yang terjadi, tetapi juga karena pembukaan negara Jepang yang dilakukan oleh bangsa Barat. Selain itu, bersatunya Jepang dibawah kekuasaan tunggal Kaisar mampu membawa Jepang menjadi negara maju yang kekuatannya hampir sama dengan bangsa Barat. Hal ini dikarenakan modernisasi yang dilakukan Kaisar Mutsuhito namun tetap memegang tradisi dan adat istiadat leluhur.

BAB 7. PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, latar belakang masuknya bangsa Barat ke Jepang dikarenakan adanya revolusi industri yang terjadi di Inggris. Terjadinya revolusi industri menyebabkan bangsa Barat berlomba-lomba untuk mendapatkan wilayah baru yang dapat dijadikan sebagai tempat perdagangan dan tempat memperoleh bahan baku yang diinginkan. Pecarian wilayah baru ini mengakibatkan Jepang mulai dikenal oleh bangsa Barat. Selain itu pada abad ke 18 Jepang yang sebelumnya tidak masuk dalam jalur lalu lintas perdagangan internasional berubah menjadi daerah lalu lintas bagi kapal-kapal bangsa Barat.

Bangsa Barat datang ke Jepang dengan tujuan yang sama ingin menjalin hubungan yang baik untuk menunjang perluasan perdagangan yang sedang dilakukan. Jepang yang saat itu masih melaksanakan kebijakan politik isolasi berulang kali menolak ajakan dari bangsa Barat. Misi pertama yang dikirim untuk membuka Jepang dilakukan oleh Rusia pada tahun 1791, kemudian menyusul bangsa Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat pada tahun-tahun berikutnya. Sampai akhirnya, Commodore Matthew Calbraith Perry berhasil membuat Jepang membuka negaranya sedikit demi sedikit. Perjanjian Kanagawa maupun perjanjian Persahabatan dan Perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Barat, menjadi tanda bahwa Jepang telah menghentikan politik isolasinya dan bersedia mengadakan hubungan dagang dan diplomatis dengan bangsa Barat. Baik perjanjian Kanagawa maupun perjanjian Persahabatan dan Perdagangan yang dilakukan Tokugawa dengan bangsa Barat tanpa mendapat izin dari Kaisar. Ini menjadi kesalahan fatal Tokugawa yang dijadikan senjata oleh kelompok-kelompok yang ingin menggulingkan Keshogunan Tokugawa.

Perjanjian-perjanjian yang menandai pembukaan negara Jepang oleh bangsa Barat menimbulkan suatu dampak terhadap Keshogunan Tokugawa. Dampak yang muncul dimulai dengan adanya gerakan *Sonno Joi*. Tindakan ini dilanjutkan dengan

serangan yang dilakukan para *shishi* terhadap warga asing. Penyerangan ini kemudian berlanjut pada peristiwa pengeboman Kagoshima. Selanjutnya terjadi pengeboman Shimonoseki I dan pengeboman Shimonoseki II. Aksi penyerangan dan pertempuran yang terjadi menyebabkan kondisi keuangan Jepang memburuk. Situasi dan kondisi yang semakin sulit mengakibatkan berakhirnya Keshogunan Tokugawa yang ditandai dengan pengembalian kekuasaan dari Tokugawa Yoshinobu kepada Kaisar Mutsuhito akhirnya terjadi pada tanggal 8 November 1867.

7.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diuraikan sebelumnya, maka penulis menyampaikan beberapa saran.

1. Bagi pemerintah, hendaknya dualisme pemerintahan yang terjadi di Jepang pada masa Keshogunan Tokugawa dapat dijadikan sebagai suatu pelajaran dalam melaksanakan pemerintahan di Indonesia. Dualisme pemerintahan yang terjadi, hanya akan membawa suatu negara dalam kekacauan. Di langit tidak adadua matahari yang bersinar, begitupun di bumi tidak ada dua pemimpin yang berkuasa.
2. Bagi generasi penerus bangsa, hendaknya dapat mengambil sisi positif dari pembukaan negara Jepang yang dilakukan oleh bangsa Barat. Pembukaan negara yang terjadi tidak hanya menimbulkan kekacauan tetapi mempererat persatuan rakyat Jepang. Persatuan merupakan kunci utama suatu negara untuk menghadapi bahaya dari negara lain yang ingin menguasainya.
3. Bagi mahasiswa program studi pendidikan sejarah, hendaknya selalu mempelajari berbagai disiplin-disiplin ilmu lainnya khususnya Sejarah Asia Timur seperti pembukaan negara Jepang oleh bangsa Barat pada masa Keshogunan Tokugawa tahun 1791-1867 yang dapat menunjang profesionalismenya sebagai calon guru sejarah.

Demikian beberapa saran-saran yang dapat penulis sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurahman, D. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Agung S, L. 2012. *Sejarah Asia Timur 2*. Yogyakarta: Ombak
- Bain, C.A. 1962. *The Far East*. New Jersey: Littlefield, Adams & Co.
- Beasley, W.G. *Pengalaman Jepang “Sejarah Singkat Jepang”*. Terjemahan oleh Masri Maris. 2003. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Beasley, W.G. “The Foreign Threat and The Opening of The Ports”, dalam Marius, J.B. (Ed). *The Cambridge History of Japan Volume 5 The Nineteenth Century*. 2008. New York: Cambridge University Press.
- Bellah, R.N. 1985. *Religi Tokugawa “Akar-Akar Budaya Jepang”*. Terjemahan Oleh Wardah Hafidz dan Drs. Wiladi Budiharga. 1992. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Darsono. 2014. *Samurai Filosofi Hidup dan Semangat Ksatria*. Surabaya: Liris
- Dasuki, A. 1963a. *Sedjarah Djepang Jilid I*. Bandung: Balai Pendidikan Guru
- Dasuki, A. 1963b. *Sedjarah Djepang Jilid II*. Bandung: Balai Pendidikan Guru
- Departemen Luar Negeri Jepang. 1967. *Djepang Dewasa Ini*. Jakarta: Biro Urusan Penerangan dan Kebudayaan
- Duverger, M. *Sosiologi Politik*. Terjemahan oleh Daniel Dhakidae. 2014. Cetakan XV. Jakarta: Rajawali Press
- Gottschalk, L. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto. 1986. Jakarta: UI Press.
- Handayani, S., Gema Budiarto. 2014. *Dinamika Kepemimpinan Jepang Tahun 1668-1945*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo
- Haryanti, P. 2013. *All About Japan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Hayes, L. D. 1994. *Introduction Japanese Politics*. Second Edition. New York: Marlowe & Company

- Hillsborough, R. 2005. *Shinsengumi "Pasukan Samurai Terakhir Shogun"*. Terjemahan oleh Noviantri Anggraini. 2009. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Hiroshi, M. 2003. *Escape From Impasse "The Decision to Open Japan"*. Terjemahan Oleh David Noble. 2006. Japan: Internasional House of Japan.
- Hiroshi, W. A. 2010. *A History of Japanese Political Thought 1600-1901*. Terjemahan Oleh David Noble. 2012. Japan: Internasional House of Japan.
- Ishii, R. 1980. *Sejarah Institusi Politik Jepang*. Terjemahan Oleh J.R Sunaryo. 1989. Jakarta: PT. Gramedia.
- Kedutaan Besar Jepang. 1985. *Jepang Sebuah Pedoman Saku*. Jakarta: Foreign Prees Center Japan.
- Lan, N. J. 1962. *Djepang Sepandjang Masa*. Jakarta: PT Kinta.
- Mattulada. 1979. *Pedang dan Sempoa (Suatu Analisa Kultural "Perasaan Kepribadian" Orang Jepang)*. Kyoto: Depdikbud.
- Nurhayati, Y. 1987. *Langkah-Langkah Awal Modernisasi Jepang*. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Notosusanto, N. 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Inti Idayu Press
- Puspitawati, H. 2009. *Teori Konflik Sosial dan Aplikasinya dalam Kehidupan Sekarang*. Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia IPB
- Rosidi, A. 1981. *Mengenal Jepang*. Jakarta: Pusat Kebudayaan Jepang Jakarta
- Sakamoto, T. 1992. *Jepang Dulu dan Sekarang*. Terjemahan oleh Sylvia Tlwon.. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Satow, E. 1921. *A Diplomat in Japan*. London: Seeley, Service & Co. Limited.
- Sjamsuddin, H. 1996. *Metodologi Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

- Soeroto. 1954. *Indonesia Ditengah-tengah Dunia dari Abad ke Abad Djilid 2*. Jakarta: Djambatan
- Stockwin, J.A.A. *Pluralisme Politik dan Kemajuan Ekonomi Jepang*. Terjemahan oleh Nin Bakdi Sumanto. 1984. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Sundoro, M.H. 2007. *Dari Renaisans Sampai Imperialisme Modern "Sejarah Peradaban Barat Abad Modern"*. Jember: University Press
- Suradjaja, I.K. 1984. *Pergerakan Demokrasi Jepang*. Jakarta: PT. Karya Unipress
- Suryohadiprojo, S. 1987. *Belajar Dari Jepang (Manusia dan Masyarakat Jepang Dalam Perjuangan Hidup)*. Jakarta: UI-Press.
- Swandana, D. 2009. *Dewa Perang Jepang*. Sidoarjo: Masmmedia Buana Pustaka
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 2 Cetakan 1. Jakarta: Balai Pustaka
- Tjeng, L.T. 1983. *Study Wilayah Pada Umumnya Asia Timur Pada Khususnya*. Bandung: Alumni.
- Tsunenari, T. 2007. *The Edo Inheritance*. Terjemahan Oleh Tokugawa Iehiro. 2009. Japan: International House of Japan.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.
- Webb, Herschel. 1957. *An Introduction to Japan*. New York: Columbia University Press.
- Yukichi, F. *Jepang Diantara Feodalisme dan Modernisme*. Alih bahasa oleh Arifin Bey. 1985. Jakarta: PT. Pantja Simpati

Jurnal/Artikel/Laporan Penelitian/Skripsi

- Subakti, YR. 2011. Nasionalisme Jepang Pada Era Tokugawa dan Meiji. *Historia Vitae Humaniora*. Vol 25 (1): 13-36
- Widarahesty, Y., Rindu Ayu. 2011. Pengaruh Politik Isolasi (Sakoku) Jepang terhadap Nasionalisme Bangsa Jepang: Studi tentang Politik Jepang dari Zaman Edo (Feodal) sampai Perang Dunia II. *Jurnal Al-Azhar Indonesia*. Vol 1 (1): 46-62

Simandjuntak, G. 1991. *Keberhasilan Jepang Membangun Ekonomi*. Jember: Universitas Jember.

Bahri, S. 1998. "Pembangunan Jepang Sesudah Restorasi Meiji dalam Bidang Politik, Ekonomi, Militer dan Pendidikan." Tidak Diterbitkan. Skripsi. Jember: Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Jember.

Sularsih, N. 2006. "Perubahan Jepang dalam Restorasi Meiji Tahun 1868-1890." Tidak Diterbitkan. Skripsi. Jember: Program Studi Sastra Sejarah Universitas Jember.

Internet

Luthfiamer. 2011. Politik Air Hangat. <http://paradoxluthfiamer.blogspot.com/2011/11/politik-air-hangat.html>. [08 Januari 2015].

US National Archives & Records Administration. The Treaty of Kanagawa. http://www.archives.gov/exhibits/featured_documents/treaty_of_kanagawa/treaty_images.html. [12 Mei 2015]

Wikipedia. 2015. Keshogunan Tokugawa. http://id.wikipedia.org/wiki/Keshogunan_Tokugawa. [09 Mei 2015]

Wikipedia. 2014. Mutsuhito. <http://wikipedia.org/wiki/Mutsuhito>. [08 Januari 2015]

Wikipedia. 2014. Bakumatsu. <http://en.wikipedia.org/wiki/Bakumatsu>. [03 Maret 2015]

Wikipedia. 2014. First Choshu Expedition. http://en.wikipedia.org/wiki/First_Ch%C5%8Dsh%C5%AB_expedition. [05 Maret 2015]

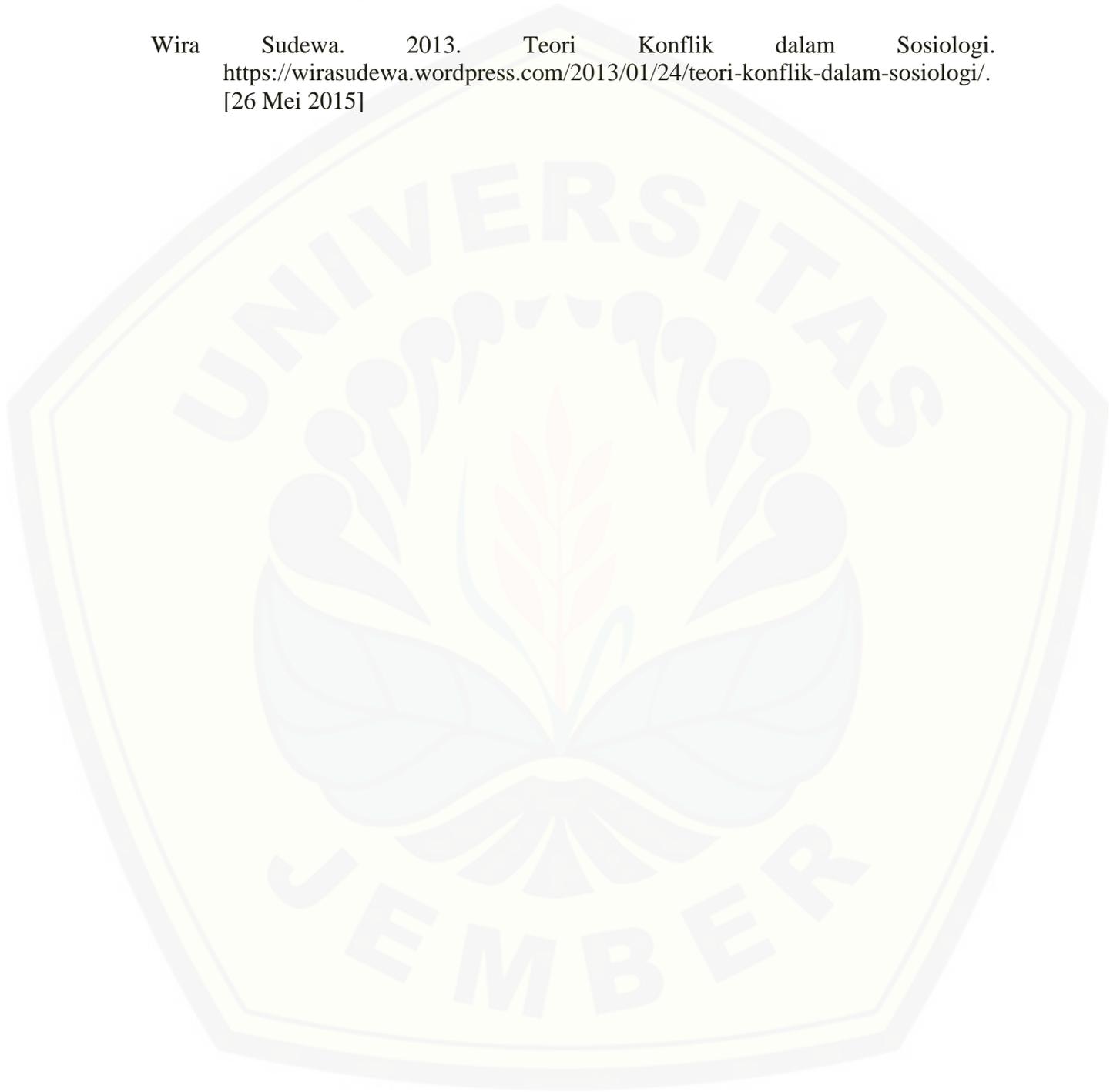
Wikipedia. 2014. Bombardment of Kagoshima. http://en.wikipedia.org/wiki/Bombardment_of_Kagoshima. [05 Maret 2015]

Wikipedia. 2015. Battle of Shimonoseki Straits. http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Shimonoseki_Straits. [05 Maret 2015]

Wikipedia. 2015. Treaty of Amity and Commerce United States-Japan. http://en.wikipedia.org/wiki/treaty_of_Amity_and_Commerce_%28United_States%E2%80%93Japan%29. [09 Mei 2015]

Wikipedia. 2015. Japanese Currency. http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_currency.
[12 Mei 2015]

Wira Sudewa. 2013. Teori Konflik dalam Sosiologi.
<https://wirasudewa.wordpress.com/2013/01/24/teori-konflik-dalam-sosiologi/>.
[26 Mei 2015]



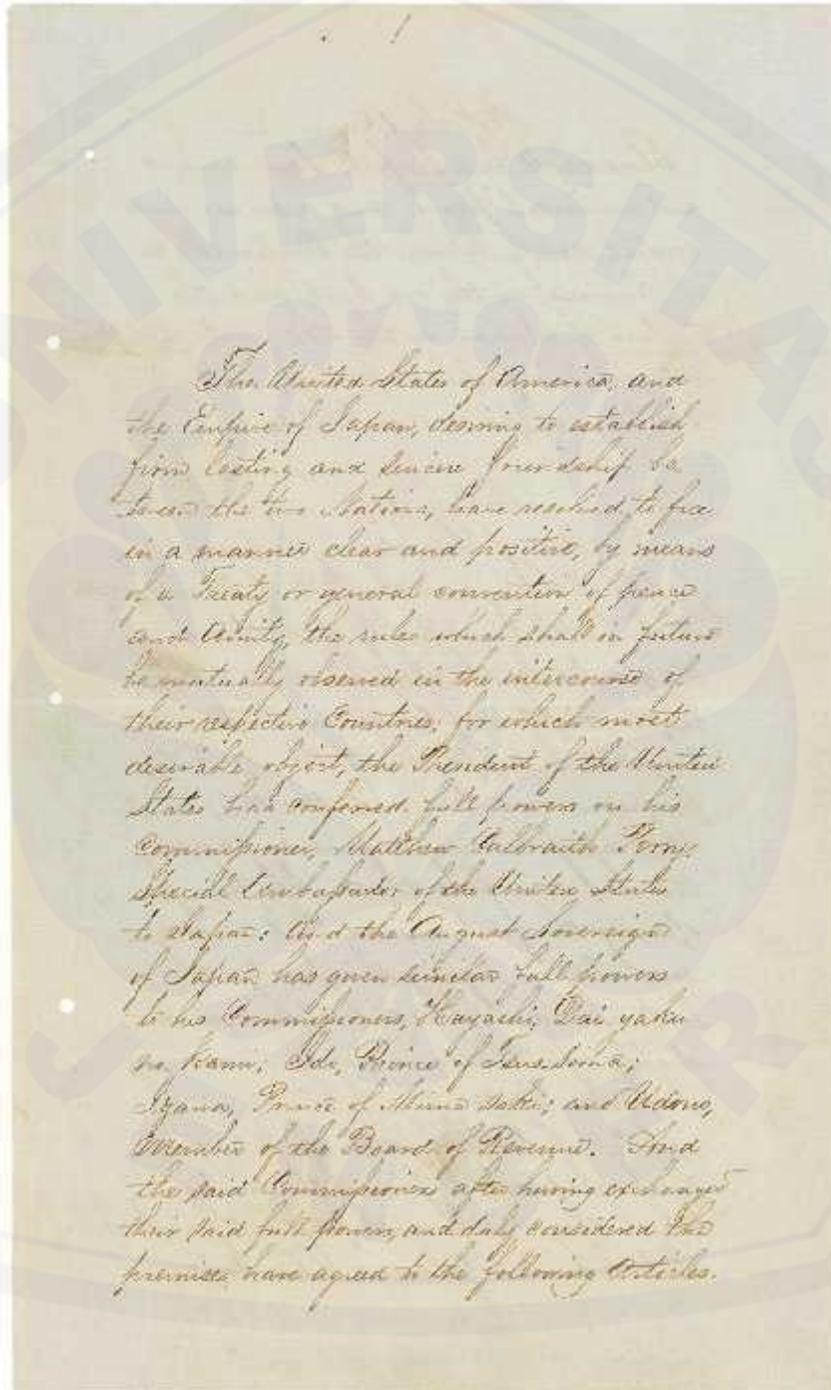
LAMPIRAN A

Matrik Penelitian

Topik	Judul Penelitian	Jenis dan Sifat Penelitian	Permasalahan	Sumber Data	Metode Penelitian
1	2	3	4	5	6
Sejarah Asia Timur	Pembukaan Negara Jepang Oleh Bangsa Barat Pada Masa Keshogunan Tokugawa Tahun 1853-1867	a. Jenis Penelitian : penelitian sejarah b. Sifat Penelitian : studi pustaka atau studi literatur	1. Bagaimana latar belakang masuknya bangsa Barat ke Jepang pada Masa Keshogunan Tokugawa? 2. Bagaimana pembukaan negara Jepang oleh bangsa Barat pada Masa Keshogunan Tokugawa Tahun 1853-1858? 3. Bagaimana dampak pembukaan negara Jepang oleh bangsa Barat terhadap Keshogunan Tokugawa Tahun 1853-1867	a. Buku pokok b. Buku penunjang Diperoleh dari : a. Perpustakaan Pusat Universitas Jember b. Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Jember c. Perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Jember d. Perpustakaan Daerah Jember e. Toko-toko Buku	Metode penelitian sejarah, dengan tahap: a. Heuristik b. Kritik c. Interpretasi d. Historiografi

LAMPIRAN B

PERJANJIAN KANAGAWA



Article I.

There shall be a perfect, permanent, and universal peace, and a sincere and cordial amity between the United States of America, on the one part, and the Empire of Japan on the other part; and between their people respectively, without exception of persons or places.

Article II.

The Port of Simoda in the principality of Idzumi, and the Port of Hakodade, in the principality of Matsumai, are granted by the Japanese as ports for the reception of American Ships, where they can be supplied with Wood, Water, provisions, and Coal, and other articles their necessities may require as far as the Japanese have them. The time for opening the first named Port is immediately on signing this Treaty; the last named Port is to be opened immediately after the same day in the ensuing Japanese Year.

Acte. A tariff of prices shall be given by the Japanese Officers of the things which they can furnish, payment for which shall be made in Gold and Silver Coins.

Article III.

Whenever Ships of the United States are thrown or wrecked on the Coast of Japan, the Japanese vessels will assist them, and carry their Crews to Simoda, or Hakodade, and hand them over to their Countrymen appointed to receive them; whatever Articles the Ship wrecked men may have preserved shall likewise be restored, and the expenses incurred in the rescue and support of Americans and Japanese who may thus be thrown upon the shores of either nation are not to be refunded.

p. 57

Article IV.

Those Shipwrecked persons and other Citizens of the United States shall be free as in other Countries, and not subjected to confinement, but shall be amenable to just laws.

Article V.

Shipwrecked men and other Citizens of the United States, temporarily living at Simoda and Hakodade shall not be subject to such restrictions and confinement as the Dutch and Chinese are

4

at Nagasaki, but shall be free at
Simoda to go where they please within
the limits of Seven Japanese miles
(or Ri) from a small Island in the
harbor of Simoda, marked on the ac-
companying Chart, hereto appended:
and shall in like manner be free to
go where they please at Hakodade, with-
in limits to be defined after the visit of the
United States Squadron to that place.

Article VI

If there be any other sort of goods
wanted, or any business which shall
require to be arranged, there shall be
careful deliberation between the parties
in order to settle such matters.

Article VII

It is agreed that Ships of the
United States resorting to the ports open
to them, shall be permitted to exchange
Gold and Silver Coin and articles of
goods for other articles of goods, under
such regulations as shall be tempora-
rily established by the Japanese Gov-
ernment for that purpose. It is
stipulated however that the Ships

of the United States shall be permitted to carry away whatever articles they are unwilling to exchange.

Article VIII.

Food, water, provisions, Coal and goods required shall only be procured through the agency of Japanese Officers appointed for that purpose, and in no other manner.

Article IX.

It is agreed, that if at any future date the Government of Japan shall grant to any other Nation or Nations privileges and advantages which are not herein granted to the United States, and the Citizens thereof, that these said privileges and advantages shall be granted likewise to the United States, and to the Citizens thereof, without any consultation or delay.

Article X.

Ships of the United States shall be permitted to resort to no other ports in Japan but Simida and Hakodade unless in distress or forced by stress of weather.

Article XI.

There shall be appointed by the Government of the United States, Consuls or Agents to reside in Simoda at any time after the expiration of eighteen months from the date of the signing of this Treaty, provided that either of the two governments deem such arrangement necessary.

Article XII.

The present Convention having been concluded and duly signed, shall be obligatory and faithfully observed by the United States of America and Japan, and by the Citizens and Subjects of each respective power; and it is to be ratified and approved by the President of the United States, by and with the advice and consent of the Senate thereof, and by the August Sovereign of Japan, and the ratifications shall be exchanged within eighteen months from the date of the Signature thereof, or sooner if practicable.

In faith whereof, we the respective
Plenipotentiaries of the United States
of America and the Empire of Japan
aforesaid have signed and sealed these
presente.

Done at Kanagawa this thirty first
day of March in the Year of our Lord
Jesus Christ One thousand eight hundred
and fifty four and of Kayei the Seventh
Year, third month and Third day.

H. C. Perry

Sumber: US National Archives & Records Administration.
http://www.archives.gov/exhibits/featured_documents/treaty_of_kanagawa/treaty_images.html. [12 Mei 2015].

LAMPIRAN C**THE UNITED STATES-JAPAN TREATY OF AMITY AND
COMMERCE ON JULY 29, 1858**

The President of the United States of America and his Majesty the Ty-Coon of Japan, desiring to establish on firm and lasting foundations the relations of peace and friendship now happily existing between the two countries, and to secure the best interest of their respective citizens and subjects by encouraging, facilitating, and regulating their industry and trade, have resolved to conclude a treaty of amity and commerce for this purpose, and have, therefore, named as their plenipotentiaries, that is to say: The President of the United States, his excellency Townsend Harris, Consul General of the United States of America for the Empire of Japan, and his Majesty the Ty-Coon of Japan, their excellencies Jno-oo-ye, Prince of Sinano, and Iwasay, Prince of Hego, who, after having communicated to each other their respective full powers, and found them to be in good and due form, have agreed upon and concluded the following articles:

ARTICLE I

There shall henceforward be perpetual peace and friendship between the United States of America and his Majesty the Ty-Coon of Japan and his successors.

The President of the United States may appoint a diplomatic agent to reside at the city of Yedo, and consuls or consular agents to reside at any or all of the ports in Japan which are opened for American commerce by this treaty. The diplomatic agent and consul general of the United States shall have the right to travel freely in any part of the empire of Japan from the time they enter on the discharge of their official duties.

The government of Japan may appoint a diplomatic agent to reside at Washington, and consuls or consular agents for any or all of the ports of the United States. The

diplomatic agent and consul general of Japan may travel freely in any part of the United States from the time they arrive in the country.

ARTICLE II

The President of the United States, at the request of the Japanese government, will act as a friendly mediator in such matters of difference as may arise between the government of Japan and any European power.

The ships of war of the United States shall render friendly aid and assistance to such Japanese vessels as they may meet on the high seas, so far as can be done without a breach of neutrality; and all American consuls residing at ports visited by Japanese vessels shall also give them such friendly aid as may be permitted by the laws of the respective countries in which they reside.

ARTICLE III

In addition to the ports of Simoda and Hakodadi, the following ports and towns shall be opened on the dates respectively appended to them, that is to say: Kanagawa, on the 4th of July, 1859; Nagasaki, on the 4th of July, 1859; Nee-e-gata [Niigata], on the 1st of January, 1860; Hiogo [Hyogo], on the 1st of January 1863.

In Nee-e-gata is found to be unsuitable as a harbor, another port on the west coast of Nipon shall be selected by the two governments in lieu thereof. Six months after the opening of Kanagawa the port of Simoda shall be closed as a place of residence and trade for American citizens. In all the foregoing ports and towns American citizens may permanently reside; they shall have the right to lease ground, and purchase the buildings thereon, and may erect dwellings and warehouses. But no fortification or place of military strength shall be erected under pretence of building dwellings or

warehouses; and to see that this article is observed, the Japanese authorities shall have the right to inspect, from time to time, any buildings which are being erected, altered, or repaired. The place which the Americans shall occupy for their buildings, and the harbor regulations, shall be arranged by the American consul and the authorities of each place, and if they cannot agree the matter shall be referred to and settled by the American diplomatic agent and the Japanese government.

No wall, fence, or gate shall be erected by the Japanese around the place of residence of the Americans, or anything done which may prevent a free egress and ingress to the same.

From the 1st of January, 1862, Americans shall be allowed to reside in the city of Yedo; and from the 1st of January, 1863, in the city of Osaca [Osaka], for the purposes of trade only. In each of these two cities a suitable place within which they may hire houses, and the distance they may go, shall be arranged by the American diplomatic agent and the government of Japan. Americans may freely buy from Japanese and sell to them any articles that either may have for sale, without the intervention of any Japanese officers in such purchase or sale, or in making or receiving payment for the same; and all classes of Japanese may purchase, sell, keep, or use any articles sold to them by the Americans.

The Japanese government will cause this clause to be made public in every part of the empire as soon as the ratifications of this treaty shall be exchanged.

Munitions of war shall only be sold to the Japanese government and foreigners.

No rice or wheat shall be exported from Japan as cargo, but all Americans resident in Japan, and ships, for their crews and passengers, shall be furnished with sufficient

supplies of the same. The Japanese government will sell, from time to time, at public auction, any surplus quantity of copper that may be produced. Americans residing in Japan shall have the right to employ Japanese as servants or in any other capacity.

ARTICLE IV

Duties shall be paid to the government of Japan on all goods landed in the country, and on all articles of Japanese production that are exported as cargo, according to the tariff hereunto appended.

If the Japanese custom-house officers are dissatisfied with the value placed on any goods by the owner, they may place a value thereon, and offer to take the goods at that valuation. If the owner refuses to accept the offer, he shall pay duty on such valuation. If the offer be accepted by the owner, the purchase money shall be paid to him without delay, and without any abatement or discount.

Supplies for the use of the United States navy may be landed at Kanagawa, Hakodadi, and Nagasaki, and stored in warehouse, in the custody of an officer of the American government, without the payment of any duty. But, if any such supplies are sold in Japan, the purchaser shall pay the proper duty to the Japanese authorities.

The importation of opium is prohibited, and any American vessel coming to Japan for the purposes of trade, having more than three catties (four pounds avoirdupois) weight of opium on board, such surplus quantity shall be seized and destroyed by the Japanese authorities. All goods imported into Japan, and which have paid the duty fixed by this treaty, may be transported by the Japanese into any part of the empire without the payment of any tax, excise, or transit duty whatever.

No higher duties shall be paid by Americans on goods imported into Japan that are fixed by this treaty, nor shall any higher duties be paid by Americans than are levied on the same description of goods if imported in Japanese vessels, or the vessels of any other nation.

ARTICLE V

All foreign coin shall be current in Japan and pass for its corresponding weight of Japanese coin of the same description. Americans and Japanese may freely use foreign or Japanese coin in making payments to each other.

As some time will elapse before the Japanese will be acquainted with the value of foreign coin, the Japanese government will, for the period of one year after the opening of each harbor, furnish the Americans with Japanese coin, in exchange for theirs, equal weight being given and no discount taken for recoinage. Coins of all description (with the exception of Japanese copper coin) may be exported from Japan, and foreign gold and silver uncoined.

ARTICLE VI

Americans committing offences against Japanese shall be tried in American consular courts, and when guilty shall be punished according to American law. Japanese committing offences against Americans shall be tried by the Japanese authorities and punished according to Japanese law. The consular courts shall be open to Japanese creditors, to enable them to recover their just claims against American citizens, and the Japanese courts shall in like manner be open to American citizens for the recovery of their just claims against Japanese.

All claims for forfeitures or penalties for violations of this treaty, or of the articles regulating trade which are appended hereunto, shall be sued for in the consular courts, and all recoveries shall be delivered to the Japanese authorities.

Neither the American or Japanese governments are to be held responsible for the payment of any debts contracted by their respective citizens or subjects.

ARTICLE VII

In the opened harbors of Japan Americans shall be free to go, where they please, within the following limits:

At Kanagawa, the River Logo [Rikugo] (which empties into the Bay of Yedo between Kawasaki and Sinagawa), and 10 *ri* in another direction.

At Hakodadi, 10 *ri* in any direction.

At Hiogo, 10 *ri* in any direction, that of Kyoto [Kyoto] excepted, which city shall not be approached nearer than 10 *ri*. The crews of vessels resorting to Hiogo shall not cross the River Enagawa, which empties into the Bay between Hiogo and Asaca. The distances shall be measured inland from Goyoso [Goyosho], or town hall, of each of the foregoing harbors, the *ri* being equal to 4,275 yards, American measure.

At Nagasaki Americans may go into any part of the imperial domain in its vicinity. The boundaries of Nee-e-gata, or the place that may be substituted for it, shall be settled by the American diplomatic agent and the government of Japan. Americans who have been convicted of felony, or twice convicted of misdemeanors, shall not go more than one Japanese *ri* inland from the places of their respective residences, and

all persons so convicted shall lose their right of permanent residence in Japan, and the Japanese authorities may require them to leave the country.

A reasonable time shall be allowed to all such persons to settle their affairs, and the American consular authority shall, after an examination into the circumstances of each case, determine the time to be allowed, but such time shall not in any case exceed one year, to be calculated from the time the person shall be free to attend to his affairs.

ARTICLE VIII

Americans in Japan shall be allowed the free exercise of their religion, and for this purpose shall have the right to erect suitable places of worship. No injury shall be done to such buildings, nor any insult be offered to the religious worship of the Americans. American citizens shall not injure any Japanese temple or mia [miya], or offer any insult or injury to Japanese religious ceremonies, or to the objects of their worship.

The Americans and Japanese shall not do anything that may be calculated to excite religious animosity. The government of Japan has already abolished the practice of trampling on religious emblems.

ARTICLE IX

When requested by the American consul, the Japanese authorities will cause the arrest of all deserters and fugitives from justice, receive in jail all persons held as prisoners by the consul, and give to the consul such assistance as may be required to enable him to enforce the observance of the laws by the Americans who are on land, and to

maintain order among the shipping. For all such service, and for the support of prisoners kept in confinement, the consul shall in all cases pay a just compensation.

ARTICLE X

The Japanese government may purchase or construct in the United States ships of war, steamers, merchant ships, whale ships, cannon, munitions of war, and arms of all kinds, and any other things it may require. It shall have the right to engage in the United States scientific, naval and military men, artizans of all kinds, and mariners to enter into its service. All purchases made for the government of Japan may be exported from the United States, and all persons engaged for its service may freely depart from the United States: Provided, That no articles that are contraband of war shall be exported, nor any persons engaged to act in a naval or military capacity, while Japan shall be at war with any power in amity with the United States.

ARTICLE XI

The articles for the regulation of trade, which are appended to this treaty, shall be considered as forming a part of the same, and shall be equally binding on both the contracting parties to this treaty, and on their citizens and subjects.

ARTICLE XII

Such of the provisions of the treaty made by Commodore Perry, and signed at Kanagawa, on the 31st of March, 1854, as conflict with the provisions of this treaty are hereby revoked; and as all the provisions of a convention executed by the consul general of the United States and the governors of Simoda, on 17th of June, 1857, are incorporated in this treaty, that convention is also revoked.

The person charged with the diplomatic relations of the United States in Japan, in conjunction with such person or persons as may be appointed for that purpose by the Japanese government, shall have power to make such rules and regulations as may be required to carry into full and complete effect the provisions of this treaty, and the provisions of the articles regulating trade appended thereto.

ARTICLE XIII

After the 4th of July, 1872, upon the desire of either the American or Japanese governments, and on one year's notice given by either party, this treaty, and such portions of the treaty of Kanagawa as remain unrevoked by this treaty, together with the regulations of trade hereunto annexed, or those that may be hereafter introduced, shall be subject to revision by commissioners appointed on both sides for this purpose, who will be empowered to decide on, and insert therein, such amendments as experience shall prove to be desirable.

ARTICLE XIV

This treaty shall go into effect on the 4th of July, 1859, on or before which day the ratifications of the same shall be exchanged at the city of Washington; but if, from any unforeseen cause, the ratifications cannot be exchanged by that time, the treaty shall still go into effect at the date above mentioned.

The act of ratification on the part of the United States shall be verified by the signature of the President of the United States, countersigned by the Secretary of State, and sealed with the seal of the United States.

The act of ratification on the part of Japan shall be verified by the name and seal of his Majesty the Ty-Coon, and by the seals and signatures of such of his high officers as he may direct.

This treaty is executed in quadruplicate, each copy being written in the English, Japanese, and Dutch languages, all the versions having the same meaning and intention, but the Dutch version shall be considered as being the original.

In witness whereof, the above named plenipotentiaries have hereunto set their hands and seals, at the city of Yedo, this 29th day of July, in the year of Our Lord 1858, and of the independence of the United States of America the eighty-third, corresponding to the Japanese era, the 19th day of the sixth month of the 5th of Ansei, Mma.

Sumber: Mitani Hiroshi (2006: 273-281)

LAMPIRAN D**KESHOGUNAN TOKUGAWA**

NO.	NAMA SHOGUN	MASA JABATAN
1.	Tokugawa Ieyasu	1603 (Keicho 8)-1605 (Keicho 10)
2.	Tokugawa Hidetada	1605 (Keicho 10)-1623 (Genna 9)
3.	Tokugawa Iemitsu	1623 (Genna 9)-1651(Keian 4)
4.	Tokugawa Ietsuna	1651 (Keian 4)-1680 (Enpo 8)
5.	Tokugawa Tsunayoshi	1680 (Enpo 8)-1709 (Hoei 6)
6.	Tokugawa Ienobu	1709 (Hoei 6)-1712 (Shotoku 2)
7.	Tokugawa Ietsugu	1713 (Shotoku 3)-1716 (Kyoho 1)
8.	Tokugawa Yoshimune	1716 (Kyoho 1)-1745 (Enkyo 2)
9.	Tokugawa Ieshige	1745 (Enkyo 2)-1760 (Horeki 10)
10.	Tokugawa Ieharu	1760 (Horeki 10)-1786 (Tenmei 6)
11.	Tokugawa Ienari	1787 (Tenmei 7)-1837 (Tenpo 8)
12.	Tokugawa Ieyoshi	1837 (Tenpo 8)-1853 (Kaei 6)
13.	Tokugawa Iesada	1853 (Kaei 6)-1858 (Ansei 5)
14.	Tokugawa Iemochi	1858 (Ansei 5)-1866 (Keio 2)
15.	Tokugawa Yoshinobu	1866 (Keio 2)-1867 (Keio 3)

Sumber : Watanabe Hiroshi (2012: 440)

LAMPIRAN E

**DAFTAR DAIMYO-DAIMYO TERKENAL PADA MASA
KESHOGUNAN TOKUGAWA BESERTA TANAH JAJAHANNYA
TAHUN 1865**

NO	DAIMYO	WILAYAH	PEMIMPIN	TANAH
1.	Aizu	Wakamatsu	Matsudaira	280.000 Koku
2.	Aki	Hiroshima	Asano	426.000 Koku
3.	Chikugo	Kurume	Arima	210.000 Koku
4.	Chikuzen	Fukouka	Kuroda	520.000 Koku
5.	Choshu	Yamaguchi	Mori	369.000 Koku
6.	Echizen	Fukui	Matsudaira Keie	320.000 Koku
7.	Higo	Kumamoto	Hosokawa	540.000 Koku
8.	Hizen	Saga	Nabeshima	357.000 Koku
9.	Kaga	Kanazawa	Maeda	1.022.700 Koku
10.	Kii	Wakayama	Tokugawa	555.000 Koku
11.	Mito	Mito	Tokugawa	350.000 Koku
12.	Owari	Nagoya	Tokugawa	619.500 Koku
13.	Okayama	-	Ikeda	315.200 Koku
14.	Satsuma	Kagoshima	Shimazu	770.800 Koku
15.	Sendai	-	Date	625.600 Koku
16.	Tosa	Kochi	Yamanouchi	242.000 Koku

Keterangan :

1 Koku = 10 to = 100 sho = 180,391 liter, perhitungan angka-angka ini adalah hitungan terhadap besarnya pajak yang dipungut. Pajak pada waktu itu dibayar dengan beras.

Sumber : I Ketut Suradjaja (1984: 50)

LAMPIRAN F

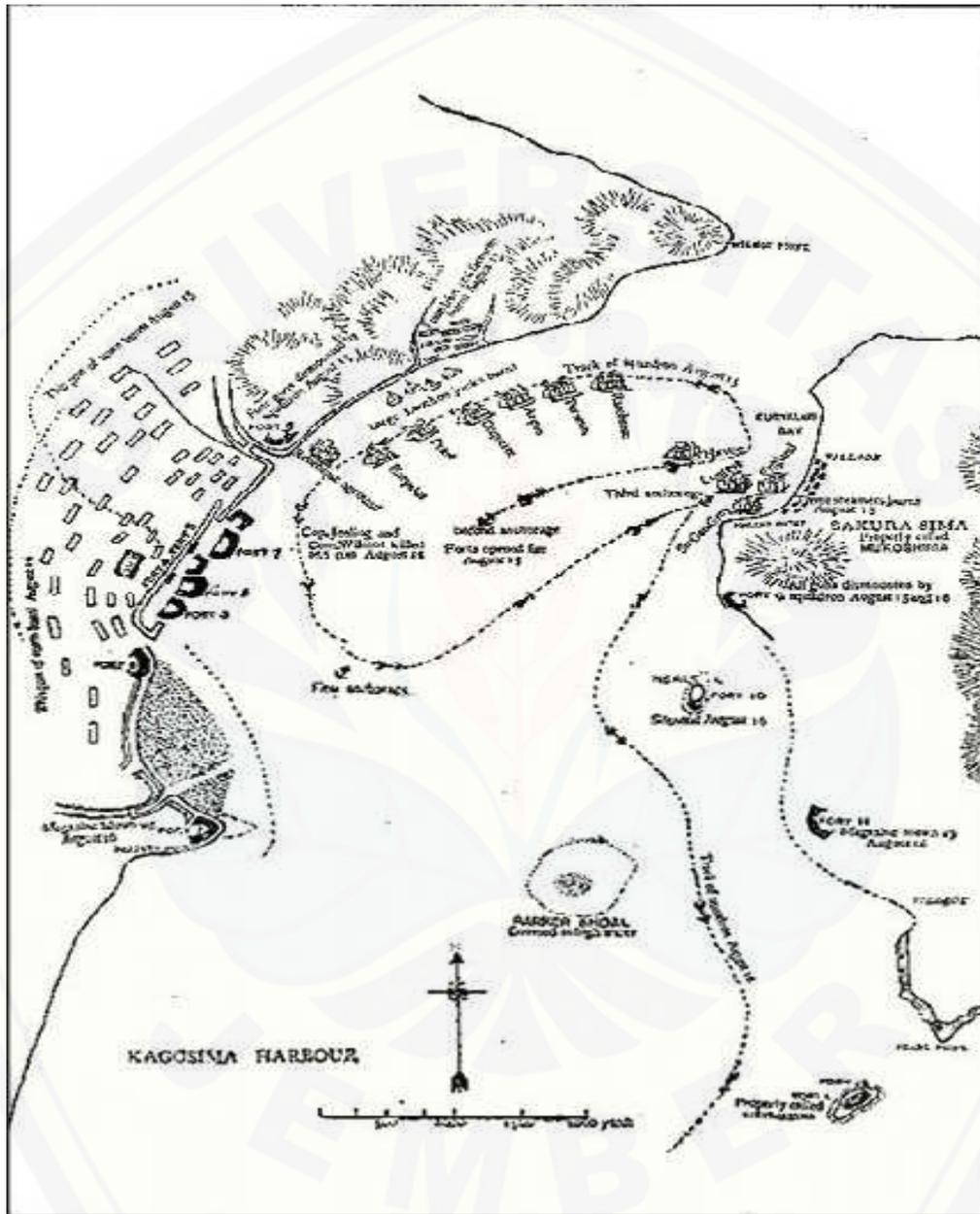
PETA WILAYAH JEPANG PADA ZAMAN KESHOGUNAN TOKUGAWA



Sumber : buku *The Cambridge History of Japan* Marius J.B tahun 2008.

LAMPIRAN G

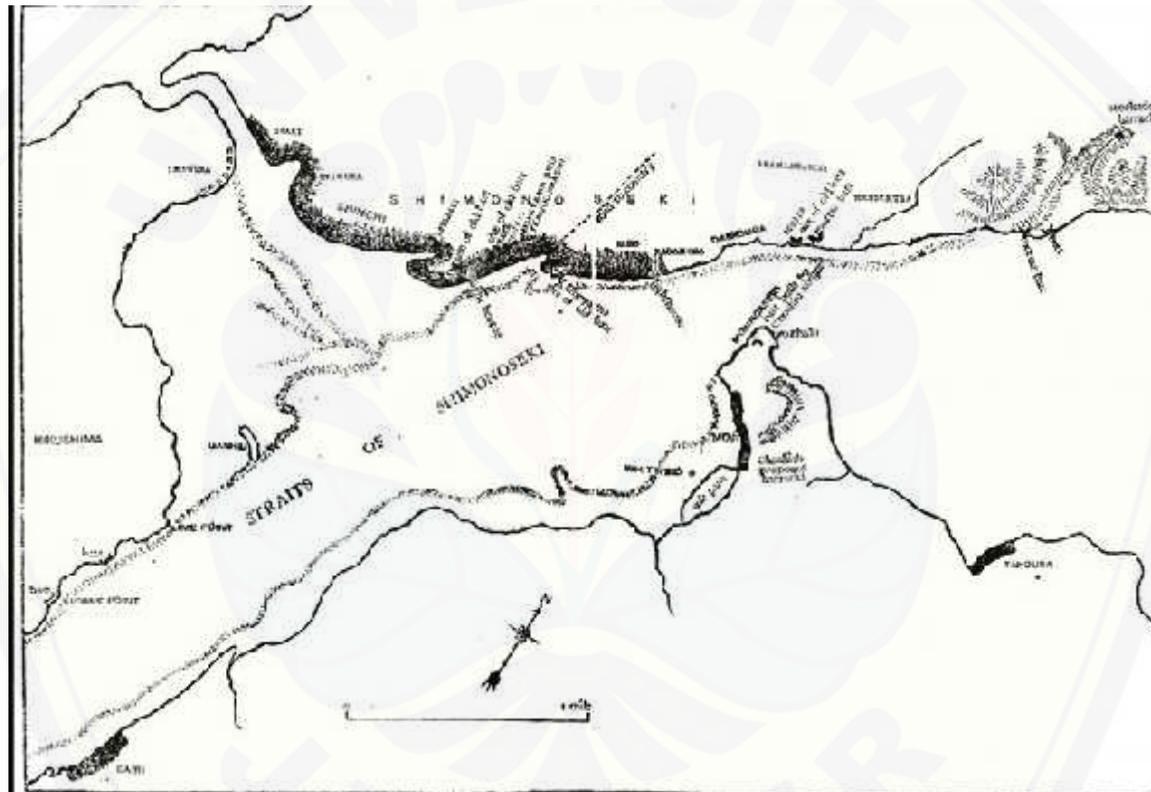
PETA PENGEBOMAN KAGOSHIMA TAHUN 1863



Sumber: buku *A Diplomat in Japan* Ernest Satow tahun 1921.

LAMPIRAN H

PETA PENUTUPAN SELAT SHIMONOSEKI



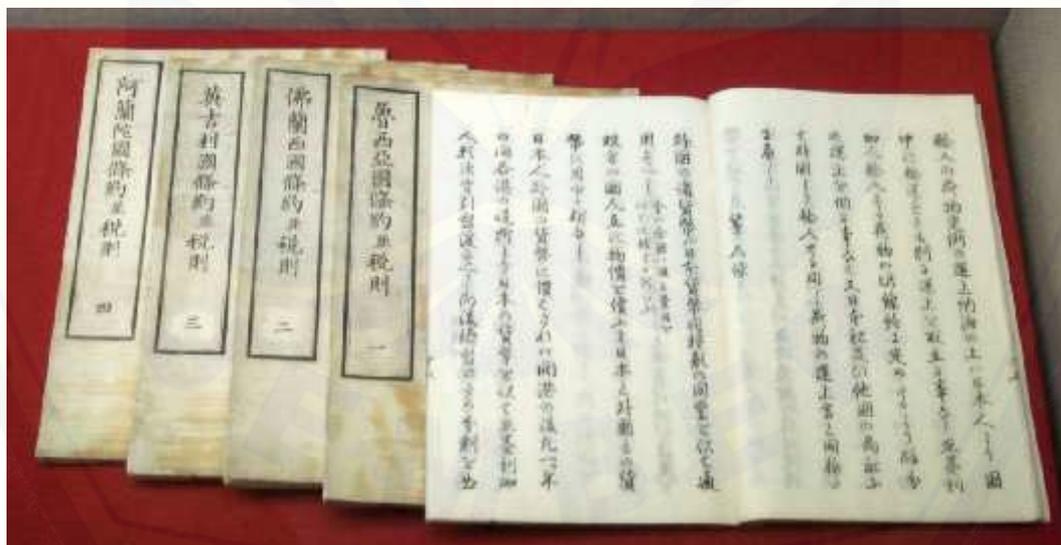
Sumber: buku *A Diplomat in Japan* Ernest Satow tahun 1921.

LAMPIRAN I

DAFTAR GAMBAR



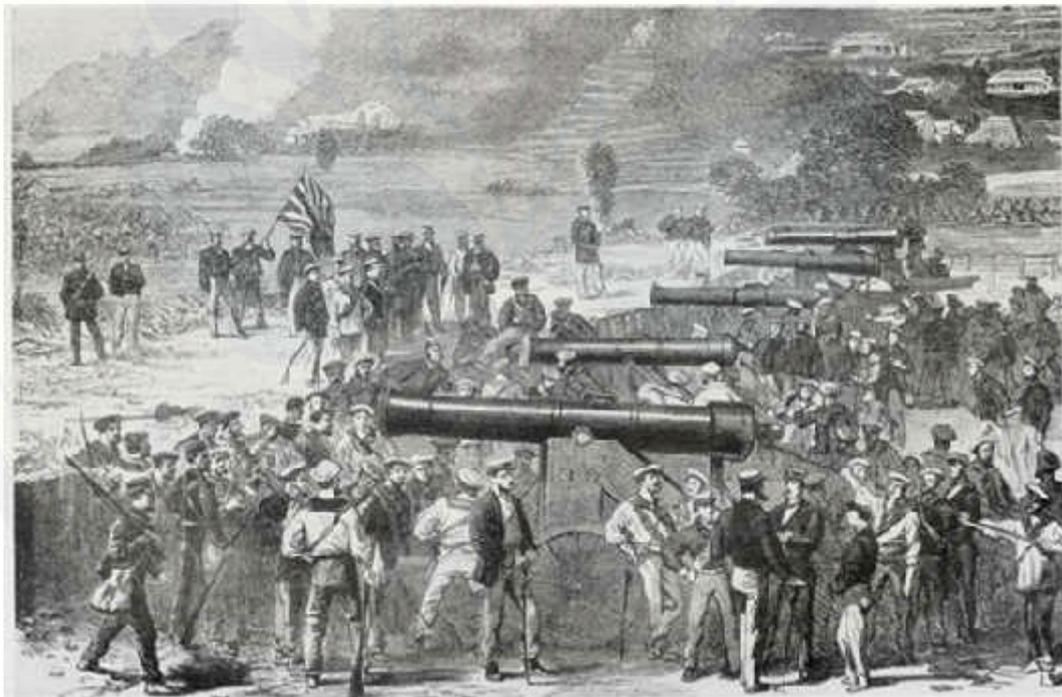
Gambar 01: Ilustrasi pasukan Perry tiba di Yokohama Tahun 1854
 Sumber: buku *Escape from Impasse* Mitani Hiroshi tahun 2006



Gambar 02: Dokumen Perjanjian Persahabatan dan Perdagangan Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Belanda dan Perancis dengan Jepang pada tahun 1858
 Sumber: Wikipedia. [http://en.wikipedia.org/wiki/treaty of Amity and Commerce %28United States%20and%20Japan%29](http://en.wikipedia.org/wiki/treaty_of_Amity_and_Commerce_of_United_States_of_America_and_Japan). [09 Mei 2015]



Gambar 3: Ilustrasi pembayaran atas pembunuhan Richardson
Sumber: buku *A Diplomat in Japan* Ernest Satow tahun 1921.



Gambar 4: Ilustrasi kondisi benteng Jepang setelah Angkatan Laut dari Inggris, Amerika Serikat, Belanda dan Perancis mendarat
Sumber: buku *A Diplomat in Japan* Ernest Satow tahun 1921



Gambar 5: Mata uang perak dan emas yang digunakan Jepang pada masa Keshogunan Tokugawa

Sumber: Wikipedia. <http://en.wikipedia.org/wiki/Bakumatsu>. [03 Maret 2015]



Gambar 6: Mata uang dolar Meksiko yang digunakan di Jepang pada masa Keshogunan Tokugawa

Sumber: Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_currency. [12 Mei 2015]



Gambar 7: Tokugawa Yoshinobu (Shogun terakhir)
Sumber: buku *A Diplomat in Japan* Ernest Satow tahun 1921



Gambar 8: Kaisar Mutsuhito
Sumber: Wikipedia. <http://wikipedia.org/wiki/Mutsuhito>. [08 Januari 2015]